



Y. Budi Widianarko adalah Dosen Universitas Katolik Soegijapranata (sejak 1994) yang sempat bertugas sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (1995-2000), Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kejasama (2000-2005) dan Rektor (2009-2017). Dia menjalani pendidikan S1 di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, dan S2 serta S3 di Faculteit der Biologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Jabatan akademik Catur Besar dalam bidang Toksikologi Lingkungan diraihnya pada tahun 2002. Di samping menekuni minat risetnya di bidang Ekologi dan Keamanan Pangan, dia juga banyak menuangkan gagasan dan kepeduliannya dalam sejumlah tulisan seputar pendidikan Tinggi dan kecendekiawanan di Indonesia.

Universitas Mandat, Hakikat dan Kecendekiawanan

Y. Budi Widianarko

Universitas Mandat, Hakikat dan Kecendekiawanan



Y. Budi Widianarko



UNIVERSITAS

Mandat, Hakikat dan Kecendekiawanan

Y. Budi Widianarko

Kata Pengantar :

Benediktus Danang Setianto

UNIVERSITAS

Mandat, Hakikat dan Kecendekiawanan

Desain sampul : Anggara PS
Perwajahan isi : Ernanto Henry

ISBN : 978-602-6865-34-2

Penerbit :
Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail : penerbitan@unika.ac.id

Hak Cipta © 2017 Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang 50234
Telp. 024-8505003, 8441555 (hunting) Fax. 024-8415429, 8445265
e-mail : unika@unika.ac.id

Kata Pengantar

Transformasi Pidato yang Menginspirasi

Tidak mudah bagi saya untuk menuliskan pengantar bagi karya Prof. Budi Widianarko. Pertama, tentu saya merasa bahwa orang akan lebih tertarik untuk segera membaca tulisan beliau daripada menikmati pengantar ini. Kedua, jangan-jangan pengantar yang saya buat setelah saya membaca seluruh karya beliau yang ada dalam terbitan ini, justru malah memberikan penafsiran yang tidak tepat atas karya beliau. Ketiga, sebagai sebuah pengantar, saya membayangkan harus bisa memberikan ajakan untuk membaca karya beliau padahal tanpa ajakan, orang pasti akan tertarik untuk membaca karya beliau. Namun, setelah saya pertimbangkan, di tengah kesibukan saya menjadi salah satu peserta Workshop IASACT 2017 di HongKong, saya hanya membayangkan kalau saya berfungsi sebagai seorang Master of Ceremony dalam sebuah acara dan meminta pembicara untuk naik ke panggung dan mempresentasikan karyanya atau sedikit lebih baik, saya membayangkan sebagai seorang moderator diskusi yang memperkenalkan beliau dan CV-nya sebelum beliau diberi kesempatan untuk bicara. Dalam posisi seperti itulah tampaknya pengantar ini ditempatkan.

Yang dikumpulkan di sini adalah pidato Prof Budi Widianarko selama menjadi Rektor yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Unika SOEGIJAPRANATA dengan agenda tunggal wisuda sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, dan beberapa tulisan beliau lainnya.

Yang menarik adalah, dari setiap pidatonya, kita selalu menemukan sesuatu untuk kita pelajari. Alih-alih hanya sekedar sambutan ucapan selamat datang, terima kasih dan selamat wisuda, Prof. Budi atau Prof BW (demikian beliau sering disebut) memberikan entah wacana baru yang sedang digelutinya, keprihatinan akan kondisi masyarakat, ajakan untuk berbuat lebih banyak dan tentu saja hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi masa depan, baik untuk wisudawan tetapi sekaligus juga untuk Unika SOEGIJAPRANATA dan beberapa pemikirannya tentang kondisi yang terjadi pada saat tulisan dibuat.

Uniknya lagi, semua pidato yang disampaikan saat wisuda selalu bisa ditransformasikan beliau menjadi sebuah naskah bernaung yang dipublikasikan untuk masyarakat yang lebih luas. Di sinilah apresiasi lebih tinggi layak disampaikan sehingga tidak hanya peserta wisuda saja yang menikmati pikiran-pikiran tajam beliau, tetapi juga masyarakat yang berkesempatan membaca transformasi pidato beliau ke dalam artikel media massa.

Buku ini menjadi bentuk transformasi berikutnya, mereka yang tidak melanggan atau kebetulan terlewatkan satu-dua artikel yang termuat bisa membacanya dalam buku ini. Terlebih lagi, dengan penyusunan sesuai dengan pengelompokan tertentu yang dilakukan dalam kesatuan buku ini, semakin membuat pembaca dapat menemukan benang merah, keruntutan dan ketersatuan pemikiran-pemikiran beliau. Transformasi karya yang selalu akan menginspirasi.

Meskipun ada empat bagian dalam buku ini, namun pembaca akan bisa menemukan bahwa tulisan dalam bagian-bagian tersebut bukanlah berdiri sendiri tetapi merupakan pikiran-pikiran yang saling berkelindan layaknya relasi rektor dan lembaga yang dipimpinnya sekaligus tanggungjawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alih-alih mengantarkan bagian per bagian dari tulisan tersebut, perkenankanlah saya mengantarkan tulisan-tulisan luar biasa dari Prof BW dengan pendekatan dan pengelompokan yang berbeda. Hal ini secara sengaja saya lakukan justru untuk menunjukkan betapa rangkaian tulisan dalam buku ini, bisa dibaca per judul, per bagian, atau sesuai dengan kebutuhan pembaca itu sendiri. Tidak ada keharusan membacanya berurutan dari halaman pertama sampai terakhir, karena kedalaman judul per judul dan kaitannya justru kadang ditemukan ketika kita lincah menelusuri dengan bebas lembar mana yang hendak kita baca.

Tantangan bagi wisudawan

Ajakan untuk mempersiapkan diri bagi masa depan disampaikan Prof BW pada tahun 2010 ketika mengawali tugasnya untuk memimpin lembaga perguruan tinggi. Dengan menyitir pendapat Howard Gardner, kita semua diingatkan tentang tugas dasar dari Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki *discipline, creative, and synthesizing mind*, yang harus dibarengi juga dengan tantangan yang lebih membentuk kepribadian yaitu *respectful* dan *ethical mind*.

Tantangan untuk menyiapkan diri juga juga dikaitkan dengan upaya untuk menambahkan ketrampilan komunikasi, rasa percaya diri dan semangat berkompetisi sehingga mampu meningkatkan nilai keterkerjaan (*employability*) bagi lulusan Unika SOEGIJAPRANATA.

Dorongan lain yang ditujukan kepada wisudawan adalah ajakan untuk tidak takut keluar dari cangkang telur kenyamanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi warga global (*global citizenship*), siap maju dalam persaingan sarjana di tingkat pasar ASEAN, dengan penguasaan bahasa internasional yang lebih baik tanpa

harus kehilangan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas sebagaimana sudah dilatihkan di Unika SOEGIJAPRANATA melalui ATGW (*Awaken The Grateful Winner* d/h *Awakening The Giant Within*) dan SALT (*Soegijapranata Advance Leadership Training*) dan pelatihan-pelatihan softskill lainnya semasa kuliah.

Tugas Perguruan Tinggi

Tulisan beliau juga banyak memberikan refleksi terhadap dinamika perguruan tinggi setidak-tidaknya selama beliau memimpin, baik yang dialami secara internal maupun realitas di eksternal yang ikut mempengaruhinya.

Pada tahun 2010, Universitas sebagai Pembawa kabar baik menjadi tema sentral pidato karena refleksi kondisi eksternal bangsa pada saat itu. Hal ini ditegaskan lagi dengan peran Unika SOEGIJAPRANATA untuk secara aktif menjalankan metode pembelajaran Service Learning dengan 5 R-nya yaitu *Relationship, Rigor, Reciprocity, Reflection* dan *Real Life*, sehingga pembelajaran yang diberikan lengkap antara *Head, Hand, dan Heart*, dalam tulisan beliau di tahun tahun sesudahnya.

Salah satu tonggak yang membuat tugas Unika SOEGIJAPRANATA semakin tegas adalah dirumuskannya semboyan kampus yang berasal dari Mgr. Albertus Soegijapranata sendiri yaitu *Talenta pro patria et humanitate*. Rumusan yang semakin menegaskan bahwa Unika tidak mau menjadi menara gading yang terpisah dari masyarakatnya tetapi harus siap sedia mendampingi masyarakatnya. Tema yang kemudian mencuat lagi dengan pengalaman nyata dari hasil refleksi karya yang memberikan pengalaman bagi semua dosen dan karyawan untuk merasakan denyut nadi masyarakat desa di tahun 2016 dengan *Close Encounter of the Third Kind*.

Salah satu hasil dari perjalannya ke Belanda, Prof Budi belajar dari keteladanan Muhammad Hatta yang direfleksikan bahwa betapa

pentingnya menumbuhkan semangat untuk memberikan talenta yang terbaik bagi Negara ini. Untuk itu, salah satu tugas utama dari perguruan tinggi adalah juga mencetak pelopor-pelopor integritas.

Dalam menyikapi pertumbuhan IT yang begitu pesat beberapa kali Prof BW juga ungkapkan dalam tulisannya. Kebutuhan akan kecepatan akses karena terjadinya Konvergensi Ekonomi dan Teknologi dan sinyalemen bahwa dunia ini datar (bedakan dengan bumi datar) dari Thomas L Friedman ternyata memunculkan kedangkalan pemikiran yang harusnya menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk memperbaikinya.

Demikian juga munculnya Pakar Warga akibat terjadinya demokrasi pengetahuan dengan adanya fenomena *crowd-sourcing*. Unika harus bertransformasi menjadi knowledge hub tanpa harus kehilangan kecerdasannya untuk bisa memilih informasi-informasi yang *Satisficing -Satisfying* dan *sufficient*. Karena tanpa memiliki kecerdasan tersebut maka ledakan informasi yang terjadi tidak akan bisa dikendalikan dan dimanfaatkan.

Keprihatinan Perguruan Tinggi akan kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Beberapa tulisan beliau juga menekankan pentingnya tetap terlibat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Setelah beberapa kali memaparkan kelebihan pertumbuhan ekonomi, ajakan untuk tetap secara positif mendukung pemerintah juga disertai dengan catatan kritis terhadap berbagai hal yang lalai dilakukan pemerintah. Rendahnya tingkat literasi Indonesia disampaikan pada tahun 2016, ketidakpastian yang terjadi akan situasi politik juga mencuat di awal tahun 2015, serta fenomena *brain drain* yang pasti terjadi ketika pemerintah tidak mampu memberikan ruang bagi prestasi-prestasi anak negeri.

Fenomena demokrasi yang kebablasan juga ditanggapi dengan pentingnya menemukan kepemimpinan yang otentik. Menyitir tulisan Michael Hyatt, beliau mengatakan bahwa memiliki wawasan, menunjukkan prakarsa, menebar pengaruh, memiliki dampak dan mempraktekkan integritas adalah kualitas karakter pemimpin yang otentik. Dengan karakter seperti itulah maka harapan Negara Indonesia akan berkembang jauh lebih baik akan segera terwujud. Tentu saja karakter tersebut harus bisa antara lain diciptakan oleh dunia pendidikan yang telah menjadi *Paideia* bagi karakter tersebut.

Mosaik-mosaik pemikiran seperti itulah yang akan ditemui ketika kita kembali lagi membaca ulang lembar demi lembar tulisan Prof BW, sambil membayangkan kebahagiaan yang dirasakan oleh wisudawan/wisudawati dan para keluarganya serta kebanggaan para anggota senat yang menyaksikannya. Suasana wisuda tidak lagi sekedar menjadi ritual perguruan tinggi yang membosankan tetapi juga kuliah pamungkas dari rektornya untuk para mahasiswanya di akhir masa kuliahnya. Harapannya perasaan semacam inilah yang juga muncul ketika membaca buku ini. Jauh dari kata membosankan namun juga tidak sekedar menghibur melainkan memunculkan keresahan untuk terlibat menemukan jawaban atas problema yang terjadi.

Talenta pro patria et humanitate, dari Unika SOEGIJAPRANATA untuk tanah air dan kemanusiaan, demikianlah tampaknya rangkuman dari semua pidato beliau. Semoga ini menjadi pengantar yang lebih memberikan ajakan mendalami detail-detail pemikiran beliau.

Hongkong, 4 Juli 2017

Benediktus Danang Setianto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Transformasi Pidato yang Menginspirasi	iii
--	-----

Wacana 1 – Hakikat

Universitas, Rumah Belajar	2
Universitas Pembawa Kabar Baik	7
Keunggulan Jati Diri Universitas	11
Inang Baru Perguruan Tinggi	16
Universities Crippled by Database Obsession	21
Wapres dan MOOCs	25
Demokrasi Pengetahuan Dan Universitas	30

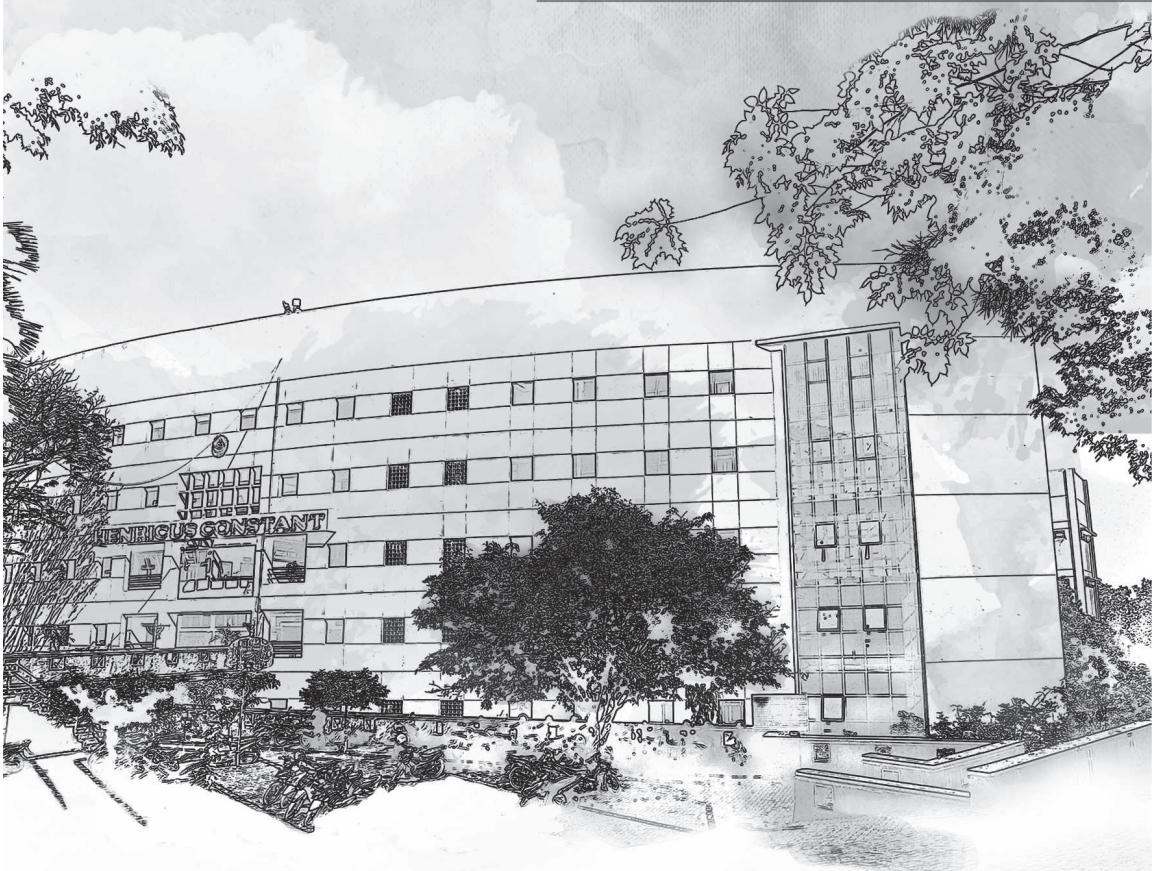
Wacana 2 – Mandat

Universitas, Gerbong Kemajuan	36
Kedangkalan dalam Kemelimpahan	40
Perjumpaan Jenis Ketiga	43
Mutu Indonesia Dan Kepercayaan Diri	46
Mobilitas Yang Bermutu	50

Paradoks Pendidikan Tinggi	54
Alumni dan Almamater	57
Berbagi Risiko Tata Kelola Riset	61
Wacana 3 – Kecendekiawanan	
Globalisasi dan Inlanderisme	68
Negeri Tanpa Prioritas	71
Raksasa yang Mengubur Diri	75
Pemimpin Pembelajar	79
Kepemimpinan yang Autentik	84
Srawung Untuk Saling Percaya	88
“Gayeng” dan Modal Sosial	91
Pikiran yang Tertata	95
Ekologi Nurani	98
Refleksi	
Mengarungi Lansekap Pendidikan Tinggi Indonesia dengan <i>Ex Corde Ecclesiae</i>	104
Kegembiraan Mengajar Mengalir dari Hati	122
Perguruan Tinggi Indonesia Kewargaan Global dan Kepedulian Lokal	130
Universitas dalam Perekonomian Berbasis Ilmu Pengetahuan	145

Wacana 1

Hakikat



Universitas, Rumah Belajar*

Sebagai salah satu Pembicara Utama dalam Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia (FRI) di kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta 30/1/2014, Dr. Irman Gusman – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat itu – sempat memicu “drama” kecil. Irman melontarkan gagasan untuk mengeluarkan urusan pendidikan tinggi (PT) dari Kementerian Pendidikan untuk digabungkan dengan urusan riset dalam suatu kementerian tersendiri. Gagasan Irman itu mengacu pada model yang sama di negeri jiran, Malaysia, sekaligus untuk mendorong jumlah dan mutu riset di tanah air karena pendanaan riset bisa lebih melimpah dan berkelanjutan.

Alih-alih mendapatkan tanggapan dari para Rektor, gagasan Sang Ketua DPD justru hanya disambut dingin. Sampai-sampai Irman meminta peserta untuk tepuk tangan. Dalam perbincangan dengan beberapa sejawat Rektor saat rehat kopi di acara itu - kami sampai pada kesimpulan bahwa kejadian “telat tepuk tangan” tadi menunjukkan keraguan hadirin – yang mayoritas Rektor – terhadap gagasan Ketua DPD itu. Kami meragukan bahwa menempatkan urusan PT dalam keranjang yang sama dengan riset adalah pilihan yang tepat. Gagasan pemisahan urusan PT

* Dimuat di Harian KOMPAS 1 Maret 2014

dari jenjang pendidikan yang lebih rendah jangan jangan hanya dilandasi cara pandang pragmatis dan jalan pintas.

Menariknya, ternyata gagasan pembentukan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi ternyata justru menjadi salah satu butir rekomendasi FRI (Kompas, 6/2/2014). Dengan bergabung ke kementerian yang baru itu diharapkan riset PT akan lebih terarah dan terintegrasi dengan lembaga lembaga riset lain. Lontaran Ketua DPD itu memang terkesan “populis” ketika dilontarkan di depan khalayak ratusan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta tidak heran jika memikat para petinggi FRI untuk mengadopsinya. Jika hakekat pendidikan tinggi menjadi titik tolak perenungan maka rekomendasi FRI itu masih perlu pendalaman.

Pendidikan tinggi adalah lembaga yang sarat dengan muatan pendidikan dan pengajaran. Lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas, adalah rumah belajar. Ungkapan *“universitas magistrorum et scholarium”* (universitas sebagai komunitas guru dan murid) secara gamblang menunjukkan itu. Bahkan dalam bentuk awalnya, universitas di abad pertengahan sebenarnya dilahirkan dan lantas dikelola oleh kumpulan guru atau dosen.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), kecuali mendukung perekonomian - tiga dari empat tujuan utama universitas menyangkut proses belajar (*learning*) yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Diana Laurillard, 2002).

Mandat universitas memang bukan hanya melaksanakan riset. Bahkan ketika kita menengok peran yang diharapkan dari sebuah universitas riset (*research University*) maka produk pertamanya adalah pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Lendel (2010) dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge economy*) universitas dapat dipandang sebagai layaknya sebuah industri multi-produk dengan tujuh produk, yaitu (1) pendidikan, (2) produk budaya, (3) tenaga kerja terlatih, (4) penelitian-kontrak, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru, dan (7) produk dan industri baru.

Rumah Belajar

Menurut George Dennis O'Brien, penulis buku "*All the Essential Halftruths about Higher Education*" (1998), menyebut "universitas sebagai rumah belajar" memang bak menyebut "bujangan sebagai lelaki yang belum menikah". Tetapi dia mengingatkan bahwa hakekat universitas sebagai rumah belajar jangan sampai dilupakan "hanya" demi menjawab tantangan perubahan jaman. Memotret keadaan di Amerika Serikat, George Dennis O'Brien menyatakan bahwa masalah utama dalam pendidikan tinggi bukanlah pertentangan antara pengajaran (*teachning*) versus riset, melainkan terbaikannya pembelajaran dan pendidikan (*learning and education*) di universitas. Titik berat pada penelitian, terutama di universitas-universitas riset, "memaksa" para guru besar dan dosen untuk mencurahkan tenaga untuk berebut dana penelitian – dan melimpahkan kewajiban mengajarnya pada mahasiswa pascasarjana. Praktek pelimpahan tugas ini seringkali mendapat pemberian sebagai proses magang. Akibatnya yang terjadi hanyalah alih pengetahuan bukan pendidikan, karena para pengalih pengetahuan muda itu bukan guru atau dosen.

Dalam pendidikan, jangan pernah dilupakan bahwa setiap manusia pada dasarnya unik. Setiap universitas ditantang untuk dapat mentranformasikan keragaman kualitas asupan mahasiswa menjadi sebuah keunggulan. Untuk dapat mewujudkannya, curahan waktu dan tenaga saja tidaklah mencukupi, para dosen juga harus terus-menerus mengasah empati. Dalam interaksi dengan para mahasiswanya seorang dosen berperan sebagai *mentor* yang dituntut memiliki sejumlah kualitas, antara lain sebagai teman sekaligus pembimbing, lebih matang, otoritas akademik, pengasuh, dan sepenuh hati. Selain itu, interaksi yang baik memerlukan lingkungan pembelajaran yang baik, begitu pula interaksi yang semakin bermutu memerlukan lingkungan belajar yang lebih bermutu pula. Mungkin kita dapat belajar dari pengalaman Uri Treisman, Profesor Matematik di Universitas California – Berkley, berikut ini.

Profesor Uri Treisman terusik mendapati kenyataan para mahasiswa kulit hitam peserta kuliah Dasar-dasar Kalkulus-nya memperoleh nilai yang sangat jelek. Semula Uri menduga hasil buruk itu berhubungan dengan faktor-faktor standar seperti pengalaman sekolah menengah yang buruk, kurangnya dorongan orang tua, kesulitan keuangan, dan sebagainya. Ternyata, Uri sama sekali tidak menemukan korelasi yang ia duga. Mahasiswa kulit hitam dengan pengalaman sekolah menengah yang baik ternyata juga memperoleh nilai jelek seperti rekan-rekannya yang memiliki pengalaman sekolah menengah yang biasa-biasa saja. Begitu pula, faktor ekonomi dan orang tua sama sekali tidak berkorelasi. Uri tidak langsung menyerah. Ia kemudian melakukan riset kecil dengan memilih kelompok mahasiswa China - yang semuanya memperoleh nilai bagus - sebagai pembanding. Uri menemukan rahasianya. Mahasiswa China suka bekerja dalam kelompok, sebaliknya mahasiswa kulit hitam cenderung bekerja mandiri. Berdasarkan temuannya, Uri lantas mengubah kondisi dan tata

letak kelas serta menerapkan sistem pembelajaran kelompok. Tak berapa lama kemudian ternyata prestasi para mahasiswa kulit hitam meningkat luar biasa.

Kisah Profesor Treisman tadi membuktikan bahwa "hanya" dengan memperbaiki kondisi pembelajaran transformasi yang bermakna dapat diwujudkan. Akhirnya jika direnungkan lebih mendalam di Indonesia telah ada rumusan bernes tentang mandat universitas, yaitu tridarma pendidikan tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu bukan tanpa alasan ketika para pemikir pendidikan tinggi terbaik negeri ini saat itu menempatan pendidikan dan pengajaran sebagai darma pertama.

Universitas Pembawa Kabar Baik*

Tanpa terasa kita telah meninggalkan dasawarsa pertama milineum ketiga. Gerak maju sang waktu ternyata masih menyisakan ketidakpastian. *Uncertainty still happens!*. Mari kita tengok kembali apa yang berlangsung di negeri tercinta ini selama 1-2 tahun terakhir. Ingatan kolektif kita nyaris sepenuhnya diisi oleh rentetan bencana, baik bencana moral maupun bencana alam. Indonesia dalam ingatan kolektif warganya adalah negeri dengan wajah penuh goresan kesedihan dan keculasan. Harus diakui, meskipun dengan sedih, berita dan liputan media telah berhasil membentuk wacana publik yang sarat dengan kepedihan. Manifestasi pameo “*a bad news is a good news*” tak terelakkan lagi, dan kita harus rela menerimanya karena wajah media adalah bayangan cermin masyarakatnya.

Untuk menyebut beberapa, negeri ini telah dihantam oleh serentetan bencana “moral”, seperti kasus “markus”, mafia peradilan, Bank Century, mafia pajak, hingga yang paling mutakhir pelancongan Gayus dengan paspor ajaibnya, serta pelantikan seorang tersangka menjadi kepala daerah. Perpaduan antara bencana-bencana “moral” tadi dengan sejumlah bencana alam yang dahsyat – seperti longsor dan banjir Wasior, tsunami

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 16 Februari 2011

Mantawai, letusan Gunung Merapi dan Gunung Bromo – benar-benar tidak memberi celah bagi menyeruaknya kabar baik.

Dihantam gelombang kabar buruk ternyata tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk terus mengulirkan kehidupan. *Life goes on!* Apakah ini wujud resiliensi manusia Indonesia? atau masyarakat justru sudah jenuh dan akhirnya masabodoh menyikapi rentetan kabar buruk itu. Terlepas dari itu semua, kita masih patut bersyukur bahwa bela-rasa, solidaritas, kesetiakawanan masih selalu lahir spontan ketika menyikapi bencana alam. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghimpun kekuatan bela-rasa, solidaritas dan kesetiakawanan – bukan hanya saat didera bencana alam – menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk mengubah wajah negeri ini. Siapa yang harus mengambil prakarsa? Dalam pandangan saya, universitas (baca: *civitas academica*) wajib menjadi salah satu penggeraknya. Universitas harus tampil di depan sebagai pembawa kabar baik.

Berakar di Masyarakat

Dalam sejarahnya, ada suatu masa ketika universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan, seperti Bologna (1158), Paris (1170), Cambridge (1209) dan Praha (1348) didirikan oleh warga kota. Sebagai *Universitas scientiarum*, perguruan-perguruan tinggi itu dijalankan oleh masyarakat warga (*civil society*) – sehingga tanggung jawab universitas adalah tanggungjawab kewargaan (Bernhard Kieser SJ, 2009).

Dalam konteks kekinian, ketika ia harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), universitas memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan

individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) mendukung perekonomian, (4) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Lord Dearing's National Committee of Inquiry into Higher Education UK, seperti dikutip Diana Laurillard, 2002). Masih menurut Diana Laurillard, dengan terpenuhinya keempat tujuan itu diharapkan universitas dapat berperan untuk memampukan masyarakat untuk terus secara mandiri memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya - *to enable society to maintain an independent understanding of itself and its worlds*. Dengan kata lain universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Kabar Baik

Nilai penting universitas dalam sebuah masyarakat sama sekali bukan karena muridnya disebut sebagai maha-siswa atau sebagian gurunya disebut sebagai maha-guru, melainkan karena kemampuannya menyampaikan kabar baik kepada masyarakat. Universitas harus mampu senantiasa membaca tanda-tanda jaman dan mengabarkannya kepada masyarakat. Inilah kabar baik yang diharapkan dari kehadiran universitas di tengah masyarakat yang melahirkannya.

Terimakasih pada media cetak, seperti Suara Merdeka, yang menyediakan halaman untuk warga universitas berwacana tentang apa yang tengah terjadi di "dunia nyata" masyarakat. Terlebih dari itu, tulisan opini para mahasiswa dan dosen yang mengkritik hal-hal yang patut dikoreksi di negeri ini adalah juga kabar baik. Tugas komunitas intelektual – terutama intelektual kampus – adalah memotret keadaan masyarakatnya dan mengusulkan bagaimana memperindah potret itu.

Tersedianya halaman khusus “Edukasia” juga menjadi lahan persemaian kabar baik tentang perkembangan dan kemajuan universitas. Jangan jangan, hanya halaman inilah yang menampilkan berita yang membesarluhati, seperti keberhasilan penelitian, dosen dan mahasiswa berprestasi, peran serta universitas kita di aras global – untuk menyebut beberapa. Memang, meskipun belum berjaya secara mondial universitas-universitas kita masih senantiasa mampu menyampaikan kabar baik bagi masyarakat.

Dalam menghadapi arus kuat globalisasi dan gairah kebendaan yang luar biasa dahsyat saat ini, universitas mau tidak mau harus berada di garda depan. Universitaslah lahan persemaian para pemimpin masyarakat yang nantinya diharapkan mampu mengarungi arus deras globalisasi dan meredam gairah kebendaan itu. Universitas – sadar tidak sadar – punya tanggungjawab untuk menghasilkan para pemimpin yang sanggup membaca tanda tanda jaman secara arif dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan. Tetapi – suka tidak suka – sangat boleh jadi seluruh pelaku atau pemicu krisis kemasyarakatan adalah produk universitas juga. Meminjam ungkapan Albert Einstein, memang biang keladi semua krisis adalah pikiran manusia sendiri. *“The world we have created is the product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking”*, tulis Albert Einstein. Untuk mengubah wajah dunia yang buram ini hanya dimulai dari perubahan pemikiran. Di dalam pemikiran tentu saja melekat nilai dan etika. Dan dalam hal ini universitas adalah salah satu “dapur” pemikiran terpenting dalam masyarakat. Dengan kata lain, mandat universitas adalah membentuk dan mengasah pemikiran dosen, mahasiswa dan alumninya (*civitas academica*) agar senantiasa memihak, berpikir dan bertindak demi kemaslahatan dan masyarakat sekitarnya. Jika mandat ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh universitas universitas kita, maka itulah kabar baik yang dirindukan oleh masyarakat.

Keunggulan Jati Diri Universitas*

Meskipun resmi dibelakukan sejak hari pertama tahun macan ini, genderang *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) masih bertalu-talu di ruang publik negeri ini.

Rasa gamang dan khawatir menghadapi ACFTA serta merta melahirkan seekor kambing hitam, yaitu "daya saing". Seolah dunia bukanlah sebuah taman sari, melainkan lintasan balap – dimana masing-masing "pembalap" harus saling kejar untuk mencapai garis finis. Dalam lintasan balap yang dicari adalah Sang Juara, bukan kemenangan bersama.

Saat ini demam "daya saing" rupanya juga tengah melanda universitas-universitas di negeri ini. Untuk membahas salah satu tantangan globalisasi ini, saya tertarik pada pandangan Horward Gardner, Guru Besar Kognisi dan Pendidikan di Universitas Harvard. Menurutnya institusi-institusi pendidikan di seluruh dunia sebenarnya belum siap menghadapi arus kuat perubahan yang tengah berlangsung saat ini, terutama globalisasi.

Memang masyarakat bisa saja terkecoh oleh slogan-slogan "keren" (*buzzwords*) globalisasi, seperti "*world class university*", "*interdisciplinary curricula*", "*the knowledge economy*" – yang

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 13 Maret 2010

nyaris digunakan serentak oleh institusi-institusi pendidikan di seantero dunia. Slogan-slogan itu mencerminkan betapa lembaga-lembaga pendidikan hanya menyentuh kulit proses pendidikan, karena melupakan unsur nilai dan tujuan hidup manusia. Dalam ungkapan Gardner (2006) pendidikan formal saat ini masih terjebak dalam proses menyiapkan peserta didiknya untuk dunia masa lalu (*the world of the past*), bukan untuk kemungkinan-kemungkinan dunia masa depan (*possible worlds of the future*).

Keunggulan sebuah universitas idealnya tidak diukur dari kehebatan dirinya sebagai lembaga, melainkan dari kemampuannya membekali manusia-manusia muda dengan nilai-nilai dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup. Dan jangan pernah dilupakan bahwa setiap manusia pada dasarnya unik, sehingga tidak ada standar atau ukuran yang bisa menilai semua orang secara sempurna.

Tantangan Universitas

Saat ini dunia pendidikan kita diwarnai oleh semakin banyaknya universitas swasta dan semakin tidak jelasnya mekanisme penerimaan mahasiswa di universitas- universitas negeri yang berujung pada semakin ketatnya perebutan “kue” mahasiswa baru. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit atau mustahil untuk sebuah universitas memperoleh asupan mahasiswa dengan kualitas akademik yang merata. Yang umum terjadi adalah adanya dua atau tiga kelompok mahasiswa baru dengan tingkat kemampuan akademik yang berbeda.

Setiap universitas ditantang untuk dapat mentransformasikan keragaman kualitas asupan mahasiswa menjadi sebuah keunggulan. Untuk bisa mewujudkannya, yang pertama harus dilakukan adalah perubahan cara pandang terhadap keunggulan

itu sendiri. Keunggulan dalam cara pandang konvensional adalah keunggulan milik pengibar bendera (*flag carriers*) – segelintir mahasiswa cemerlang. Dalam cara pandang baru, keunggulan bukan hanya menjadi *privilege* mereka yang cemerlang (*excellence for the excellent*) melainkan untuk semua (*excellence for all*).

Cara pandang konvensional itulah yang menolak keras asupan mahasiswa baru yang masuk kategori tidak cemerlang, sehingga melahirkan *adagium* sinis dan sarkastik GIGO (*garbage in, garbage out*). Cara pandang yang baru justru menempatkan kemampuan mengubah asupan yang biasa-biasa menjadi lulusan yang istimewa sebagai keunggulan. *Adagium* GIGO selayaknya diubah menjadi lebih organik dan memberdayakan yaitu dari benih menjadi tanaman yang dapat terus tumbuh atau SISO (*seed in, sapling out*).

Untuk dapat mewujudkan SISO diperlukan proses pembelajaran yang memberdayakan (*empowering learning process*). Dalam proses pemberdayaan ini, curahan waktu dan tenaga saja tidaklah mencukupi, para dosen juga harus terus-menerus mengasah empati. Dalam interaksi dengan para mahasiswanya seorang dosen berperan sebagai *mentor* yang dituntut memiliki sejumlah kualitas, antara lain sebagai teman sekaligus pembimbing, lebih matang, otoritas akademik, pengasuh, dan sepenuh hati (*friend/counselor, older, authority in field, nurturer, respectful, devoted*) (Widianarko, 2007).

Peran Dosen

Saya optimis bahwa pola interaksi akademik untuk mewujudkan “*Excellence for All*” tersebut dapat diciptakan. Salah satu alasan utamanya terpulang pada sisi kemanusiaan para dosen. Pada dasarnya manusia “mewarisi” perilaku altrusitik – rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Hal ini bukan berarti

bahwa manusia pada dasarnya baik. Manusia pada dasarnya rumit (*complicated*). Setiap saat manusia selalu "terseret" untuk memenuhi kebutuhan personal sekaligus kepuasan moralnya. Di samping sadar akan kebutuhannya sendiri pada saat yang sama manusia juga sadar akan keutuhan orang lain dan akan "terseret" untuk bertindak altruistik. Manusia adalah makhluk dua dimensi yang terus terombang-ambing oleh egoisme dan altruisme.

Memberdayakan mahasiswa bukannya tanpa "imbalan" sama sekali bagi para dosen. Secara alami, seorang dosen akan mengalami apa yang disebut oleh Dooley *et al.* (2004) sebagai *personal enjoyment* atau *the feel good effect* ketika menyaksikan mahasiswa yang dibimbingnya berhasil. Sejumlah fakta ilmiah termutakhir yang dihimpun oleh Stephen Post dan Jill Neimark (2007) dari *Institute for Research on Unlimited Love* (IRUL) menunjukkan bahwa perbuatan baik, terutama pemberian atau pengorbanan untuk orang lain, ternyata berasosiasi kuat dengan rasa damai, kesehatan dan bahkan umur panjang sang pelaku.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang mengarah pada "*Excellence for All*" ini tentu bukan hanya diperlukan perubahan cara pandang – baik di pihak pengelola universitas, fakultas maupun individu dosen. Interaksi yang baik memerlukan lingkungan pembelajaran yang baik, begitu pula interaksi yang semakin bermutu memerlukan lingkungan belajar yang lebih bermutu pula. Pengalaman Uri Treisman, Profesor Matematik di Universitas California – Berkley, seperti diceritakan oleh O'Brien (1998) berikut ini mungkin menarik untuk dipelajari.

Profesor Uri Treisman sangat terusik mengetahui bahwa para mahasiswa berkulit hitam yang ikut kuliah Dasar-dasar Kalkulusnya mendapatkan nilai yang sangat buruk. Pada mulanya Uri berasumsi bahwa nilai buruk itu terkait dengan faktor-faktor baku seperti pengalaman sekolah menengah yang buruk, ketiadaan

dorongan orang tua, masalah keuangan, dan sebagainya. Ternyata dia sama sekali tidak menemukan korelasi antara nilai yang buruk dengan faktor-faktor baku tersebut. Salah satunya, mahasiswa kulit hitam dengan pengalaman sekolah menengah yang baik ternyata juga buruk nilainya seperti sejawatnya dengan pengalaman sekolah yang biasa-biasa saja (*mediocre*). Ketiadaan korelasi juga terbukti untuk faktor ekonomi dan orang tua. Namun Uri tidak langsung menyerah, ia justru kemudian melakukan penelitian dengan kelompok mahasiswa China - yang semuanya bernilai bagus - sebagai pembanding. Uri menemukan rahasianya. Mahasiswa China suka bekerja dalam kelompok, sebaliknya mahasiswa kulit hitam cenderung bekerja mandiri.

Akhirnya Uri menemukan rahasia di balik nilai buruk mahasiswa kulit hitam tadi. Para mahasiswa China lebih cenderung bekerja kelompok (*work gang*), sebaliknya para mahasiswa kulit hitam lebih suka bekerja secara individual. Berdasarkan temuannya, Uri lantas mengubah kondisi dan tata letak kelas serta menerapkan sistem pembelajaran kelompok. Tak berapa lama kemudian ternyata prestasi para mahasiswa kulit hitam meningkat luar biasa.

Berdasarkan temuan itu, Uri kemudian mengubah kondisi dan tata letak kelas serta memperkenalkan sistem pembelajaran kelompok (*cohort learning*) dalam kelasnya. Tak berapa lama kemudian Uri mendapatkan peningkatan prestasi yang mengagumkan dari para mahasiswa kulit hitam.

Profesor Treisman telah membuktikan bahwa "hanya" dengan memperbaiki kondisi pembelajaran (*condition of learning*) keunggulan untuk semua dapat diwujudkan. Pertanyaannya sekarang adalah "Apakah di tengah pragmatisme dunia pendidikan di Indonesia saat ini, masih adakah empati dan kemauan para dosen untuk melakukannya?".

Inang Baru Perguruan Tinggi*

Di tengah kerinduan sebagian kalangan perguruan tinggi (PT) - melalui Forum Rektor Indonesia (FRI)- untuk memiliki inang baru pengganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), penulis setuju dengan rumusan penutup Indira Permanasari (Kompas, 9/6/2014) yang melaporkan hasil Diskusi FRI – “KOMPAS”. Indira menulis: “*„, persoalannya bukan lagi sebatas perguruan tinggi di bawah kementerian yang mana. Namun, lebih soal perumusan tata kelola yang memampukan perguruan tinggi untuk lebih lentur dan lincah menjalankan perannya dan menghadapi ragam tantangan tersebut. Tanpa kelincahan dan fleksibilitas, perguruan tinggi akan terus menghadapi masalah serupa apapun kementeriannya”.*

Tuntutan inang baru hanya karena PT menjalankan fungsi riset adalah argumen yang tidak kokoh. Apalagi ketika diambil perbandingan dengan negara-negara lain. Bahkan rumusan (Kompas, 9/6/2014): “*Sebagai perbandingan, negara-negara yang maju industrinya, memasangkan pendidikan tinggi dengan riset teknologi dan inovasi dalam satu kementerian. Sebut saja, Perancis dengan Ministry of Higher Education and Science, jerman dengan Federal Ministry of Education and Research, serta Jepang dengan Ministry of Education, Culture, sport, Science, and Technology*” – sungguh membingungkan

* Dimuat di Harian KOMPAS 20 Juni 2014

karena tidak taat azas. Dari contoh yang ditampilkan hanya Perancis yang memiliki kementerian yang secara eksplisit menggunakan frasa “pendidikan tinggi”. Sisanya justru tetap menggunakan kata “pendidikan” – yang dilengkapi dengan unsur-unsur lain sesuai konteks masing-masing.

Dari penelusuran cepat di web penulis menemukan beberapa negara yang menggunakan frasa “pendidikan tinggi” untuk nama kementerian yang jadi inang PT, yaitu Malaysia, Srilanka, Afghanistan, UAE, Mesir, Saudi Arabia, Kenya – selain Perancis. Sedangkan sejumlah negara yang maju dalam penelitian justru nama kementeriannya diawali dengan kata “pendidikan”, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Denmark, Jepang, Korea Selatan. Bahkan Finlandia, salah satu “raksasa” riset dan inovasi Eropa, menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*Ministry of Education and Culture*) seperti Indonesia. Jadi jelaslah bahwa nama kementerian bukanlah isu utama.

Kita semua tentu sepakat bahwa masalah utama PT kita adalah pengaturan yang berlebihan sehingga mengunci kelincahan dan kelenturan. PT kita disibukkan oleh perkara prosedural yang menyita energi, seperti pengisian Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai laporan semesteran, laporan kinerja dosen, pengurusan jabatan akademik dosen, dan yang terakhir Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD), untuk menyebut beberapa. Sungguh sebuah ironi. Di Indonesia - yang telah bertransformasi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia - ternyata rejim pendidikan tingginya justru sentralistik dan otoriter. Meminjam istilah Satryo Soemantri Brodjonegoro (Kompas, 8/3/2013), PT kita tengah mengalami gejala “jawatanisasi”.

Kisah PTS

“Jawatanisasi” bukan hanya melanda PTN. Mekipun bertolak belakang dengan watak keswastaannya, PTS juga tidak berdaya diseret oleh arus besar “jawatanisasi” itu – dan bahkan selalu dalam posisi yang lebih lemah. Bagi PTN otonomi adalah harapan PTN, sedangkan bagi PTS itu hanyalah sekedar ilusi. Jangankan Guru Besar, untuk “sekadar” mengangkat seorang Asisten Ahli - jabatan fungsional akademik terendah – sekalipun PTS tidak memiliki wewenang sama sekali. Boleh dibilang, setiap instruksi, kebijakan dan keputusan dari seluruh jenjang birokrasi pendidikan tinggi telah berhasil membentuk sikap siaga (*alert*) di kalangan PTS. Tidak sedikit waktu dan energi yang terbuang untuk menanggapi tuntutan birokrasi yang belakangan ini semakin bertubi-tubi datangnya.

Dari perdebatan otonomi perguruan tinggi ini, PTS memang cenderung terpinggirkan. Padahal Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) menunjukkan sekitar 70% mahasiswa di negeri ini menuntut ilmu di PTS. Ada kesan dengan kekuatan anggaran yang meraksasa, pemerintah mengabaikan PTS. Padahal PTS telah hadir sebagai penyedia akses pendidikan tinggi bagi warga negara jauh-jauh hari ketika anggaran pendidikan masih sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit PTS yang lahir lebih dahulu dari PTN dan terus menjadi lahan persemaian ilmu pengetahuan hingga kini.

Menurut Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) meningkatkan akses dengan cara memperbesar daya tampung PTN (bukan menguatkan PTS) adalah langkah yang sangat keliru. Lebih jauh Elfindri mengungkapkan bahwa pemerintah mengandalkan asumsi bahwa PTS yang lebih dari 3000 itu biarlah beroperasi melalui mekanisme pasar. Pemerintah hanya menjalankan peran bak “satpam” yang aktif dalam “operasi” penertiban belaka.

Pengelompokan

Meskipun Satryo Soemantri Brodjonegoro (KOMPAS, 8/3/1013) yakin bahwa otonomi lembaga pendidikan tinggi dan otonomi profesi insan kependidikan akan menghapus dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta - tentu saja terlalu naif jika otonomi yang sepenuh-penuhnya diberikan kepada semua PTS (lebih dari 3500!) tanpa terkecuali. Adalah terlalu naif pula jika otonomi penuh diberikan kepada semua PTN – tanpa memperhitungkan status perkembangannya. Pemberian otonomi semestinya dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan kondisi obyektif kinerja dan mutu PT. Ini memang tantangan berat, terutama ketika faktor politis masih sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan tinggi di negeri ini.

Keragaman ukuran, kinerja dan mutu dari ribuan PTS dan hampir 100 PTN tentu saja harus disikapi oleh pemerintah dengan strategi pengembangan yang jelas dan konsisten. Demi daya saing PT Indonesia, terutama dalam hal riset - pemerintah seharusnya berani mengelompokkan PT berdasarkan kinerja dan mutu yang diukur secara obyektif. Keberanian itu pernah ada. Di tahun 2007, pemerintah berani menetapkan "*50 promising Indonesian Universities*". Tiga tahun sebelumnya Jerman mengambil prakarsa serupa dengan menetapkan Sembilan (9) PT elit untuk masuk sebagai "pemain utama" pendidikan tinggi global – tentu saja setelah melalui proses seleksi yang rumit dan panjang (baca Barbara M. Kehm, IHE -fall 2009). Yang berbeda adalah, ke Sembilan PT tersebut lantas mendapat suntikan dana yang besar selama lima tahun dari Federal Ministry of Education (bukan Higher Education) and Research– demi meningkatkan *visibility* (kenampakan) PT Jerman melalui penelitian terobosan canggih. Sedangkan, pengelompokan 50 PT Indonesia tidak ditindaklanjuti dengan dukungan habis-habisan oleh pemerintah - dalam wujud sumberdaya dan otonomi akademik.

Hanya dengan pengelompokan itu, kinerja riset PT bisa dipacu, karena sungguh mustahil memacu ribuan PT sekaligus – dengan mengganti nama kementeriannya sekalipun. Tanpa keberanian meneruskan prakarsa pengelompokan lengkap dengan peta-jalannya, maka daya saing PT kita tidak akan beranjak dari yang sekarang. PT yang berpotensi untuk berkembang menjadi pemain global hanya akan bergulat kerepotan administratif – sama seperti ribuan PT yang lain.

Universities Crippled by Database Obsession*

For quite some time Indonesian universities and their lecturers have been experiencing a head-scratching burden. They should spend a huge amount of energy and time to meet a new breed of database obsession of the higher education bureaucracy. Almost no single day of university's life is free from database obligation. The most recent enigma is the obligation to all certified lecturers to electronically fill in the "Lecturer Career Development Information System" abbreviated in Indonesian as SIPKD.

The lecturers are supposed to complete the SIPKD, which include uploading softcopies of all printed or written proofs of their academic work during the last three semesters. The deadline for this assignment has already been passed , i.e. 28 February 2014. This highly ambitious endeavor has gone astray, due to the system malfunction. Anyone who tries to visit the site, <http://sipkd.dikti.go.id> (until March 1, 2014), will be greeted by the following disclaimer "*Sorry SIPKD in maintenance, and thank you for your patience in filling SIPKD data, time lost during maintenance will be compensated in the future data entry of SIPKD, greetings*".

* Dimuat di Harian THE JAKARTA POST 11 Maret 2014

This database over-obsession seems not only rely on assumption that “data is power”, but it also signifies the overly regulated nature of the higher education regime in this country. A year ago, Satryo Soemantri Brodjonegoro, the former Director General for Higher Education, has already warned that *‘Our education progresses slowly because there is no room for creativity to develop education that is up to the challenge of our times. Neither teacher-pupil nor lecturer-student gets the opportunity to create because our education system adheres to the bureaucratic service system (“jawatan”). All policies are set by the government in the form of legislations that must be adhered to by both teacher-pupil and lecturer-student, like a government agency’* (Kompas, 9/3/2013). Therefore, he proposed a “dejawatanisasi” of education.

Our universities – which are a league of teachers and students – fail to actualize themselves into communities of learners who joyfully explore science and knowledge. The joy of learning is hindered by the extremely centralistic regulations and procedures. Universities as a learning place have changed into a place of transactional transfer of knowledge from the lecturer to the student and regulated with a multitude of shackling rules.

Ironically, regulations which really should aim towards quality improvement often produce results that not as expected – our universities’ competitiveness are still poor. Borrowing Gus Dur’s famous phrase ‘..*begitu saja kok repot*’, Satryo’s critique instead opens our eyes to the opposite phenomenon ‘..*repot kok begitu saja*’. The complex rules and regulations of higher education turn out just generate much ado with so-so results. Our overly-regulated higher education is evidently unable to move from backwardness compared to other countries. Daily, universities are preoccupied by energy-consuming procedural matters, such as filling Higher Education Database (PDPT) as half-yearly report, lecturer performance reports, and courses operating permit, to mention

some examples. It is open secret that in procedural matters, administrative things is more emphasized than the quality of the substances.

Grouping

Uniquely, ‘jawatanisasi’ of higher education does not only affect state universities. Although it is the exact opposite with their private nature, private universities are also unable to fight against the wave of ‘jawatanisasi’ – and always even at a weaker position. Autonomy, which is still a dream for state universities, is an illusion for private universities. Let alone to promote a Professor, private universities do not even have the authority just to promote an “Asisten Ahli” – the lowest functional academic position. It can also be said that every instruction, policy, and decision by each level of higher education bureaucracy have succeeded in establishing an alert attitude in private universities. No little time and energy is wasted to respond to the requirements of the bureaucracy, which these days are coming insistently.

Private universities are like being on the sidelines or really at the sidelines although they are home of approximately 70% students in this country. There is an impression with the current power of huge budget, the government starts to undermine private universities – who existed as higher education provider for citizens far before, when education budget are very limited. In reality, some private universities were actually born earlier than state universities and keep being hotbeds of knowledge to this day.

It would also be too naïve to grant total autonomy to all state universities (and colleges) – without first accounting for each university’s level of development. Autonomy should be granted in a tiered way, corresponding to objective performance and quality

of the university. It would be a difficult challenge, especially when decisions on higher education in this country are often still entangled with political considerations.

The diversity of size, performance, and quality of more than 3000 private and 100 state universities and colleges requires a clear and consistent development strategy by the government. For the sake of Indonesian universities competitiveness, the government should be bold to group universities according to objectively measured performance and quality. And that boldness has existed before, so it would not be totally new. In 2007, the government "dared" to specify "50 promising Indonesian Universities".

Who knows if it's related or not, three years earlier Germany selected nine elite universities which are expected to be "major players" in global higher education – of course after passing through a lengthy and complex selection process (Barbara M. Kehm, IHE – fall 2009). Further, the German government supported the nine selected universities with massive fund for five years – to increase the visibility of German universities by breakthrough researches.

As a good initiative, the group of 50 Indonesian universities unfortunately was not being followed up consistently and without clear development road map. The boldness to do the grouping ought to be followed by total support by the government in the shape of resources and academic autonomy to the members of the group – without political entanglements and state-private dichotomy. Without the bravery to carry forward the initiative, our universities' competitiveness won't move from their current state. Universities with potential to be global players will only be busy grappling with bureaucracy resulting in so-so results.

Wapres dan MOOCs*

Dalam pembukaan Konvensi Kampus Ke-9 dan Temu Tahunan Ke-15 Forum Rektor Indonesia di Semarang 18/1/2013, Wakil Presiden (Wapres) Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec. mengangkat sebuah gagasan yang layak dikaji oleh kalangan pendidikan tinggi di negeri ini. Demi meningkatkan mutu dan daya saing di ranah internasional, Wapres Boediono menyarankan agar perguruan-perguruan tinggi Indonesia memanfaatkan mata kuliah online yang banyak tersedia saat ini. Menurut Wapres “.... *Materi dan proses pengajaran itu umumnya disusun dan diolah oleh pendidik dan pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan ternama di dunia di luar negeri. Oleh karena itu standarnya dijamin memenuhi standar internasional*”. Wapres juga meminta Menteri Pendidikan Nasional untuk mengembangkan platform mata kuliah *online* versi Indonesia.

Gagasan Wapres terkesan menjanjikan. Alih-alih menunggu tersedianya dosen bermutu nan mumpuni di kampus-kampus seluruh nusantara, mengapa kita tidak langsung saja “mengudap” hasil ramuan para pengajar hebat dari kampus-kampus ternama di luar negeri. Wapres rupanya terpikat oleh tawaran MOOCs (*Massive Open Online Courses*) – sebuah wabah yang sedang

* Dimuat di Harian KOMPAS 14 Februari 2013

melanda bisnis pendidikan tinggi internasional, terutama di Amerika Serikat. Apalagi saat ini MOOCs umumnya tersedia secara *prodeo*. Para penyedia MOOCs, seperti Coursera, Audacity, EdX, MITx dan Khan Institute memang masih membebas-beakan para pengguna jasa kuliah *online* mereka.

Pembebasbeaan tadi tentu tidak akan berlangsung selamanya. Penyedia MOOCs sudah merancang langkah-langkah taktis untuk meraup penghasilan. Peter Lange *Provost* salah satu universitas mitra Coursera – Duke University – dengan optimis menyatakan “Kami akan menghasilkan uang, ketika Coursera menghasilkan uang. ...Saya pikir hal itu akan terjadi tidak lama lagi. Kita tidak ingin mengulang kesalahan industri surat kabar yang menggratiskan produk online merela terlalu lama” (Jakarta Post, 8/1/2013).

Coursera - yang dibangun oleh dua profesor ilmu komputer di Stanford University Daphne Koller dan Andrew Ng - telah menyiapkan strategi untuk mendapatkan aliran uang masuk. Coursera merancang penarikan beaya dari (1) sertifikasi (sertifikat kelulusan peserta), (2) rekrutmen karyawan (akses terhadap data nilai dan prestasi peserta), (3) tutorial tatap muka dan penilaian, (4) sponsor, (5) uang kuliah dan (6) penjualan platform MOOCs kepada lembaga penyelenggara kuliah. Yang terakhir rupanya telah memiliki pasar. Disadari atau tidak, solusi ala Wapres itulah yang justru ditunggu-tunggu oleh para penyedia MOOCs.

Dengan keleluasaan finansial yang dimiliki, kiranya tidak sulit bagi Kementerian Pendidikan Nasional membeli platform MOOCs dan memberikan akses kepada perguruan-perguruan tinggi. Namun begitu, solusi yang disarankan Wapres harus dipertanyakan secara kritis. Perlu disadari bahwa dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi tidak ada resep “*quick fix*” yang instan dan mujarab.

Konsep MOOCs sendiri masih sarat kontroversi. Pada awal peluncurannya, portal-portal MOOCs berhasil memikat begitu banyak peminat – melampaui kisah sukses jejaring sosial Facebook dan Twitter. Hingga desember 2012, misalnya, pendaftar kuliah Coursera telah mencapai lebih dari dua juta. Setiap minggu ada 70 ribu pendaftar untuk 200 mata kuliah yang ditawarkan. Hanya dalam waktu empat bulan sejak diluncurkan, Coursera mampu menggandeng 33 universitas mitra dalam pengembangan bahan kuliah, dan mampu menarik modal ventura sebesar 16 juta dolar AS.

Istilah MOOCs diangkat pertama kali oleh Dave Cormier dan Bryan Alexander untuk menyebut perkuliahan *online* tentang “*Connectivism and Connective Knowledge*” oleh George Siemens dan Stephen Downes di Universitas Manitoba, Canada. Kuliah *online* dalam platform MOOCs adalah rekaman video perkuliahan biasa yang dipilah dalam segmen lima belas menitan. Setiap minggunya peserta mendapat semacam ujian dengan soal pilihan ganda. Ujian ini dirancang untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah (algoritma) bukan penguasaan konsep. Setelah mengerjakan soal, peserta kuliah tidak mendapatkan umpan balik apapun kecuali nilai. Dalam telaahnya terhadap sejumlah institusi peserta Coursera, Amstrong (2012) menengarai kurangnya keterlibatan ahli pedagogi dalam pegembangan mata kuliah *online* yang mereka tawarkan.

Dalam konteks daya saing, menurut hemat saya praksis itu penggunaan MOOCs justru berpotensi mereduksi makna dan menurunkan mutu pendidikan tinggi, serta mengancam kebebasan akademik. Penggunaan MOOCs di kampus-kampus kita sejatinya mereduksi kegiatan pengajaran menjadi sekedar usaha waralaba. Kampus-kampus kita hanya menjadi pembeli lisensi paket pengajaran dari pihak pengembang MOOCs.

Kalaupun nantinya tersedia MOOCs versi Indonesia dan gratis, maka risiko menghadang sama saja.

Anjuran penggunaan MOOCs sebenarnya berisiko menggerus kebebasan akademik.

Pasal 8 Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kebebasan akademik “..merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma” (ayat 2). Dalam kebebasan akademik melekat otonomi keilmuan yaitu “..otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik” (ayat 3). Jadi setiap dosen justru harus mengembangkan bahan perkuliahananya sendiri bukan hanya mengasongkan paket perkuliahan yang disusun dan dikemas oleh dosen lain. Tentu saja dalam mengembangkannya sang dosen selayaknya didorong untuk memanfaatkan kekayaan sumber ilmu baik yang konvensional maupun *online* – termasuk melongok isi MOOCs. Tetapi, sekali lagi, bukan sekedar menyomot dan menggunakan modul yang sudah tersedia.

Dalam ranah praktis, penggunaan MOOCs justru dapat menjerumuskan para dosen menjadi sekedar “sopir tembak”. Hal ini tentu saja bertabrakan langsung dengan rumusan tugas dosen dalam pasal 12 Undang-undang nomor 12/2012 tentang pendidikan tinggi. Dua ayat pertama dalam pasal itu menegaskan bahwa dosen (1) sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif

mengembangkan potensinya, dan (2) sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Artinya, para dosen kita memang harus berupaya keras dan terus menerus untuk mengembangkan ilmunya dan menularkannya kepada mahasiswa melalui proses belajar mengajar yang interaktif dalam rumah *universitas magistrorum et scholarium*. Jalan terjal memang masih harus dilalui untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya dosen kompeten dan mumpuni yang banyak diidap oleh perguruan tinggi kita saat ini. Dalam dunia pendidikan *quick fix* memang tidak pernah ada.

Demokrasi Pengetahuan dan Universitas*

Saat ini tatanan sosial politik negeri ini sedang dibalut kabut tebal. Apa yang sedang berlangsung di bisa dipandang sebagai buah pahit demokrasi. Salah satu biang keladi dari munculnya kabut tebal itu adalah kebebasan penyampaian pendapat yang tidak dilandasi etika dan dipagari oleh rasa tanggungjawab. Akibatnya telah terjadi berbagai penyesatan informasi, yang bukan hanya membingungkan tetapi sampai tingkat tertentu sudah berhasil memecah belah masyarakat. Gejala ini berkembang sangat subur seiring dengan semakin terbukanya akses terhadap internet dan media sosial. Sudah sangat jamak kita jumpai berbagai unggahan berita dan video yang menanamkan kebencian dan fitnah - bahkan sejak dari judulnya.

Namun, seperti layaknya buah, ada pula buah yang manis dari demokrasi. Salah satu buah manis demokrasi yang kian mewujud adalah apa yang disebut sebagai demokrasi pengetahuan (*knowledge democracy*). Dalam masyarakat yang telah semakin mengarah pada masyarakat pengetahuan (*knowledge society*), saat ini pengetahuan – atau lebih tepatnya

* Dimuat di Harian KOMPAS 7 Januari 2017

penguasaan terhadapnya - telah tersebar luas dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah bukan lagi menjadi monopoli para ilmuwan universitas. Banyak keahlian yang berakar dalam pengalaman hidup warga. Begitu pula kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi mulai tersebar merata dalam masyarakat. Singkatnya, meminjam ungkapan Beth Simone Noveck (2016), Guru Besar Universitas New York, telah berlangsung pergeseran dari pakar "resmi" (*credentialed experts*) ke pakar "warga" (*citizen experts*) dalam berbagai bidang iptek.

Akses yang semakin meningkat terhadap teknologi internet dan media sosial - yang semakin canggih serta kian mudah digunakan – merupakan faktor penting yang memacu pergeseran dari pakar "resmi" (pares) ke pakar "warga (pawar) tersebut. Sebagian besar dari kita tentu telah menyaksikan dan bahkan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dibagikan oleh para pawar secara cuma-cuma di media sosial. Dalam keseharian dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari kita pernah merasakan betul jasa para pawar ini. Contoh yang paling sederhana adalah saat kita menemui kesulitan dengan produk elektronik dan *gadget* baru. Untuk bisa mengoperasikan piranti tersebut kita cukup menyimak video bertajuk "*unboxing...(merek dan seri gadget anda)*" yang diunggah di media sosial. Dalam media sosial yang sama kita bisa mendapati begitu banyak orang yang secara sukarela berbagi beragam pengetahuan dan ketrampilan – dari yang sederhana hingga yang sangat ilmiah – mulai dari "*bermain karet gelang*" atau "*membuat pupuk organik*" sampai "*human genome sequencing*". Fenomena ini kembali menegaskan bahwa manusia memang mahluk yang selalu terombang-ambing oleh dorongan egoisme dan altruisme.

Tantangan bagi Universitas

Proses demokratisasi pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan menuntut universitas dan para lulusannya untuk beradaptasi. Sebagai sebuah keniscayaan, proses ini tidak perlu - dan memang tidak bisa dimitigasi. Universitas sudah tidak bisa lagi mendaku sebagai pemegang monopoli riset dan ilmu pengetahuan. Mungkin, hanya satu monopoli universitas yang masih dapat dipertahankan yaitu pendidikan para peneliti, karena otoritasnya dalam pemberian gelar akademik. Universitas harus menggeser haluannya. Jika sebelumnya universitas adalah kutub utama pengetahuan, ia kini hanya merupakan satu dari banyak kutub dalam konstelasi ilmu pengetahuan yang *multipolar*. Untuk itu universitas harus memiliki kesadaran baru, yaitu kesadaran kewargaan (*civic awareness*).

Dengan kesadaran baru itu, universitas dapat menemukan peran kewargaannya (*civic role*). Peran kewargaan universitas adalah bersama segenap unsur masyarakat terlibat - secara setara dan saling menghargai - dalam pembangunan wilayah dan nasional. Proses keterlibatan bersama dalam pembangunan wilayah dan nasional ini dikenal sebagai proses ko-kreasi (*co-creation*). Dan universitas yang telah terlibat dalam ko-kreasi layak mendapat predikat universitas transformatif (*transformative university*) – atau universitas generasi keempat.

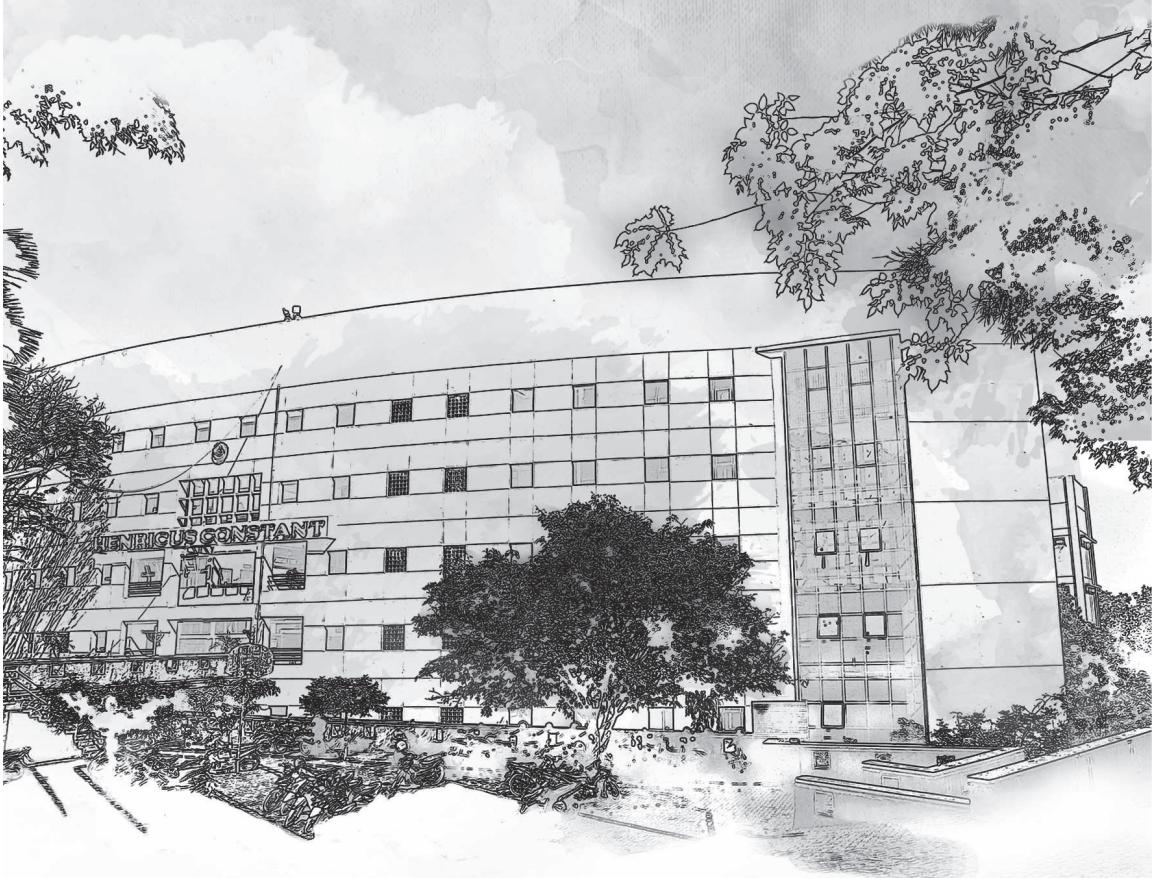
Jika ceruk pergumulan universitas sudah terumuskan dengan baik – yaitu berproses menjadi universitas transformatif – bagaimana dengan para alumninya? Dalam kaitan ini, dengan memadukan pemikiran John Dewey dan Bruno Latour, Gert Biesta (2007) – seorang filsuf dari Universitas Stirling, Inggris – merumuskan bahwa agenda penting yang harus diemban oleh universitas dalam peran kewargaannya adalah justru

memperkuat proses demokratisasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian para alumni sebagai warga masyarakat berhak dan perlu menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dalam proses ko-kreasi – tanpa harus berada dalam pemerintahan. Perlu disadari dalam sistem pengetahuan multipolar ini, ada lebih banyak pakar (ahli) daripada jumlah mereka yang “beruntung” membantu pemerintah. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Noveck (2016) - dikotomi antara demokrasi dan kepakaran adalah sebuah kekeliruan.

Akhirnya - di tengah kemelimpahan dan ketersebaran pengetahuan dalam masyarakat - universitas harus mengambil peran sebagai simpul pengetahuan (*knowledge hub*). Sebagai sebuah simpul, universitas harus mampu menjalankan *crowdsourcing* (*outsourcing from the crowd*). Idealnya universitas berperan dalam menghimpun, mengelompokkan, memadukan dan menyajikan beragam pengetahuan yang tersebar itu dalam bentuk yang lebih siap untuk didayagunakan oleh pengambil keputusan (baca: pemerintah) dalam meningkatkan mutu pembangunan.

Wacana 2

Mandat



Universitas, Gerbong Kemajuan*

Setelah terpuruk oleh krisis 1998, Indonesia kini diprediksi oleh sejumlah pihak akan betransformasi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini Indonesia telah berada di peringkat 17 ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat 6 di antara negara berkembang (baca: The Indonesia Competitiveness Report 2011 - The World Economic Forum). GDP per kapita Indonesia pada tahun 2010 disebut sudah melampaui 4000 USD. Lebih jauh, menurut skenario Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) - yang disusun pemerintah pada awal tahun ini -

Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 Triliun. Dari sisi daya saing, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index, GCI*) Indonesiapun terus beranjak naik dari peringkat 54 (114 negara yang distudi) ke 44 (139 negara yang distudi) pada tahun 2010.

Angka angka di atas memang terkesan sangat menakjubkan tetapi juga sekaligus meragukan. Apalagi jika kita perhadapkan dengan gelombang kabar buruk yang melanda media cetak dan elektronik di negeri ini. Berita dan ulasan tentang korupsi yang merajalela,

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 8 Agustus 2011

kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan kemiskinan, pengurasan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan di seluruh sudut negeri tentu secara alami membuat kita mudah berprasangka terhadap gambaran hebat pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagai sebuah komunitas akademik, *civitas academica* universitas sudah selayaknya menanggapi “kabar baik” perekonomian Indonesia secara obyektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis yang merupakan ciri khas kaum intelektual. *Civitas academica* jangan sampai terjebak dalam apa yang dalam ilmu statistika dikenal sebagai **Kesalahan Jenis Pertama** atau *Error of the First Kind*. Jangan sampai – karena hanya mengandalkan kemampuan olah pikir yang diwarnai prasangka - kita secara prematur menolak “hipotesis” bahwa perekonomian Indonesia berkembang pesat yang sejatinya benar. Jangan jangan, Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru (*mindset*) warganya.

Tentu saja potret cantik perekonomian Indonesia bukannya tanpa catatan. Kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu hampir sepenuhnya pada ekspor komoditas primer dan hasil ekstraksi sumber daya alam, seperti pada masa kolonial Belanda – sedangkan kinerja sektor manufaktur masih lemah. Indonesia bahkan dikhawatirkan mengalami kutukan sumber daya (*resource curse*) karena tidak berhasil dalam menganekaragamkan ekonominya sehingga tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas primer (The Kian Wie, 2011).

Catatan yang senada juga diberikan oleh Forum Ekonomi Dunia (*the World Economic Forum*, WEF). Menurut lembaga ini, meskipun tingkat daya saingnya semakin menguat Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sejumlah pilar daya saing, antara lain kesehatan masyarakat, infrastruktur, efisiensi ketanagakerjaan, dan kesiapan

teknologi (*technological readiness*). Penilaian GCI bertumpu pada 12 pilar daya saing, yaitu: (1) kelembagaan, (2) infrastruktur, (3) lingkungan ekonomi makro, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi dan pelatihan, (6) efisiensi pasar, (7) efisiensi ketenagakerjaan, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) ukuran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi.

Seperti kita maklumi bersama, saat ini yang tengah menjadi primadona dalam diskursus publik adalah pilar pertama: kelembagaan. **Pilar Kelembagaan** menyangkut mutu lembaga publik dan swasta, termasuk efisiensi pemerintahan, tingkat keamanan, *governance* korporasi, keadilan dan transparansi lembaga lembaga publik. Tanpa bermaksud menafikan kerusakan kronik pilar kelembagaan di negeri ini, menurut hemat saya sudah terlalu banyak waktu dan energi yang tercurah untuk membahasnya di semua jenis media dan ruang ruang publik. Universitas, menurut hemat saya, sebaiknya tidak larut begitu saja dalam arus kuat diskursus publik – yang semakin hari semakin pekat dengan nuansa politik. Ketika semakin banyak institusi kemasyarakatan, terutama media, semakin leluasa dan tanpa canggung lagi memeragakan bias politiknya maka universitas sudah selayaknya terpanggil untuk terlibat secara obyektif atas nama kepentingan masyarakat luas.

Dengan kata lain, di samping terus secara kritis memantau dan menyampaikan saran terhadap jalannya pembangunan, universitas sudah selayaknya pula ikut memperkuat daya saing Indonesia sesuai dengan fungsi dan ranah kerjanya. Mengacu pada ke 12 pilar daya saing WEF, setidaknya ada tiga pilar yang langsung kena mengena dengan universitas, yaitu pilar (5) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, (9) Kesiapan Teknologi dan (12) inovasi. Inti dari pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan fokusnya adalah mutu dan akses ke pendidikan menengah dan tinggi,

serta mutu magang kerja calon lulusan. Pilar Kesiapan Teknologi terfokus pada penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi untuk memacu produktifitas. Pilar Inovasi mencerminkan potensi nasional dalam membangkitkan kemampuan inovasi dakhil (*endogenous*).

Menurut hemat saya semua universitas di Indonesia sudah selayaknya menempatkan pengembangan ketiga pilar tersebut di atas sebagai prioritas. Ketiga pilar itu layak untuk secara frontal dihadapi oleh semua universitas – baik sebagai tantangan maupun peluang. Akses dan mutu pendidikan tinggi, kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi, serta kemampuan inovasi sudah seharusnya menjadi agenda kerja universitas universitas di negeri ini, kecuali jika mereka siap ditinggal oleh gerbong kemajuan Indonesia. Akhirnya, yang pantang dilupakan adalah bahwa universitas adalah wahana persemaian generasi muda yang harus siap mengarungi tantangan jaman baru, bukan mereka yang terkungkung oleh ketidakberdayaan masa lalu. Indonesia yang akan dihadapi oleh mereka yang masih mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

Kedangkalan dalam Kemelimpahan*

Saat ini kita hidup dalam suatu masa yang paling menarik dalam perjalanan peradaban manusia. Kita beruntung untuk mengalami kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang luar biasa cepat. Sejak introduksi komputer pribadi kepada kalangan terbatas di negeri ini pada tahun 1980an, jumlah kepemilikan perangkat TIK melesat bak meteor. Perangkat TIK, dalam bentuk komputer pribadi, laptop, telepon selular dan tablet bukan hanya mengalami evolusi radikal dalam bentuk dan ukuran – tetapi terlebih lagi dalam fungsi. Begitu pula dengan perkembangan teknologi internet yang belakangan diikuti oleh ledakan pertumbuhan media sosial dan penggunanya.

Dalam perkembangannya, kita dikejutkan oleh kenyataan tiba-tiba Indonesia menjadi salah satu pusat pengguna internet dan sosial media. Hampir 30 juta orang di negeri ini adalah pengguna Twitter sehingga menempati peringkat kelima sedunia. Jakarta bahkan dinobatkan sebagai “Ibukota Media Sosial Dunia” (*the social media capital of the world*). Di tahun 2013, 2,4% kicauan Twitter dunia berasal dari Jakarta! Jakarta juga menjadi kota dengan pengguna Facebook terbanyak kedua (lebih dari 11,6 juta) di dunia, diapit oleh Bangkok dan Sao Paulo. Angka-angka yang fantastik itu, di satu sisi, merupakan cerminan kemajuan - tetapi

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 23 April 2014

bukan berarti tanpa risiko. Kemajuan pesat dalam “konsumsi” produk TIK menghadapkan penggunanya pada kelimpahan informasi. Kondisi ini, dalam lingkungan sekolah dan universitas menghasilkan sebuah paradoks “mati ayam dalam lumbung” (*paradox of plenty*). Di lumbung informasi yang begitu melimpah para pembelajar justru “kandas” dalam kedangkalan. Perilaku potong dan tempel (*cut and paste*) dan bahkan “pencurian” sebagian atau seluruh karya orang lain (*plagiarism*) menjadi *modus* yang semakin menakutkan.

Sebagai salah satu akibat dari perkembangan TIK tadi, kondisi pembelajaran siswa dan mahasiswa sekarang memiliki ciri yang khas – dibandingkan apa yang dialami para pendahulu mereka. Kini pencarian bahan pelajaran dan informasi ilmiah mengandalkan mesin pencari (*search engine*). Google, mesin pencari yang paling popular di kalangan mahasiswa, sampai-sampai mendapat julukan “Mbah Google”. Si “Mbah” mampu mencarikan informasi nyaris tentang apa saja. Akibatnya siswa – dan terutama mahasiswa – lebih banyak menenteng gadget daripada buku. Memang lingkungan pembelajaran di sekolah dan universitas telah meninggalkan beberapa ciri tradisionalnya.

Sayangnya kemajuan teknologi informasi – sebagai wajah kekinian – telah melahirkan sebuah paradoks. Kelimpahan informasi ternyata hanya mereproduksi kedangkalan. Keragaman sumber belajar (*diversity of learning resources*) yang tersedia saat ini menghadirkan tantangan baru bagi proses pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Ledakan informasi daring (*online contents*) telah menjerumuskan para pembelajar untuk cenderung mencecap kedangkalan tanpa mencerna kedalamannya. Bahkan lebih parah lagi, kelimpahan informasi juga mendorong para pelaku pendidikan atau pembelajar untuk mengambil jalan pintas – melakukan tindak plagiasi.

Joseph S. Nye Jr. perekacipta istilah “softpower” sepuluh tahun yang lalu menulis “....*an explosion of information, one that has produced a “paradox of plenty.” Plenty of information leads to scarcity-of attention. When people are overwhelmed with the volume of information confronting them, they have difficulty discerning what to focus on*”. Menurutnya, kelimpahan, atau lebih tepatnya, ledakan informasi menghasilkan sebuah paradoks –“*mati ayam dalam lumbung*”. Semakin melimpah-ruahnya informasi maka semakin langka perhatian yang dicurahkan. Para pencari informasi atau pengetahuan mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian.

Hasilnya adalah kedangkalan. Alih-alih melakukan pengendapan atau refleksi atas pengetahuan yang didapat, para pembelajar “digital” bahkan tidak sempat untuk melakukan pembacaan secara cepat - *skimming*. Mereka hanya mampu melakukan pemindaian - *scanning*. Jika kini sebagian besar orang sudah terjerumus dalam jebakan digital ini, maka beruntunglah mereka yang masih memilih cara konservatif – tanpa harus mengabaikan panggilan jaman untuk mulai merdeka dari kertas.

Mengamini dalil “*information is power*” yang ditawarkan oleh Joseph S. Nye, Jr. maka saat ini keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk bisa menguasai informasi secara mendalam. Dengan kata lain, mereka yang mampu bergeser pindah dari kondisi “*attention deficit*” ke “*attention surplus*” akan berhasil dalam hidup profesionalnya. Perhatian menjadi barang langka di tengah kelimpahan informasi. Kemampuan untuk menguasai dan mengunyah informasi itulah yang dikenal sebagai *softpower*. Inilah tantangan dunia pendidikan kita saat ini.

Perjumpaan Jenis Ketiga

Judul tulisan ini terinspirasi oleh fenomena *Close Encounter of the Third Kind* (perjumpaan jenis ketiga). Istilah *close encounter* saya pinjam dari khasanah *ufology* – ilmu tentang UFO (*unidentified flying object*) – yang menggambarkan kejadian saat seseorang menyaksikan kehadiran UFO. Ahli astronomi dan peneliti UFO J. Allen Hynek penulis buku “*The UFO Experience – A Scientific Inquiry*” (1972) membagi tiga jenis perjumpaan manusia dengan UFO. Perjumpaan jenis pertama adalah saat seseorang secara visual melihat UFO dengan cukup jelas dari jarak sekitar 160 meter; sedangkan perjumpaan jenis kedua adalah adanya efek dan jejak fisik yang menyertai kehadiran UFO – seperti hawa panas, kemacetan kendaraan dan piranti alat elektronik, reaksi hewan-hewan, jejak kimia dan sebagainya . Puncak dari perjumpaan dengan UFO adalah saat seseorang bukan hanya melihat “pesawat”nya melainkan juga bersua dengan mahluk luar angkasa – entah itu humanoid, robot atau alien. Inilah yang disebut sebagai perjumpaan jenis ketiga, *close encounter of the third kind*.

Saya memilih metafora *close encounter of the third kind* ini untuk menggambarkan pentingnya perjumpaan antara *civitas academica* dengan dunia sekelilingnya. Perjumpaan yang dekat merupakan modal untuk mewujudkan relevansi kegiatan di balik dinding

universitas dengan apa yang sedang berkecamuk di dunia yang lebih luas. Relevansi adalah keniscayaan bagi sebuah universitas, karena tanpa relevansi ia akan terasing dari masyarakat.

Untuk mereduksi “jarak” antara kegiatan kampus dan dunia yang lebih luas universitas harus secara sistematik mengembangkan berbagai program. Demi mewujudkan perjumpaan langsung dengan masyarakat lokal universitas memang telah melibatkan mahasiswa berbagai kegiatan seperti kemah bakti, kuliah kerja nyata, kuliah kerja usaha, *live in* dan *service learning*. Tidak ketinggalan pula, kegiatan ekskusi, kerja praktik, magang serta *internship* demi perjumpaan dengan lingkungan profesional – seperti industri, bisnis, institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga riset.

Untuk perjumpaan dengan globalisasi, sudah jamak universitas mengirim dosen dan mahasiswanya mengikuti program *faculty/student exchange/mobility* ke berbagai universitas dan institusi di luar negeri. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terjadinya perjumpaan antara mahasiswa dan dosen dengan sejawatnya dari berbagai negara, seperti seminar, konferensi, *student camp*, *research camp*, dan sebagainya. Perjumpaan-perjumpaan yang digambarkan di atas sebagian sudah berwatak perjumpaan jenis ketiga. Namun yang harus ada dalam setiap perjumpaan itu adalah proses mengalami – terlibat sebagai pelaku aktif – bukan sekedar “memotret” keadaan. Idealnya dalam setiap perjumpaan itu para dosen dan mahasiswa tidak hanya bersikap sebagai wisatawan intelektual (*intellectual tourist*). Kini, adagium “*seeing is believing*” sudah tidak memadai lagi. Ia harus diubah menjadi “*experiencing is believing*”.

Perjumpaan yang dekat dan intens antara *civitas academica* dengan masyarakat sekelilingnya adalah keniscayaan bagi universitas yang transformatif. Artinya, tanpa perjumpaan nyata dan dekat dengan masyarakatnya tidak mungkin universitas akan berperan

dalam transformasi wilayah dan masyarakat penghuninya. Tanpa menghadirkan perjumpaan dengan globalisasi, maka jangan berharap universitas ini mampu membekali lulusannya untuk berkiprofesi di aras mondial. Perjumpaan dengan globalisasi sebenarnya tidak harus berlangsung di kampus luar negeri, kampus universitas ini telah berusaha menghadirkan semangat kewargaan global (*global citizenship*) bagi *civitas academicanya* – melalui kehadiran mahasiswa/dosen/peneliti dari luar negeri.

Tentunya masing-masing individu diharapkan mengambil peran untuk secara aktif mereguk peluang yang tersedia. Pada aras individu, perjumpaan dengan dunia yang lebih luas merupakan kebutuhan yang tidak pernah berkesudahan. Anjuran yang sama juga berlaku untuk mereka yang sudah berkarir – dan menghuni dunia yang sempit – jangan pernah enggan untuk selalu menyempatkan diri untuk melakukan *close encounter of the third kind* dengan masyarakat sekitar dan dunia. Tanpa perjumpaan itu jangan-jangan justru kita yang akan menjelma menjadi *alien* – sosok yang terasing dari lingkungan setempatnya dan tidak memiliki orientasi global.

Mutu Indonesia Dan Kepercayaan Diri*

Mengacu laporan *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC) yang sudah dirilis oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), Victoria Fanggidae dari Perkumpulan Prakarsa (Kompas, 2/9/2016) menyuarakan keprihatinan tentang mutu sumber daya manusia Indonesia. Victoria menunjukkan posisi manusia dewasa Indonesia (survey hanya dilakukan di Jakarta) di peringkat paling bawah dari semua negara peserta survei – yang umumnya negara maju - pada hampir semua jenis kompetensi yang untuk bekerja dan berkarya dalam masyarakat, seperti literasi, numerasi, dan kemampuan pemecahan masalah.

Telaah lebih teliti terhadap laporan PIAAC (2016) mengungkapkan sejumlah temuan menarik. OECD menyebutkan rendahnya skor literasi dan numerasi manusia dewasa Indonesia (Jakarta) tidak mengejutkan karena pembandingnya negara-negara yang secara ekonomi lebih maju dari Indonesia. Yang unik adalah bahwa sebaran skor kompetensi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan semua negara peserta. Disparitas ini berimbang pada penghasilan. Hasil survei di Jakarta menunjukkan bahwa meningkatnya aras pendidikan formal seseorang memberikan peningkatan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan negara-

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 30 November 2016

negara OECD. Dalam hal ini penambahan satu standar deviasi durasi pendidikan formal (3,4 tahun) memberikan peningkatan penghasilan (per jam) sebesar 26,6% dibandingkan dengan peningkatan hanya 14,4% di negara-negara OECD. Artinya, mereka yang mengenyam pendidikan tinggi berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik daripada mereka yang tidak.

PIAAC sendiri adalah sebuah survei internasional yang dilakukan di lebih dari 40 negara. Survei tersebut mengukur kompetensi kognitif utama dan kompetensi lain yang diperlukan di dunia kerja (*workplace*) agar seseorang dapat berpartisipasi dalam kemajuan ekonomi masyarakatnya. Salah satu asumsi penting yang mendasari PIAAC (2016) adalah bahwa kemampuan mengelola informasi dan memecahkan masalah menggunakan komputer menjadi sebuah kebutuhan mendasar seiring dengan semakin berperannya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia kerja dan pendidikan. Studi PIAAC secara khusus dirancang untuk mengukur sejumlah ketrampilan utama dalam mengolah informasi, yaitu: literasi, numerasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan kaya teknologi (*problem solving in technology-rich environments*). Orang dewasa yang sangat menguasai ketrampilan yang diukur dalam survei tersebut kemungkinan besar akan berpeluang mengambil kesempatan-kesempatan yang tercipta oleh perubahan teknologi dan struktur masyarakat yang sedang berlangsung. Mereka yang kesulitan dalam menggunakan teknologi-teknologi baru akan menghadapi risiko besar untuk tersingkir dari persaingan.

Menurut hemat saya asumsi PIAAC ini berlaku universal, termasuk bagi lulusan perguruan tinggi Indonesia. Di tengah sejumlah kritik terhadap kinerja pendidikan tinggi Indonesia yang masih berada di bawah negara-negara lain – bahkan di

kawasan ASEAN sekalipun – ternyata kita juga menyaksikan jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia yang bekerja di luar negeri juga terus meningkat. Dalam catatan saya, lulusan Unika yang berkarir di luar negeri juga semakin bertambah. Banyak fakta menunjukkan bahwa berkarir di luar negeri bukan hanya terbuka bagi mereka yang studi di luar negeri dan bukan hanya bagi mereka yang menapaki karir mulai dari *entry-level job* di luar negeri. Ternyata peluang juga terbuka bagi mereka yang merajut karir di dalam negeri terlebih dahulu. Dalam catatan saya, ada seorang alumnus Unika mengawali karirnya selama 10 tahun di sebuah kota kecil (Pati) dan kini kini bergabung dengan sebuah perusahaan multinasional menjadi seorang *factory manager* di Petaling Jaya, Malaysia. Ada juga seorang alumnus Unika yang memulai karir di Cikupa Tangerang, kemudian ke Johor Baru, lantas ke Singapura. Saya juga mengenal seorang yang menjalani pendidikan universitasnya di UNDIP yang setelah berkarir cukup lama di Thailand dan kini di Swedia.

Kita perlu menyadari bahwa kompetensi dibentuk sejak di kampus dan terus dikembangkan dalam berkarir di perusahaan atau organisasi. Itulah esensi *lifelong learning* (belajar sepanjang hayat), dan perguruan tinggi sebenarnya memang punya mandat untuk mempersiapkan individu yang siap dan mampu terus mempelajari hal hal baru sesuai dengan dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di kampus, serta sekaligus dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat. Yang terakhir ini dikenal sebagai sebagai *soft skills* atau *transferrable skills* - yang dapat dimaknai sebagai ketrampilan yang dapat dilatihkan atau diakuisisi oleh siapa saja.

Di samping terus mengembangkan ketrampilan atau kompetensi seseorang yang ingin sukses berkarir di jaman ini dituntut punya kemampuan lain, yaitu ketrampilan dalam memperkenalkan diri

(*to make yourself heard*). Dalam hal ini, literasi dalam teknologi informasi dan komunikasi amat penting. Kemampuan untuk memanfaatkan jejaring sosial - seperti *LinkedIn* dan sejenisnya – sangat krusial untuk memperkenalkan kompetensi seseorang. Dewasa ini kegiatan untuk memburu talenta-talenta hebat di dunia profesional (*head hunting*) sudah sangat jamak dan bahkan telah menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan dari perkembangan dunia bisnis dan industri global.

Selain itu pemanfaatan internet tidak terbatas hanya pada mereka yang ingin berkarir sebagai profesional. Bagi mereka yang bekerja di dunia seni dan desain – termasuk animasi – memperkenalkan karya melalui internet adalah salah satu cara yang mungkin paling efektif untuk menembus pasar global saat ini. Begitu pula bagi mereka yang berniat untuk berwirausaha maka internet memberi ruang bagi produk dan kreativitas pemasaran (*e-commerce*) yang nyaris tanpa batas. Singkatnya, fenomena “*the world is flat*” yang dikemukakan oleh Thomas L. Friedman (2005) satu dekade lalu kini sudah menjadi sesuatu yangg lazim. Kegiatan global *outsourcing* untuk *call center*, kontrak produksi, jasa akuntansi, analis kesehatan, jasa pendidikan dan sebagainya - yang dulu hanya berlangsung di China, India, dan Filipina - kini telah menyebar di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Fakta di atas bisa jadi menunjukkan bahwa sebenarnya kita mesti lebih percaya diri dalam menilai mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu globalisasi memang sudah hadir dan telah berhasil menjebol batas-batas antar negara. Maka pesan yang dapat disampaikan kepada para mahasiswa adalah “siapapun anda, lulusan manapun anda yang penting adalah kompetensi anda (*you are what you are good at*)”. Di manapun anda berkarir - selama anda terus mengembangkan kompetensi yang khas dan unggul - maka peluang selalu terbuka untuk anda berkarir di mana saja di berbagai belahan dunia.

Mobilitas Yang Bermutu*

Globalisasi ternyata telah benar benar hadir dalam kehidupan kita, warga Indonesia. Mobilitas manusia Indonesia melintasi batas batas wilayah dan negara terus meningkat hari lepas hari. Pemesanan lebih dari 200 pesawat Boeing 737 seri terbaru oleh sebuah perusahaan penerbangan swasta nasional – yang merupakan pemesanan terbesar sepanjang sejarah penerbangan Indonesia dan bahkan bagi produsennya - adalah bukti kesiapan menyongsong peningkatan mobilitas manusia Indonesia. Tidak heran, jika Presiden Barack Obama hadir pribadi dalam penandatanganan kerjasama antara perusahaan penerbangan nasional itu dan produsen pesawatnya – sebuah momentum yang penuh makna di tengah terjungkalnya Amerika Serikat dalam krisis ekonomi.

Mobilitas warga Indonesia yang meningkat pesat dapat dengan mudah dikenali kesibukan dan keruwetan bandara bandara kita. Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah melayani jumlah penumpang dua kali lipat dari yang diproyeksikan sebelumnya, sehingga banyak penerbangan tertunda terbang atau mendarat hanya “gara gara” menunggu giliran. Semarang pun tak mau ketinggalan. Kini ibu kota Jawa Tengah telah terhubung ke dua kota utama ASEAN - Singapura dan Kuala Lumpur - melalui jalur udara.

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 6 Januari 2012

Mobilitas warga yang meningkat tentu saja berita baik yang harus kita syukuri, tetapi kita harus juga mulai memilikirkan aspek kualitasnya. Kita memerlukan mobilitas yang bermutu artinya bukan sekedar mobilitas konsumtif (wisata) atau mobilitas tenaga kerja tidak terampil berupah rendah. Mobilitas warga Indonesia yang bermutu ditandai, terutama oleh pergerakan individu individu yang memiliki modal ketrampilan dan intelektual yang secara kompetitif dapat mengisi lowongan kerja profesional di aras regional dan global. Saat ini kita masih berada di bawah Filipina, misalnya, yang warganya mampu mengisi berbagai jenjang profesi global – yang dalam istilah salah satu peneliti migrasi dari Miriam College, Filipina “from domestic helpers to CEOs”. Diberlakukannya komunitas ASEAN pada tahun 2015 nanti merupakan batu ujian bagi Indonesia untuk membuktikan kemampuannya menciptakan mobilitas yang bermutu.

Segenap universitas tentu saja memiliki tanggungjawab yang besar untuk membantu meningkatkan mobilitas manusia Indonesia yang semakin berkualitas. Sebagai konsekuensinya, universitas dituntut untuk membekali peserta didiknya dengan kompetensi yang sepatutnya dimiliki oleh warga global (*global citizen*).

Pendidikan tentang kewargaan global (*global citizenship*) harus mulai diperkenalkan di kampus kampus negeri ini. Universitas harus menyiapkan para mahasiswanya agar “melek” globalisasi (*globally literate*), yang setidaknya mencakup beberapa ciri berikut ini (1). pola pikir kritis, (2) keingintahuan tentang dunia sebagai entitas utuh, (3) kepedulian dan apresiasi global terhadap konteks sejarah dan budaya kejadian yang tengah berlangsung di dunia saat ini, (4) kepedulian etis: dari cara pandang *ethnocentric* ke “*ethno-relative*”, (5) pengetahuan tentang bagaimana menjawab dan memecahkan masalah lintas budaya, (6) ketrampilan berbicara dan menulis dalam bahasa internasional, (7) kefasihan

budaya: kemampuan untuk dengan mudah berpindah ke dalam dan antar budaya (Bruce Johnstone dkk., 2010). Beberapa elemen kunci yang menurut saya dapat disertakan dalam pendidikan “melek” globalisasi di kampus kampus antara lain adalah (1) Apa itu globalisasi? Khususnya era Asia dan peran Indonesia, (2) pengantar tata kelola global, (3) pengantar kepedulian lintas budaya, (4) kerjasama tim ragam budaya, (5) negosiasi lintas budaya, dan (6) ketampilan menyajikan gagasan.

Ilustrasi berikut ini mungkin menarik untuk direnungkan – karena ternyata ada satu faktor “klasik” yang tidak bisa dikesampingkan. Menanggapi permintaan saya, seorang alumnus S1 UNIKA Soegijapranata yang saat ini tengah berkarir di ibukota salah satu negara di benua Afrika - sebagai Manajer Pemasaran sebuah perusahaan farmasi Indonesia – menyebut tiga (3) faktor yang dia peroleh dari univeristas ini yang memuluskan perjalanan karirnya di sana. Yang pertama adalah paparan (*exposure*) pada bahasa Inggris, kegigihan/keuletan, dan inspirasi dari dosen. Ya, sekali lagi, inspirasi dosen. Sebagai elemen yang “abadi” dalam profesi guru, dosen memang dituntut untuk menyadari bahwa mereka adalah sosok yang berpeluang menjadi sumber inspirasi bagi para mahasiswa. Untuk bisa memberikan inspirasi tentu saja para dosen harus memiliki wawasan yang luas – bukan hanya menguasai bidangnya secara khusus melainkan harus berusaha mengembangkan apa yang disebut sebagai model T dalam pengembangan keilmuan. Setiap sosok dosen harus berupaya mengembangkan wawasannya selubar mungkin untuk memberi konteks yang lengkap bagi ilmu yang semakin dalam mereka gali.

Dalam banyak kasus, inspirasi sebenarnya bisa disemaikan oleh semua dosen yang menghayati dan berdedikasi pada profesinya. Syaratnya hanya satu. Dalam membagikan ilmu dan menuntun jiwa-pikiran muda para mahasiswa sang dosen tidak sekedar

menggunakan ketajaman olah pikirnya – tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah menggunakan kepekaan hatinya. Dosen boleh bergelar doktor dan profesor dengan beragam ilmu yang mereka kuasai tapi satu hal yang harus selalu menjadi prioritas, yaitu mereka harus mencerminkan satu sikap dan perilaku – yaitu mengutamakan mahasiswa.

Paradoks Pendidikan Tinggi

Filipina merupakan sebuah negara yang memiliki tradisi pendidikan tinggi yang sangat panjang. Filipina adalah rumah dari universitas tertua di Asia, Universitas Santo Tomas, yang sudah berusia lebih dari 400 tahun. Tidak heran jika sejumlah perguruan tinggi di sana telah berusia lebih dari satu abad. Dalam hal ini sejarah pendidikan tinggi di Indonesia bisa dibilang jauh lebih muda. Yang menarik, pengandaian umum bahwa sistem pendidikan tinggi yang mapan berkorelasi dengan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara nampaknya tidak terbukti di Filipina.

Mengapa paradoks itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah *brain drain* alias hijrahnya talenta-talenta terbaik Filipina ke luar negeri. Filipina mampu mengekspor sumber daya manusia di semua jenjang: mulai pembantu rumah tangga hingga eksekutif puncak – *Chief Executive Officer* (CEO). Setiap harinya lebih dari dua ribu (2000) orang meninggalkan Filipina untuk mengadu nasib ke luar negeri. Aliran devisa yang masuk ke negeri itu telah mencapai hampir 30 miliar dolar Amerika per tahun.

Di luar itu, setiap tahun ribuan mahasiswa Filipina mengikuti program *work and travel* ke Amerika Serikat dan Eropa Barat, yang memungkinkan mereka berkunjung ke berbagai tempat sembari bekerja. Salah satu kelebihan sumber daya manusia Filipina

adalah penguasaan Bahasa Inggris, yang telah mereka kuasai sejak usia dini. Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pengantar sejak aras pendidikan usia dini - terutama bagi mereka yang belajar di sekolah swasta. Gairah untuk bekerja di luar negeri warga Filipina memang sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka berani mengambil pekerjaan "kasar" – dengan harapan sebagai batu loncatan - meskipun memiliki latar belakang pendidikan universitas. Alhasil kita bisa menemukan warga Filipina di segenap penjuru dunia.

Di samping wajah globalnya, dunia pendidikan tinggi Filipina memiliki wajah lain yaitu inflasi lulusan. Selain ditinggalkan oleh talenta-talenta terbaiknya ternyata Filipina menghadapi tantangan lain, yaitu ketidaksesuaian antara pekerjaan dan tingkat pendidikan pencari kerja. Hampir semua pekerjaan di sektor formal mensyaratkan lulusan atau setidaknya berpendidikan universitas (*graduate or university/college level*) perguruan tinggi para pelamar. Bukan suatu hal yang mengagetkan di Filipina, jika seorang wiraniaga toko atau anggota satuan pengamanan yang punya gelar sarjana. Apa yang terjadi di Filipina adalah buah dari apa yang disebut Steinberg (2014) sebagai aliran Jeffersonian dalam pendidikan tinggi (*higher education for the masses*) sebagai lawan dari aliran Hamiltonian (*higher education for the elite*). Dengan jumlah perguruan tinggi lebih dari dua ribu buah, Filipina mampu memproduksi sarjana dan peraih gelar diploma dalam skala yang masif. Jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak tentu saja memunculkan masalah keragaman mutu layanan pendidikan dan lulusan. Tidak heran jika banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya terdampar di pekerjaan-pekerjaan yang semestinya untuk lulusan sekolah menengah (termasuk sekolah vokasi). Di sisi lain, lulusan sekolah menengah sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Sebagai akibatnya mereka harus menjadi pekerja "kasar" di negara lain sebagai buruh migran.

Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya apa hubungan antara yang telah terjadi di Filipina dengan keadaan di Indonesia. Dalam pandangan saya setidaknya terdapat dua hal yang layak untuk diantisipasi dan disikapi oleh segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Pertama – gairah lulusan perguruan tinggi Filipina untuk berkarya di negeri orang akan mendapatkan momentumnya mulai tahun 2016, segera setelah Komunitas ASEAN diresmikan. Saat ini *jargon* “Integrasi ASEAN” telah bertebaran di kampus-kampus Filipina, setidaknya itu yang saya temukan di empat kampus yang saya kunjungi. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN tentu saja secara alami akan menjadi salah satu incaran talenta-talenta Filipina. Sebagai konsekuensinya, lulusan perguruan tinggi Indonesia harus siap bersaing dengan mereka.

Kedua - fenomena inflasi lulusan perguruan tinggi di Filipina juga berpotensi terjadi di Indonesia. Atas nama Angka Partisipasi, sebenarnya pemerintah sedang mengikuti aliran berpikir Jeffersonian – *higher education for the masses*. Dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi sebanyak lebih dari empat ribu (4000) buah, maka keragaman mutu lulusan tidak dapat dihindari. Tanpa keberanian untuk menata dan mengelompokkan perguruan-perguruan tinggi kita menurut kriteria mutu maka jangan harap kita tidak akan terjerumus dalam “kubangan” yang sama seperti Filipina.

Alumni dan Almamater*

Di penghujung tahun 2013 Universitas Diponegoro memiliki Ketua Umum Ikatan Alumni yang baru. Drs. Maryono, MM. - Dirut Bank Tabungan Negara - secara aklamasi terpilih menggantikan Dr. (HC). Hendarman Supandji, SH., CN. Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional ke VIII Ikatan Alumni (IKA) Undip Hendarman Supandji berharap Alumni Undip bisa jadi menteri atau presiden, bukan hanya satu atau dua tetapi harus lebih banyak (Suara Merdeka, 7/12/2013).

Harapan Hendarman bukan hanya sah tetapi memang itulah yang keniscayaan yang dirindukan oleh semua almamater – mampu turut mengantarkan alumninya meraih keberhasilan tertinggi di berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan para alumni sebuah almamater sungguh membenarkan ungkapan Benjamin Franklin – salah satu tokoh pendiri Amerika Serikat – bahwa *“Investment in knowledge pays the best interest”*. Sebagai sebuah investasi, pendidikan (universitas) memang nyaris selalu menghasilkan “buah” sosial-ekonomi yang lebat. Tidak ayal banyak pihak yang menganggap pendidikan universitas sebagai tangga untuk naik kelas sosial-ekonomi.

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 30 Desember 2013

Menyaksikan keberhasilan para alumninya tentu saja sah ketika almamater mengharapkan adanya sumbangan balik. Semakin banyak alumni yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan dan dunia usaha tentu sang almamater semakin berpeluang untuk mendapatkan banyak sumbangan sebagai ungkapan terimakasih. Lantas, digelarlah kegiatan-kegiatan seperti “Temu Alumni”, “Pulang Kandang” dan “Turnamen Golf” – yang bukan hanya ajang “kangen-kangenan” belaka melainkan lebih demi penggalangan dana.

Relasi almamater dan alumni tidak selalu sekedar penyaluran sebagian “buah” investasi pengetahuan yang diungkapkan Benjamin Franklin itu. Tetapi seringkali universitas, sebagai almamater, sering terjebak untuk membangun relasi dengan alumninya dalam kerangka pragmatis - kontribusi finansial – belaka. Dimensi nir-benda (*intangible*) dari alumni juga selayaknya diperhitungkan. Kisah Muhammad Hatta dan almamaternya mungkin mewakili sisi nir-benda ini.

Di minggu ketiga bulan November 2013 di sela-sela upacara pengukuhan salah seorang sahabat sebagai Guru Besar di Erasmus University, Rotterdam, Negeri Belanda, saya sempat membaca majalah kampus itu, *Erasmus Magazine* (edisi Nov. 2013). Di sana, saya menemukan suatu hal yang sungguh membanggakan. Ternyata di kampus itu, ada satu bangunan – flat untuk mahasiswa internasional - dengan nama *Hatta Building*. Nama “Hatta” itu diambil dari Mohammad Hatta (1902-1980) – salah satu Dwi-Tunggal Proklamator kemerdekaan negeri kita tercinta, Indonesia.

Yang menarik untuk dipertanyakan adalah mengapa nama Hatta yang dipilih untuk gedung itu? Dari puluhan ribu alumni Erasmus University Rotterdam tentu saja Hatta bukan satu satunya tokoh besar. Memang Mohammad Hatta “hanyalah” satu dari sekian banyak *notable alumni* universitas itu. Dalam bidang politik

setidaknya ada alumni yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri – termasuk Hatta sendiri. Bahkan di bidang studi Hatta, yaitu Ilmu Ekonomi, banyak alumni Rotterdam yang menjadi tokoh internasional – termasuk pemenang Hadiah Nobel Jan Tinbergen. Belum lagi sejumlah Menteri, CEO Korporasi Internasional dan Guru Besar Ilmu Ekonomi ternama di dunia turut melengkapi pelangi alumni Rotterdam.

Tentu saja pihak Erasmus University tidak gegabah dalam memilih nama untuk bangunan (wisma mahasiswa internasional) yang begitu stratejik. Hatta memang tidak berhasil merampungkan studi doktoranya di sana – karena aktivitasnya di kancah politik – beliau menyelesaikan semua tugas perkuliahan – dan bahkan mempelajari secara intensif berbagai cabang ilmu ekonomi - kecuali disertasi. Sehingga beliau “hanya” menyandang gelar doktorandus (Drs. – calon doktor). Segera setelah merampungkan studi HBS di Batavia pada tahun 1921, Hatta berangkat ke Belanda untuk belajar di *Netherlands School of Commerce (Nederlandsche Handels-Hoogeschool)* – cikal bakal Fakultas Ekonomi Erasmus University, Rotterdam. Beliau belajar di sana selama 11 tahun sebelum mendapatkan gelar Drs-nya itu. Jika dinilai dari pencapaian akademiknya mungkin banyak orang yang akan menilai beliau sebagai sosok biasa-biasa saja. Tetapi jika kita cermati sepak terjang beliau di kancah politik pra-kemerdekaan maka keputusan *Erasmus University* untuk menghargai beliau tidak dapat diragukan.

Belum lagi setahun belajar di Belanda, Hatta telah menjadi tokoh Perhimpunan Indonesia (PI) – sebuah perkumpulan kebangsaan di sana. Hatta selama 4 tahun (1922-1925) berperan sebagai Bendahara, dan 5 tahun selanjutnya sebagai Ketua hingga tahun 1930. Hatta juga aktif dalam Liga Mahasiswa Anti Imperialisme – yang mempertemukannya dengan tokoh-tokoh seperti Nehru dan Ho Chi Minh. Seruan kemedekaan untuk Indonesia diungkapkan

Hatta secara lantang dan terbuka dalam berbagai kesempatan, terutama melalui majalah PI, "Indonesia Merdeka". Pada tahun 1927, Hatta sempat dipenjarakan oleh Pemerintah Belanda selama hampir 6 bulan. Pembelaannya yang bertajuk "Indonesia Vrij" dalam sidang di pengadilan saat itu sempat menggetarkan banyak pihak – dan bahkan menarik simpati dari banyak kalangan terdidik di Belanda.

Sekembalinya ke Indonesia jejak perjuangan Hatta tidak tertahan lagi, hingga berpundak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bersama Sukarno. Dalam kurun waktu 1932-1945 serangkaian pemenjaraan dialami oleh Hatta. Bahkan di tahun 1948 pun Hatta sempat ditahan di Pulau Bangka selama enam bulan – pasca serangan Belanda ke Yogyakarta Desember 1948. Selanjutnya dari 23 Agustus 1949 – 2 November 1949 Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia di Konferensi Meja Bundar – yang berujung pada penyeraham kekuasaan sepenuhnya oleh Belanda ke Indonesia. Sejak itu relasi Hatta dengan Sukarno dan Republik mengalami pasang surut sampai akhirnya beliau mengundurkan diri dari Jabatan Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 – karena kecewa pada Demokrasi Terpimpin yang diusung oleh Sukarno.

Meskipun prestasi politik dan intelektualnya sama sekali tidak sederhana, Hatta adalah sosok yang bergaya hidup sangat sederhana. Sungguh sebuah "ironi" yang ketika seorang Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama Republik ini tidak mampu membeli sepatu "Bally" yang diidamkannya karena dirasa terlalu mahal. Tetapi justru sosok sederhana inilah yang mendapatkan tempat terhormat di almamaternya, sebuah universitas dengan reputasi yang serba hebat. Marilah kita belajar dari kesederhanaan hidup dan ketidak-sederhanaan karya seorang Mohammad Hatta.

Berbagi Risiko Tata Kelola Riset*

Kritik Johanes Eka Priyatma (JEP) di KOMPAS (27/9/2016) terhadap rekomendasi Diskusi Kompas tentang kuantitas, kualitas dan kontribusi riset untuk pembangunan nasional menarik untuk ditanggapi. Intinya, JEP memandang bahwa solusi yang ditawarkan oleh Diskusi Kompas itu tidak menyentuh akar masalah. Sebagai alternatif, JEP menawarkan pendekatan yang lebih struktural dan komprehensif. Menurutnya persoalan riset di Indonesia tidak cukup dianalisis dengan hanya pendekatan input sumber daya, seperti dana, sumber daya manusia, regulasi, dan agenda jangka panjang. JEP menunjukkan bahwa peningkatan anggaran riset dari pemerintah telah terbukti tidak serta-merta meningkatkan kualitas riset. Demikian pula halnya, penambahan jumlah peneliti ternyata juga tidak mengungkit kinerja riset. Bagi JEP kegiatan riset harus dipandang sebagai sebuah realitas yang tidak terpisah dan sebagai akibat dari suprastrukturnya - yakni strategi pembangunan khususnya perihal inovasi. JEP menilai kegiatan riset yang ada tidak terkait langsung dengan kegiatan inovasi di dunia nyata (baca: industri). Sebagian besar kegiatan riset, terutama di universitas, hanya berorientasi pada pengakuan akademik. Singkatnya, riset tidak berkembang karena memang tidak dibutuhkan.

* Dimuat di Harian KOMPAS 20 Oktober 2016

Gagasan JEP di atas merangsang kita untuk mengernyitkan dahi. Sayangnya, alih-alih memberikan jalan keluar yang sederhana saya khawatir JEP justru mengajak kita masuk ke palung yang dalam dan gelap. Dalam kondisi saat ini, mengganti paradigma pembangunan mungkin sama muskilnya dengan memindahkan gunung batu. Pengembangan riset harus ditempuh melalui cara-cara yang lebih pragmatis. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memutus gejala saling asing (*mutually exclusive*) di antara kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk baru (inovasi) oleh industri. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan tentang tata kelola riset yang berbasis pada prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) di antara para pihak.

Saling Asing

Dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge economy*) universitas merupakan unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah (Lendel, 2010). Idealnya kegiatan penelitian universitas berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Salah satu bidang yang memungkinkan terjadinya kontribusi penelitian terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah adalah bidang pangan. Pertumbuhan bisnis dan industri pangan yang sangat pesat seiring dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kesejahteraan serta daya beli masyarakat memerlukan pasokan pengetahuan, teknologi dan produk pangan baru. Sayangnya, dalam amatan penulis ada gejala saling asing (*mutually exclusive*) yang akut antara kegiatan penelitian di universitas dan praksis pengembangan oleh pelaku usaha. Kaitan antara riset pangan universitas atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha sangat minimal.

Pengalaman di Jawa Tengah, misalnya, menunjukkan bahwa telah berlangsung proses saling asing antara kegiatan penelitian pangan oleh universitas, di satu sisi dan pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha, di sisi lain. Para pelaku usaha berhasil mengembangkan atau merekacipta banyak produk pangan baru yang bukan saja inovatif tetapi juga bernilai tambah tinggi dan sekaligus berhasil di pasar (Widianarko, 2011). Produk pangan yang berhasil dikembangkan oleh pelaku usaha tanpa melalui jalur penelitian formal – oleh universitas – antara lain *ceriping, gethuk, sirup berbasis buah lokal, bandeng duri lunak, marning, "dodol" tomat, manisan buah, olahan tahu dan aneka minuman serbuk* – untuk menyebut beberapa. Produk-produk seperti Gethuk Trio Magelang, Bandeng Duri Lunak Semarang, Marning Boyolali, Gethuk “Putih” Salatiga, Tomat Rasa Korma (TORAKUR) Bandungan dan Tahu Bakso Ungaran berhasil menjadi *icon* daerahnya masing-masing. Salah satu rahasia di balik keberhasilan para *local genius* mengembangkan produk-produk pangan lokal tersebut adalah kemampuan mereka dalam mendengar suara konsumen. Namun, dari perspektif penelitian sebenarnya yang mereka lakukan sebagian besar masih bertumpu pada metode coba-coba (*trials and errors*) yang diramu dengan intuisi bisnis.

Berbagi Risiko

Dari tahun ke tahun pendanaan penelitian yang tersedia untuk universitas cenderung terus meningkat dan sudah selayaknya tidak menjadi masalah lagi. Yang diperlukan sekarang adalah penetapan prioritas penelitian yang berorientasi pada produk. Gejala saling asing antara penelitian universitas dan pengembangan produk komersial bersumber pada ketiadaan prinsip *risk sharing*. Hal ini menyebabkan pelaku penelitian menghasilkan penelitian yang tidak memiliki nilai terap, sehingga hasil penelitiannya tidak *accountable*. Untuk itu diperlukan sebuah tata kelola penelitian baru yang didasarkan pada prinsip *risk sharing*.

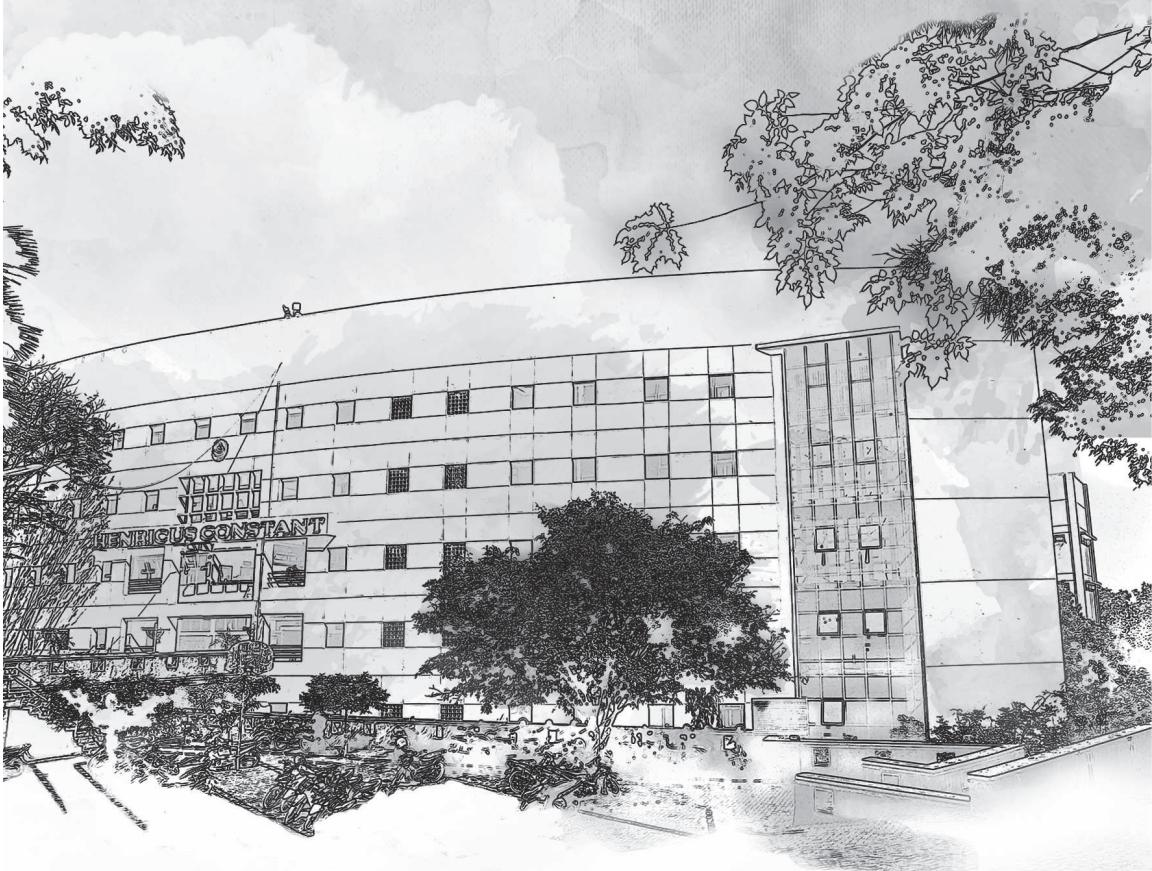
Kerjasama penelitian berbasis *risk sharing* memang merupakan tuntutan alamiah dari *knowledge economy*. Dalam pendekatan baru ini institusi pelaku penelitian dituntut untuk mampu menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain kegiatan penelitian dan ilmiah harus bermuara pada (*monetary*) *value creation*. Di samping itu, dalam *knowledge economy* dalam setiap kerjasama maka para pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Hal ini tentu juga berlaku bagi para pekerja ilmu yang bernaung di universitas. Definisi formal untuk *risk-sharing agreement* dalam kerjasama penelitian menurut de Povourville (2006) adalah “*kontrak di antara dua pihak yang sepakat untuk bertransaksi dengan kesadaran penuh bahwa ada ketidakpastian (uncertainty) yang melekat pada hasil dan nilai akhir dari produk penelitian yang dihasilkan*”. Dengan demikian kedua pihak siap menerima imbalan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sesuai dengan status produk penelitian yang dihasilkan. Jika hasil penelitian terbukti memiliki nilai komersial yang tinggi maka pihak pemberi proyek harus bersedia memberikan imbalan (sesuai kesepakatan), sedangkan jika terjadi yang sebaliknya maka pihak pelaksana proyek harus bersedia menerima sanksi.

Model tata kelola penelitian berbasis *risk-sharing* di atas tentu saja sangat berbeda dari kelaziman pelaksanaan proyek penelitian di universitas hingga saat ini. Kebiasaan yang berlaku selama ini masih mengasumsikan bahwa setiap pelaku kegiatan penelitian – bagaimanapun status hasilnya – sudah selayaknya mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Dalam kerangka ini penetapan imbalan dan sanksi menjadi hal yang sangat strategik. Imbalan (finansial) yang disediakan untuk produk pangan yang berhasil harus menarik para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian. Sanksi (finansial) yang dapat dibebankan pada peneliti yang gagal menghasilkan produk yang sukses adalah peniadaan imbalan bagi jerih payahnya. Meskipun demikian,

direkomendasikan agar seluruh biaya penelitian tetap ditukar (*at cost*) oleh pemberi proyek. Dengan tata kelola baru ini setiap kegiatan penelitian pangan dengan sendirinya akan *accountable* dan berpeluang besar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berhasil di pasar. Model tata kelola penelitian berbasis *risk sharing* muncul sebagai tuntutan alamiah dari *knowledge economy*. Sebagai paradigma baru, model tata kelola ini menuntut pelaku penelitian untuk menciptakan nilai ekonomi dari kegiatannya. Pada akhirnya kegiatan penelitian diharapkan bermuara pada (*monetary*) *value creation*.

Wacana 3

Kecendekiawan



Globalisasi dan Inlanderisme

Postulat Thomas Friedman (2006) bahwa “dunia yang datar” (*The World is Flat*) tampaknya memang sebuah kenyataan. Konvergensi sistem ekonomi dan teknologi telah menciptakan perekonomian dunia yang sarat saling keterkaitan antar negara. Akibatnya, ketika krisis ekonomi melanda suatu negara maka dampaknya akan merambah negara lain dan bahkan seluruh dunia – jika ukuran ekonominya sangat besar seperti Amerika Serikat (AS) atau China. Kelesuan ekonomi Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika perekonomian global itu. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama perhatian kita harus berpindah dari kelesuan ekonomi AS, ke krisis Yunani, dan yang terkini adalah devaluasi mata uang China, Yuan.

Semua kejadian itu secara langsung maupun langsung berdampak ke negeri kita. Dalam kasus devaluasi Yuan, misalnya, dua negara ASEAN yang disebut-sebut paling menjadi korban adalah Malaysia dan Indonesia. Ringgit dan rupiah mengalami depresiasi yang besar terhadap dolar AS. Bahkan perekonomian Indonesia seolah juga tersandera oleh keputusan tentang perubahan suku bunga oleh Bank Sentral AS (the Fed). Singkatnya, dalam proses globalisasi ekonomi ini, tidak ada negara yang bisa hidup dalam ruang hampa. Lebih jauh lagi, perekonomian dunia akan terus berubah seiring waktu. Krisis bisa terjadi susul menyusul. Tidak

ada lagi apa yang disebut sebagai stabilitas, yang ada adalah perubahan dinamik. Keadaan inilah yang oleh para ekonom China sebagai kondisi “*new normal*”.

Kondisi ini terlukiskan dengan baik oleh sebuah “puisi” yang tertulis di lantai sebuah pabrik suku cadang mobil di Beijing - hanya beberapa hari setelah pemerintah China secara formal bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), 11 Desember 2001 (Friedman, 2006). Puisi itu berbunyi

Setiap pagi di Afrika, seekor rusa bangun.*

Dia tahu dia harus lari lebih cepat dari singa yang tercepat atau dia akan dimangsa.

Setiap pagi seekor singa bangun.

Dia tahu dia harus mendahului rusa yang berlari paling lambat atau dia akan mati kelaparan.

Tidak penting apakah anda seekor singa atau seekor rusa.

Begitu matahari terbit, anda lebih baik segera berlari.

Sang pemilik pabrik jelas menyadari sepenuhnya kehadiran globalisasi sebagai sebuah keniscayaan. Dan sebagai seekor “rusa” dia harus segera berlari jika tidak mau dimangsa oleh “singa” globalisasi. Suka tidak suka, globalisasi memang telah hadir dan menancapkan pengaruhnya pada perikehidupan (*livelihood*) seluruh warga negara-negara yang mempercayakan nasibnya pada rejim globalisasi- tanpa mengecualikan Indonesia.

Untuk dapat berhasil dalam dunia yang semakin “rata”, terhubung dan saling tergantung, maka diperlukan kesigapan – seperti “rusa” yang harus berlari lebih cepat daripada “singa”. Kesigapan

* Terjemahan bebas untuk kata “gazelle” dalam Bahasa Inggris.

dalam mengarungi dunia saat ini dan masa depan mensyaratkan kemandirian dan kreativitas. Untuk memiliki kemandirian seseorang harus menguasai keahlian tertentu. Sedangkan kreativitas idealnya telah terasah selama proses belajar mengajar di universitas – tentu saja bagi mereka yang mau memanfaatkan kesempatan yang tersedia, baik kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Di luar kemandirian dan kreativitas, masih ada satu lagi yang diperlukan untuk bisa berhasil dalam globalisasi, yaitu kepercayaan diri – terutama ketika kita harus menghadapi pesaing berbilang bangsa. Kepercayaan diri dalam interaksi antar bangsa menuntut kita untuk membebaskan diri dari apa yang disebut oleh salah satu *founding father* negeri ini, Mochamad Hatta, sebagai mentalitas *inlanderisme* bekas bangsa terjajah. Pengidap *inlanderisme* selalu merasa kagum - dan tentu selanjutnya gentar – terhadap orang asing (terutama yang berkulit putih). Dalam pengamatan dan pengalaman saya selama ini, salah satu kunci pendobrak *inlanderisme* adalah penguasaan bahasa internasional. Penguasaan bahasa internasional akan semakin menguatkan kepercayaan diri kita – dan tentu saja akan berimbang pada kemandirian kita.

Negeri Tanpa Prioritas*

Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least." — Johann Wolfgang von Goethe

Nege ri ini memang sungguh unik. Ketika sebagian besar rakyat berteriak tentang mahalnya harga tempe dan tahu, ternyata yang muncul justru mobil murah. Ketika anggaran belanja negara sedang berdarah-darah oleh subsidi BBM, lagi-lagi jawabannya kebijakan mobil murah. Di tengah kriris infrastruktur (jalan) yang begitu parah, sekali lagi justru kebijakan mobil murahlah jawabannya. Rupanya, prioritas ñ atau lebih tepatnya penetapan prioritas seolah keahlian langka di negeri ini.

Orang umumnya menyadari penting prioritas, tetapi menetapkan prioritas adalah persoalan lain. Ungkapan Goethe pada awal tulisan ini mengingatkan kita untuk tidak terjerembab dalam penentuan prioritas: jangan pernah sekalipun mengorbankan hal yang paling penting demi hal yang paling tidak penting. Sejatinya, banyak yang tidak menyadari bahwa menetapkan prioritas bukan soal mudah.

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 3 Oktober 2013

Pada ranah pribadi, menyepelekan atau gegabah menetapkan prioritas bisa berujung pada kerugian hingga kebangkrutan. Namun, menyepelekan penetapan prioritas pada ranah korporasi dan publik bisa berdampak luas, dari merugikan lembaga, hingga membangkrutkan negara yang pada gilirannya menyengsarakan rakyat. Karena itu, para pengambil keputusan, baik dalam institusi pemerintah, nonpemerintah, dan korporasi sudah selayaknya memiliki keahlian penetapan prioritas.

Bisa Dipelajari

Kabar baiknya, penetapan prioritas bisa dipelajari. Kabar buruknya, banyak orang enggan bersusah-payah mempelajari. Mereka lebih suka mengandalkan intuisi. Memang dalam rentang panjang evolusi, mengarungi ketidakpastian kehidupan, manusia terlatih untuk menentukan pilihan berdasarkan naluri.

Dalam kajian sosiobiologi diyakini bahwa keputusan seseorang untuk menolong orang lain sama sekali bukan berarti manusia pada dasarnya baik, melainkan senantiasa terombang-ambing di antara dua pilihan: menguntungkan diri sendiri (*selfishness*) atau memberikan kesempatan pada orang lain (*altruism*).

Seiring dengan peri kehidupan manusia yang makin kompleks maka penetapan prioritas juga makin tidak sederhana. Prioritas sudah bukan lagi ipermainanâ naluri atau intuisi belaka. Para pengambil keputusan pada semua aras harus menerima kenyataan bahwa penetapan prioritas adalah masalah rumit dan sulit.

Yang mengejutkan, tata nilai ternyata adalah pilar utama penetapan prioritas. Artinya, penetapan prioritas adalah proses sarat nilai. Suatu prioritas tidak dapat ditetapkan dalam ruang hampa tanpa ada nilai yang dibela, diugemi. Neutrality is immoral! begitu kata Profesor Andi Hakim Nasoetion, mantan rektor Institut Pertanian

Bogor, dalam perjumpaan dengan penulis 22 tahun lalu. Pilihan (prioritas) menuntut pemihakan terhadap nilai tertentu, jika Anda tidak mau dicap tunamoral.

Dalam studinya pada ranah pelayanan kesehatan, Sibbald dan kawan-kawan dari Universitas Toronto (2009) menemukan bahwa para pengambil keputusan berjuang dalam belitan kesulitan untuk menetapkan prioritas yang tepat. Terutama karena tidak ada konsensus tentang nilai pemandu utama keputusan mereka. Tiga nilai yang seringkali menjadi panduan penetapan prioritas adalah (1) efisiensi, (2) kesetaraan, dan (3) keadilan. Tantangannya adalah memadukan tiga nilai itu tanpa ada yang dianaktirikan atau dikorbankan.

Prasyarat Kunci

Penetapan prioritas acap sangat sulit ketika ada nilai yang berbenturan. Untuk memilih nilai yang paling sesuai, diperlukan kepekaan supaya bisa menangkap suara segenap pemangku kepentingan. Prioritas tidak bisa terasing dari konteks. Pejabat atau pimpinan dalam menetapkan prioritas harus mampu benar-benar menemukan apa yang sedang berkecamuk di hati dan pikiran pemangku kepentingan.

Karenanya pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) dan dialog (rembukan) adalah dua prasyarat kunci. Terlebih dari itu prioritas akan dapat diterima dengan baik jika ditetapkan melalui proses yang jelas, dibarengi manajemen informasi transparan. Hanya dengan begitu akan terjadi kepemilikan terhadap prioritas itu oleh segenap pihak.

Berdasarkan sejumlah studi yang mereka telaah, kelompok peneliti Universitas Toronto itu menemukan bahwa selain nilai, kepemimpinan merupakan kunci berikutnya. Singkatnya, untuk

menetapkan prioritas yang tepat diperlukan landasan nilai dan kepemimpinan bermutu.

Mungkin dua unsur itulah yang menjadi sumber kebuntuan di negeri ini. Begitu banyak prioritas yang dianggap keliru, tidak menyentuh kebutuhan hakiki rakyat. Salah prioritas hanyalah symptom dari ikankerî kepemimpinan. Negeri ini miskin pemimpin yang berani memperjuangkan nilai yang menjadi suara hati rakyat.

Saat kita selaku rakyat kembali memiliki kesempatan memilih pemimpin: DPR dan presiden. Jangan terlalu hiraukan wajah cantik dan ganteng yang terpampang di ribuan baliho. Telusuri rekam jejak mereka dalam bersikap dan bertindak, apakah mencerminkan suara hati rakyat kebanyakan. Cermati pula nilai apa saja yang pernah mereka junjung, termasuk bagaimana mereka memperjuangkan nilai-nilai itu. Kalau Anda tidak terlalu yakin kualitas itu melekat pada pribadi calon maka segera palingkan pilihan kepada calon lain.

Raksasa yang Mengubur Diri*

Jika kita cermati, ternyata pemerintahan baru yang dinahkodai oleh Presiden Jokowi belum menawarkan arah masa depan yang jelas untuk negeri ini. Kita semua, warga bangsa ini, masih harus menerima sajian mozaik ketidakpastian – hampir menyeluruh di semua bidang kehidupan. Meskipun ada sejumlah tanda-tanda ke arah yang baik, tapi masih begitu banyak pula batu sandungan yang menghambat gerak langkah negeri ini menuju kondisi lebih baik. Sebagai bangsa optimisme kita sempat membuncah ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung mampu menghasilkan Presiden pilihan rakyat – yang benar-benar berasal dari akar rumput. Hati kita juga dipenuhi kebanggaan menyaksikan keteguhan dan integritas Komisi Pemilihan Umum serta Mahkamah Konstitusi dalam mengawal proses serta sengketa Pilpres itu. Kehadiran Presiden Jokowi dalam dua pertemuan antar bangsa yang strategik, APEC dan G20, sesaat setelah dilantik – sempat menuai sambutan yang luar biasa dari para pemimpin dunia dan serta merta melambungkan harapan masa depan Indonesia yang gilang gemilang.

Namun, hanya dalam hitungan bulan, semua optimisme itu kini tersandera - untuk tidak mengatakan dibegal - di tengah jalan. Sejumlah kejadian yang melontarbalikkan optimisme kita sebagai

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 25 April 2015

bangsa “tiba-tiba” muncul silih berganti. Mulai dari “drama” “cicak versus buaya” jilid kedua yang merupakan hasil ikutan rencana pengangkatan Kapolri, hingga peragaan inkonsistensi kebijakan dalam perkara peningkatan uang muka kendaraan para wakil rakyat. Sampai detik ini, boleh dibilang parlemen kita (DPR) belum berjalan secara normal. Perpecahan dalam tubuh partai, munculnya fraksi tandingan, serta rebutan ruangan di Gedung DPR-MPR mewarnai wajah bopeng kehidupan ketatanegaraan kita. Seiring dengan wajah politik yang buram, ternyata keadaan ekonomi Indonesia juga menampilkan wajah suram. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, juga memprihatinkan. Yang terkini, kita baru saja disuguhi perdebatan tentang “petugas partai” yang mengusik pemahaman dan keyakinan kolektif kita tentang demokrasi. Singkatnya, potret negeri kita yang semula begitu *glittery* (bersinar) hanya dalam sekejap kini menjadi begitu *gloomy* (buram).

Gambar buram Indonesia ternyata juga tertangkap oleh lensa pihak luar. Dalam pengamatan mereka, Indonesia adalah bak raksasa yang mengubur dirinya sendiri. Salah satunya tercermin dari tulisan Cameron White di *The Wall Street Journal*, 9 April 2015 yang lalu. Cameron menuliskan sebagai berikut.

“On paper, Indonesia should be a major global player. It has the fourth-largest population in the world, a rich supply of natural resources and a strategic location between the Indian and Pacific oceans, with more than half the world’s international shipping passing through its waters. Yet since gaining independence....., Indonesia has focused more on building unity among its roughly 17,000 islands than on expanding its influence over the outside world.”

Negeri kaya yang seharusnya bisa menjadi raksasa dunia itu ternyata senantiasa menghabiskan daya-upaya dan energi untuk berkutu dengan dirinya sendiri. Dalam tulisan yang sama,

Cameron menyebut bahwa deklarasi Indonesia sebagai “poros maritim global” (*a global maritime fulcrum*) oleh Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN di Naypyidaw, November tahun lalu, sangat boleh jadi akan menjadi slogan kosong belaka. Hingga saat ini, belum ada dokumen yang memerikan kebijakan baru itu secara rinci. Selain itu, dunia maritim Indonesia masih tersandera oleh kondisi infrastruktur yang masih sangat miskin. Kendala inilah yang membuat kebijakan maritim Indonesia masih akan cenderung terlalu melihat ke dalam (*inward looking*). Ambisi untuk menjadi pemain global maritim dunia masih terganjal oleh rintangan dakhil – yang ada dalam diri kita sendiri.

Pelajaran apa yang bisa kita petik dari keadaan ini? Argumen klasik yang sering menggoda kita untuk mengaminiinya adalah bahwa tidak ada perubahan yang bisa berlangsung secara instan. Seorang pemimpin yang begitu dielu-elukan dan diharapkan rakyat (*digadhang-gadhang*) seperti Jokowi bukan jaminan untuk terjadinya transformasi secara segera. Dalam cara padang ini, ketidakpastian yang sedang melanda Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini adalah perwujudan *adagium* lama “*there is no free lunch*”. Sebagai penghiburan, maka kita bisa berandai-andai bahwa Presiden dan jajarannya harus bekerja keras dulu sebelum arah kemajuan mulai menjadi jelas.

Yang mengkhawatirkan adalah jika yang sedang berlangsung ini justru menjadi bagian dari proses penguburan diri sang raksasa, Indonesia. Penguburan diri ini ditandai oleh kebijakan yang inkonsisten dan maju mundur - tak bergerak ke mana-mana. Sebut saja kasus Komjen Budi Gunawan (BG). Drama pencalonan BG sebagai Kapolri yang dianulir sendiri oleh pengusulnya (Presiden) meskipun yang bersangkutan lolos uji *fit-and-proper* oleh DPR – apapun latar belakangnya (termasuk keberatan masyarakat) - merupakan pertunjukan inkonsistensi kebijakan yang begitu

gamblang. Lebih menyedihkan lagi, alih-alih menuntaskan dugaan persoalan hukum yang masih melingkupinya, kini BG justru diusulkan menjadi Wakapolri (Suara Merdeka, 22/4/15). Sungguh sebuah peragaan kebijakan yang maju-mundur.

Dalam literatur tentang kepemimpinan dengan mudah dapat kita temukan bahwa konsistensi kebijakan adalah senjata utama dalam pertempuran untuk bertahan hidup (*the battle for survival*) sebuah organisasi. Inkonsistensi hanya akan menurunkan tingkat keyakinan para pengurus dan anggota organisasi. Untuk menanggulanginya, Robert Whipple (2002) dengan lugas menyatakan "*It is up to leaders to prevent this*". Tanpa keberanian untuk konsisten, maka pemimpin hanya akan menjerumuskan organisasinya untuk tidak bergerak kemana-mana dan menghambu-hamburkan energi belaka. Menyikapi keadaan ini masyarakat sipil - terutama kaum terdidik - harus terpanggil untuk turut mencegah penguburan diri raksasa Indonesia berlanjut. Kelompok terdidik sudah seharusnya mengambil peran dalam menerobos kebuntuan itu. Langkah itu bisa dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Dalam kapasitas masing-masing marilah kita turut serta berperan sebagai *problem solver* (pemecah masalah) bukan *trouble maker* (pembuat masalah) di lingkungan kita masing-masing. Semakin banyak pemecah masalah di negeri ini, maka negeri ini akan terbebas dari "kutukan" untuk selalu berkutat dengan persoalan dirinya sendiri. Terus berkutat dengan masalah kita sendiri hanyalah akan menjerembabkan bangsa ini sebagai penonton yang tidak berdaya dalam kancah persaingan global.

Pemimpin Pembelajar*

Transisi kepemimpinan tertinggi negeri ini - melalui perebutan kekuasaan yang berlabel demokrasi - ternyata masih menyisakan "luka-luka". Dua kekuatan politik, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih terlibat dalam sebuah proses saling mangsa (predasi), bukan kompetisi - apalagi sekedar kontes. Bukan itu saja, kita juga baru saja disuguhi pameran kekerasan atas nama keretakan dalam tubuh partai politik, mulai dari aksi banting meja hingga aksi penyerbuan dan baku pukul. Belakangan perbeutan keuasaan itu merambah ke dalam tubuh partai dan menghasilkan wajah politik yang serba tandingan. Berkaca pada semua kekisruhan itu tentu tidak berlebihan jika kita meragukan kualitas para pemimpin (politik) negeri ini. Pertanyaan menggelitik kita selanjutnya adalah proses pembentukan kepemimpinan seperti apa yang diperlukan agar negeri ini bebas dari pemimpin-pemimpin macam itu.

Di tengah kegalauan itu, saya beruntung mendapat kesempatan untuk membaca buku "*Mendidik Pemimpin dan Negarawan*" (MPN) karya A. Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi. Buku ini mengulas sosok ideal pemimpin dan pendidikan calon pemimpin *ala Platon* - seorang pemikir besar Yunani kuno.

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 30 Desember 2014

Sosok Pemimpin

Mengacu Platon, penulis MPN menyatakan bahwa “*..pemimpin itu sekaligus bisa dan tidak bisa diprogramkan! Leader tidak bisa diprogramkan karena ia adalah soal bakat, karunia, rahmat yang diberikan dari alam atau yang illahi. Namun dalam arti tertentu juga bisa deprogram manakala pendidikan dijalankan atas dasar seleksi. Artinya orang-orang berbakat diseleksi, dikumpulkan, dididik dengan program tertentu. Dan dalam masa pendidikan itupun masih dilakukan seleksi sedemikian rupa sehingga nantinya yang benar-benar memiliki bakat dan mampu mengaktualkan bakatnya lah yang muncul sebagai pemimpin*”.

Dengan demikian, asal-asul seseorang menjadi pemimpin bukanlah nafsu atau syahwat untuk berkuasa – melainkan karena “dipaksa” menjadi pemimpin. Mereka yang berbakat alamiah sebagai pemimpin tidak berambisi menjadi pemimpin, sehingga tongkat kepemimpinannya hanya semata-mata tongkat yang akan segera dialihkan manakala sudah ada peluang untuk kembali lagi kepada yang selalu mereka cintai, yaitu pengetahuan.

Platon menawarkan pendidikan (*paideia*) untuk melahirkan pemimpin yang negarawan (*kalokāgathos*) untuk mereformasi masyarakatnya. Reformasi itu bisa terjadi karena pemimpin-filsuf ala Platon adalah negarawan yang harus mendidik warganya. Platon adalah pemikir pertama yang menyajikan model politik dan administrasi yang sistematik untuk mengatur perikehidupan dalam sebuah negara yang ideal (*ideal state*). Tujuan (*telos*) negara seperti itu adalah mendidik warganya agar menjadi baik. Jadi negara memiliki fungsi moral dalam perikehidupan warganya. Dalam negara yang seperti itulah maka para pemimpin (politisi) harus betindak sebagai penguasa negara yang ideal, karena mereka memiliki pengetahuan (*episteme*) tentang segala bentuk kebaikan – sebagai tujuan negara. Dalam negara ideal tugas pemimpin adalah mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan mengawal

pengembangan pemikiran. Karena tugas pengendali adalah sangat penting maka diperlukan filsuf untuk menjalankannya.

Pendidikan Calon Pemimpin

Menurut Platon jati diri pendidikan adalah *paideia* (pembudayaan). Pendidikan selalu merupakan upaya seleksi mendidik anak-anak terbaik supaya bisa meneruskan proses pembudayaan. Paradigma yang ditawarkan oleh Platon adalah sebuah sekolah kader: mendidik dengan seleksi ketat dan memberikan kurikulum yang terstruktur baik supaya kelak mereka menjadi pemimpin. Pendidikan untuk calon pemimpin adalah pendidikan yang elitis, hanya mereka yang berbakat yang akan dididik. Filsafat pendidikan Platon memiliki sejumlah elemen, yaitu (1) pendidikan sebagai pembudayaan, (2) pendidikan usia dini yang merujuk pada sensibilitas prarasional (melalui mitos dan dongeng, paradigma teologis yang lurus, pendidikan seni), (3) pendidikan olah fisik untuk pradewasa, (4) ilmu-ilmu abstrak (sains dan matematika) untuk usia dewasa.

Pendidikan calon pemimpin *ala* Platon dikhawasukan untuk calon punggawa-pemimpin yang akan memiliki tugas menjaga dan melindungi negara – semacam campuran pamong praja dan tentara. Demi memenuhi kebutuhan itu mesti dipilih anak-anak yang memiliki bakat alamiah menjadi seorang filsuf – mereka yang sejak kecil ditengarai punya potensi yang dapat diasah maksimal menjadi sosok pemimpin ideal. Anak-anak yang terpilih memiliki kecerdasan aprehensi – suatu kecerdasan non sadar, non reflektif yang bersifat seketika. Selain itu juga diperlukan bakat-bakat alam lain yaitu pecinta belajar dan pecinta kebijaksanaan. Dalam ancangan Platon, hanya mereka yang memiliki sifat filsuf yang bisa menjalankan fungsi sebagai pemimpin-filsuf.

Gagasan penciptaan pemimpin-filsuf Platon memang sebuah utopia. Dari *the Republic*, “terbaca” bahwa gagasan politik Platon adalah bahwa negara harus dipimpin oleh filsuf dengan pemahaman yang mumpuni tentang prinsip-prinsip moral yang harus menjadi dasar tatanan sosial. Dalam kenyataanya, ide Platon untuk menghasilkan pemimpin-filsuf bisa dibilang gagal total. Meskipun cita-cita itu bertahan, dan *Academia* miliknya terus mendiseminasikan pendidikan yang diperlukan untuk membentuk pemimpin-filsuf, tetapi Platon sampai pada titik harus mengakui bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa adalah menghasilkan pemimpin-filsuf adalah cita-cita yang tidak terjangkau. Meskipun demikian, cita-cita itu bertahan, *Academia* milik Platon terus mendiseminasikan pendidikan yang diperlukan untuk membentuk pemimpin-filsuf. Dan jejak konsep Platon dalam mendidik calon pemimpin masih dapat ditemukan jejaknya dalam pendidikan Eropa.

Utopia?

Terlepas bahwa gagasan pemimpin-filsuf Platon adalah sebuah *utopia*, gagasan ini menarik diperbincangkan justru karena ia menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dari model kepemimpinan yang dihasilkan dari proses demokratis. Bisa dikatakan Platon memang bukanlah sosok seorang demokrat, dan buah pikirannya pun tidak mencerminkan benih-benih pemikiran demokrasi. Dia memandang aristokrasi akan menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih baik, karena hegemoni *demos* bisa menjadi bencana bagi seluruh elemen masayarakat. Konsepsi Platon tentang kehidupan manusia yang baik berbeda secara kontras dari konsepsi dominan tentang kehidupan yang baik yang dipromosikan oleh demokrasi kapitalis. Dan justru karena itulah mengapa buku Platon perlu dibaca oleh para pembelajar kepemimpinan saat ini. Platon menantang, dengan tanpa

kompromi, keras pandangan-pandangan baku tentang demokrasi dan cara hidup yang berasosiasi dengannya.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Platon tentang pemimpin-filsuf sebagai perwujudan sosok manusia utama terasa menemukan relevansinya ketika kita terus-menerus disuguhi wajah kepemimpinan Indonesia mutakhir yang penuh bopeng. “Kerusakan” wajah kepemimpinan Indonesia saat ini yang jelas-jelas didominasi oleh rezim *epithumia* yang tidak peduli pada upaya pencarian *bonum commune* (kebaikan bersama). Dalam MPN disebutkan bahwa di negeri ini rezim demokrasi yang berlaku adalah rezim *epithumia* (nafsu akan kuasa dan uang) yang efek destruktifnya telah dan masih kita rasakan. Tentu wajar jika kemudian kita mulai mempertanyakan kelayakan kualitas para pemimpin politik yang bercokol sekarang dan bagaimana proses menjadikan mereka pemimpin.

Kepemimpinan yang Autentik*

“..I don’t want clever, conversation, I never want to work that hard, I just want someone, that I can talk to, I want you just the way you are.”
 (“Just the way you are”, Billy Joel)

“**B**lusukan” mendadak jadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia. Terimakasih kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang telah melakukannya dan berperan dalam memperkenalkan istilah itu. Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ikut “blusukan” ke kampung nelayan di Tangerang belum lama ini. Uniknya, alih alih mendapatkan acungan jempol – seperti Jokowi, ketika “blusukan” SBY malah tidak dianggap dengan antusias. Publik cenderung skeptis, meragukan program “blusukan” SBY.

Tanpa menafikan kenyataan bahwa Jokowi saat ini tengah menjadi sosok *media darling*, serangkaian “blusukan” Jokowi sejak awal masa jabatannya sebagai orang nomor satu DKI Jakarta memang terkesan otentik - tidak di buat-buat. Sigap dan tanggap bertandang ke pemukiman warga miskin yang terlanda bencana kebakaran atau banjir dengan tanpa ekspresi canggung

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 18 Januari 2013

memang sungguh menguatkan kesan otentik itu. Ingat saja, hanya beberapa jam selepas pulang dari pesta rakyat menyongsong 2013 di jantung kota Jakarta – yang tentu sudah menguras tenaganya, Jokowi sudah meluncur ke pemukiman warga yang mengalami musibah kebakaran. Bisa dibayangkan betapa penatnya fisik Jokowi ketika itu.

Yang tak kalah menariknya, Jokowi tetap tampil dengan logat Jawanya yang kental – tanpa usaha untuk mengubahnya sama sekali. Kata “... anu..” sering terlontar di sela kalimat-kalimatnya. Namun, sungguh “ajaib” publik metropolitan terbesar di Indonesia itu terkesan menerima Jokowi sesuai aslinya. Meminjam ungkapan Billy Joel dalam lagu *“Just the way you are”* publik menginginkan Jokowi *“just the way he is”* – seperti apa adanya. Tanpa perlu mengubah logat bicara dan gaya dia diterima. Keberterimaan Jokowi dengan gayanya yang asli adalah sebuah lukisan ke-Indonesia-an nan indah.

Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta memang membawa hasil yang menarik untuk dicermati. Pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahya Purnama sungguh merupakan pertunjukan hebat tentang betapa warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta lebih memilih pemimpin daripada partai. Pesona kepemimpinan kedua tokoh muda tersebut terbukti jauh lebih kuat daripada aura partai politik. Dengan kata lain warga Jakarta – sebagai cerminan masyarakat Indonesia – cukup cerdas dalam memilih pemimpin, tidak tergoyahkan oleh kekuatan politik dan bahkan “goyangan” sektarian sekalipun.

Kehadiran sosok kedua pemimpin muda itu seolah memenuhi kerinduan warga masyarakat akan pemimpin yang membumi dan yang tidak berjarak terhadap warga biasa. Yang diinginkan masyarakat adalah pemimpin yang bertindak, bukan sekedar memegang jabatan. William George dalam buku *“Rediscovering*

the Secrets to Creating Lasting Value Leadership" (2003) menyatakan bahwa yang diperlukan jaman ini adalah pemimpin yang otentik. Pemimpin jenis ini adalah sosok yang berintegritas tinggi, memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga di mana dia berada. Yang diperlukan saat ini adalah pemimpin yang yang memiliki tekad yang kuat dan mendalam untuk mewujudkan lembaganya berguna – bukan saja bagi segenap orang yang kena-mengena, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas.

Salah satu karakter utama pemimpin otentik adalah mandiri dan swakarsa. Menjadi sosok yang otonom dan penuh prakarsa. Untuk memiliki karakter utama ini, seseorang tentu harus berani menghadapi tantangan besar – harus mampu menenggang tekananan dari segala penjuru. Dalam ungkapan William George, seorang pemimpin otentik harus siap mengalami "kesepian sorang pelari jarak jauh" (*The Loneliness of the Long Distance Runner*). Dengan seringnya sang pemimpin mengambil keputusan dan bertindak yang dianggap tidak lazim maka ia harus siap kesepian. Kekukuhan sikap untuk berani berbeda dari mayoritas – demi tujuan baik yang diyakininya - adalah syarat esensial seroang pemimpin otentik.

Menurut Michael Hyatt (<http://michaelhyatt.com>) ada lima penanda kepemimpinan otentik, yaitu: (1) memiliki wawasan (*have insight*), (2) menunjukkan prakarsa (*demonstrate initiative*), (3) menebar pengaruh (*exert influence*), (4) memiliki dampak (*have impact*) dan (5) mempraktekkan integritas (*exercise integrity*). Dari kelima penanda itu, keberanian bertindak mungkin merupakan penciri yang paling menonjol pemimpin yang otentik.

Tokoh selalu lahir dalam ruang dan saat yang tepat, tetapi tidak semua orang yang hadir di ruang dan saat yang sama menjadi tokoh. Hanya mereka yang mampu membaca situasi dan mengambil sikap-tindakan yang menonjol akan menjadi tokoh.

Dalam rumusan Stephen Covey (*The 8th Habit*, 2004) “*You will discover that such influence and leadership comes by choice, not from position or rank*”. Menurut Covey prakarsa adalah persoalan pilihan. Pilihan itulah yang disebut sebagai kepeloporan atau *leadership*.

Visi kemimpinan seseorang tidaklah selalu sudah mencuat jelas sejak awal. Visi dapat disemaikan dan terus bertumbuh seiring dengan tergeraknya nurani menyaksikan perubahan di sekelilingnya. Fenomena itu ditemukan oleh Covey pada sejumlah tokoh besar dunia yang ditemuinya. Ia mengamati bahwa pada umumnya para tokoh itu kesadaran akan visi umumnya berkembang secara lambat. Karena visi lahir dari dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan kepekaan nuraninya untuk segera bertindak.

Dalam kasus Jokowi nampaknya masyarakat telah merasakan otentisitas kepemimpinannya. Semoga kepercayaan kepada Jokowi bukan hanya lahir dari kerinduan masyarakat yang sangat akut akan hadirnya pemimpin yang otentik di negeri ini. Inilah tantangan terbesar Jokowi untuk membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang otentik di tengah harapan masyarakat yang begitu besar.

Harapan yang begitu besar untuk pemecahan seabreg masalah pelik kota Jakarta bisa berisiko “menggelincirkan” sosok Jokowi menjadi *superhero* - seperti *superman* atau *spiderman* – yang tidak boleh gagal dan salah. Padahal sesuai ungkapan “*rocker juga manusia*” pastilah “Jokowi juga manusia” - yang tidak pernah sempurna. Semoga Jokowi dapat menyurusi alur perjalanan kepemimpinannya tanpa harus tergelincir.

Srawung Untuk Saling Percaya*

“As contagion of sickness makes sickness, contagion of trust can make trust” (Marianne Moore)

Dalam ekologi koeksistensi (*coexistence*) dimaknai – salah satunya - sebagai “*Hidup berdampingannya dua atau lebih spesies (mahluk hidup) di habitat yang sama di mana satu sama lain tidak saling menyingkirkan*” (Begon *et al.*, 2006). Secara lebih sederhana koeksistensi dapat dimaknai sebagai tindakan atau keadaan hidup berdampingan dalam damai (*the act or state of coexisting*).

Hidup berdampingan dengan damai mensyaratkan adanya rasa saling percaya (*trust*) dari kedua belah pihak. Yang menarik, kita bisa belajar dari Marianne Moore dalam kutipan di atas bahwa seperti penyakit menular *trust* juga dapat ditularkan. Meskipun sederhana, ungkapan Moore ini mungkin tidak kalah dari aneka konsep rekonsialiasi yang telah banyak dilontarkan seperti pembauran, kerukunan antar umat, dan aneka “jargon” sejenis.

Trust dapat ditumbuhkembangkan melalui **pergaulan**, **pertemanan** dan **persahabatan** (3-P) antar perorangan. Itulah *srawung*!. Menumbuhkembangkan *trust* adalah suatu upaya jangka panjang dan harus berkelanjutan. Dan dua wahana yang

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 26 Januari 2017

paling vital dalam membuka peluang terjadinya *srawung* adalah pendidikan dan ruang publik (fisik maupun virtual).

Pendidikan

Pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan dalam keluarga, harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi terjadinya *srawung* antar anak bangsa dari segala kelompok SARA. Hal ini tidak berarti menghalangi keberadaan lembaga-lembaga pendidikan bercirikhusus (misalnya Agama). Pada lembaga-lembaga khusus ini *srawung* tidak harus berlangsung secara internal, tetapi pengembangan semangat inklusif sangat diharapkan. Pada setiap anak didik perlu ditanamkan kesadaran akan keberagaman warga sebangsa.

Dalam spirit ini, Universitas Tsukuba bahkan telah mengembangkan kajian tingkat lanjut – hingga ke jenjang pendidikan Doktor (S3) – tentang Koeksistensi Manusia (*Human Coexistence*). Menyadari bahwa abad ke 21 adalah era koeksistensi dan simbiosis manusia. Universitas tersebut memiliki Jurusan Koeksistensi manusia yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memraktekkan sebuah konsep pendidikan baru – menggantikan konsep pendidikan masyarakat modern yang berbasis pada prinsip meritokrasi (*meritocracy*) yang terlalu menitikberatkan pada pengembangan ketrampilan perorangan dan persaingan dengan sesama.

Sebagai bidang kajian yang baru lahir, pendidikan untuk koeksistensi manusia (PUKM) dkembangkan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan koeksistensi, semangat timbal balik, peduli dan hormat (*coexistence, reciprocity, care and respect*) tanpa diskriminasi atau persaingan dengan pihak lain. Muara dari PUKM adalah kehidupan yang baik (“*good life*”) untuk semua dengan cara pengembangan sistem pendidikan, konsep sekolah dan metodanya, serta menggunakan dalam praktik.

Ruang Publik

Ruang publik baik yang fisik - *mall*, pasar, rumah makan, gedung olahraga, taman, kebun binatang - dan arena rekreasi, maupun yang virtual - radio, surat kabar, televisi, internet – harus memberikan peluang seluas-luasnya untuk mendorong terjadinya *srawung* di antara sesama anak bangsa dengan keberagaman SARA-nya.

Pasar adalah ruang publik yang penting untuk mewujudkan *srawung*. Pasar memberi ruang untuk terjadinya interaksi inklusif. Pasar Imlek Semawis (PIS), misalnya, meskipun berlangsung di lokalitas spesifik Pecinan dan menampilkan pernik-pernik khas “budaya Tionghoa”, namun karena sifatnya yang terbuka dan inklusif, PIS berpeluang untuk menjadi salah satu motor penggerak lahirnya kohesi dan solidaritas sosial di kota Semarang. Apalagi tahun ini PIS mengangkat tema “Obar Abir” yang secara telak memihak kepada keberagaman.

Mewujudkan dunia pendidikan dan ruang publik yang dapat menumbuhkembangkan *trust* antar anak bangsa adalah salah satu tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini. Kegagalan dalam mengatasi tantangan ini hanya akan menjerumuskan bangsa yang “sempat” bangga akan ke-bhinekaannya ini menuju sekedar kumpulan suku-suku dan kelompok agama dan aliran yang tidak percaya satu sama-lain. Dan jika itu terjadi maka panggung politik Indonesia hanya akan terus-menerus diwarnai pertarungan demi kepentingan kelompok semata – bukan kepentingan bangsa yang bhineka.

“Gayeng” dan Modal Sosial*

Setengah tahun sudah “Jateng Gayeng” diluncurkan sebagai *branding* Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto. Menurut Tonny Subagyo, penciptanya, “Jateng Gayeng” mengandung makna masyarakat Jawa Tengah yang penuh semangat, berani, tangguh, jujur, ramah, menggembirakan, harmonis dan hangat. Ungkapan “Jateng Gayeng” juga mengandung makna interaksi antar anggota masyarakat—yang setara, saling terbuka dan dipenuhi kegembiraan serta kehangatan. Kata “gayeng” juga menggambarkan kondisi lingkungan yang mendukung perikehidupan masyarakat Jawa Tengah sehingga dapat memiliki interaksi yang setara, saling terbuka dan dipenuhi kegembiraan serta kehangatan. Dengan kata lain, diperlukan kondisi lingkungan yang “baik dan terawat” untuk mendukung terjadinya suasana dan semangat “gayeng”. Dengan demikian, kata “gayeng” sudah mencakup unsur spirit dan atmosfir.

Menurut saya, *branding* “Jateng Gayeng” memiliki kelebihan karena sifatnya yang kurang asertif dibandingkan, misalnya, dengan *branding* “Mboten Ngapus, Mboten Korupsi”. “Jateng Gayeng” lebih sebagai ajakan dan ungkapan kebanggaan terhadap spirit dan atmosfir lokal Jawa Tengah. Pemilihan “gayeng” sebagai *tagline* bisa dikatakan sebagai pilihan yang secara stratejik

* Dimuat di Harian SUARA MERDEKA 25 Februari 2016

sesuai dengan kebutuhan aktual Jawa Tengah saat ini. Jawa Tengah memerlukan kerjasama dan sinergi yang melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan. Dengan spirit dan atmosfir “gayeng” kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompok diharapkan dapat terkurangi. Singkatnya, *branding* ini layak diangkat sebagai salah satu strategi untuk menguatkan modal sosial (*social capital*).

Kehadiran *branding* “*Jateng Gayeng*” jika dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah provinsi akan memupuk *modal sosial* yang sangat berharga bagi pewujudan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (MacNeill, 2007 dalam Redekop, 2010). Mengacu Francis Fukuyama, *modal sosial* dimaknai sebagai norma informal dalam wujud nyata yang mendorong kerjasama antar perorangan. Di dalam dunia ekonomi, *modal sosial* mereduksi biaya transaksi, sedangkan di dunia politik, *modal sosial* mendorong terjadinya kerjasama dalam pencapaian tujuan bersama.

Seperti diungkapkan di atas, dalam perkara interaksi antar anggota masyarakat, “*gayeng*” mengandung makna setara, saling terbuka dan dipenuhi kegembiraan serta kehangatan. “*Gayeng*” juga menggambarkan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi yang setara, saling terbuka dan dipenuhi kegembiraan serta kehangatan itu. Singkatnya, “*gayeng*” mencakup baik unsur spirit dan atmosfir interaksi antar anggota masyarakat.

Modal sosial terbangun atas norma-norma tradisional seperti kejujuran, rasa saling percaya (*trust*), semangat timbal balik (*reciprocity*), komitmen dan tanggung jawab, hingga nilai dan doktrin yang kompleks seperti agama (Francis Fukuyama, 2001). Empat unsur kunci dalam interaksi antar warga yang “*gayeng*”, yaitu kesetaraan, saling keterbukaan, kegembiraan dan kehangatan, jelas dapat menguatkan norma-norma penyusun *modal sosial*. Unsur kesetaraan merupakan bagian dari norma semangat timbal balik; begitu pula unsur keterbukaan adalah

bagian dari norma kejujuran dan rasa saling percaya. Di dalam kelompok yang memiliki *modal sosial* dikenal adanya ‘*radius of trust*’, yaitu lingkaran anggota yang menjalankan norma kerjasama secara nyata. Jika *modal sosial* suatu kelompok menghasilkan luaran yang positif, maka ‘*radius of trust*’-nya bisa melampaui kelompok itu sendiri. Selanjutnya, unsur kegembiraan dan kehangatan merupakan pupuk penyubur bagi semua norma penyusun *modal sosial*. Kegembiraan dan kehangatan akan memberikan dorongan lebih pada proses kerjasama antar anggota masyarakat.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa *modal sosial* mendorong kerjasama, kemitraan dan koordinasi – yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi perbaikan ekonomi maupun politik suatu wilayah. Dalam rangkuman Jordan dkk (2010) reduksi biaya transaksi, pertumbuhan gerakan koperasi, peningkatan pendapatan warga dan pertumbuhan ekonomi adalah manfaat *modal sosial* dalam dunia ekonomi. Begitu pula, manfaat *modal sosial* dalam dunia politik bisa mencakup perbaikan partisipasi politik dan *good governance*. Memperhatikan sejumlah bukti tentang kekuatannya maka tidaklah keliru jika setiap wilayah, tidak mengecualikan Jawa Tengah, melibatkan *modal sosial* dalam agenda pembangunan wilayah. Dalam hal ini *branding* layak diangkat sebagai salah satu strategi untuk menguatkan *modal sosial*. *Branding “Jateng Gayeng”* sendiri memiliki kelebihan karena sifatnya yang persuasif.

Untuk dapat memperkuat *modal sosial*, pengenalan (sosialisasi) *branding “Jateng Gayeng”* harus dilakukan secara terstruktur dan masif. Hanya dengan begitu, proses penanaman (internalisasi) unsur-unsur nilai dalam *branding* itu dapat terjadi. Pemilihan “*gayeng*” sebagai *tagline* bisa dikatakan sebagai pilihan yang secara stratejik sesuai dengan kebutuhan aktual Jawa Tengah saat ini. Jawa Tengah memerlukan kerjasama dan sinergi yang melibatkan segenap pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan. Dengan spirit dan atmosfir

“gayeng” kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompok diharapkan dapat terkurangi.

Keberhasilan penanaman *branding* baru ini kepada khalayak internal – yang mewujud dalam berbagai prakarsa kolektif - akan menghasilkan atmosfir yang dapat meningkatkan daya pikat provinsi ini bagi pada khalayak eksternal. Pada gilirannya, dapat diharapkan akan semakin banyak orang yang berminat untuk berkunjung dan bahkan berkarya di Jawa Tengah – dalam bentuk kegiatan wisata, bermukim, investasi dan bisnis.

Pikiran yang Tertata

“*The Organized Mind – Thinking Straight in the Age of Information Overload*” (“Pikiran yang Tertata – Berpikir Lurus di Era Luapan Informasi”) - itulah judul sebuah buku yang memikat saya untuk membelinya. Buku itu ditulis oleh Daniel Levitin (2014).

Sudah bukan pengetahuan baru bahwa saat ini kita hidup dalam luapan informasi. Begitu banyak informasi yang melintas di depan dan menghampiri mata dan telinga kita sehingga memaksa pikiran kita untuk bekerja sangat keras untuk memilah dan memberikan tanggapan. Berbagai studi oleh para pakar informasi telah menunjukkan secara telak luapan informasi (*information overload*) itu dalam sejumlah nilai kuantitatif yang mencengangkan.

Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada tahun 2011 rata-rata setiap orang di sana menerima informasi lima kali lipat dari apa yang mereka dapatkan di tahun 1986 – atau setara dengan 175 surat kabar. Pada saat bersantai – di luar pekerjaan – setiap orang mengolah informasi sebanyak 34 gigabytes atau setara dengan 10.000 kata setiap harinya. Luapan informasi audio-visual (citra dan suara) saat ini tengah berlangsung dengan sangat luar biasa. Data tiga tahun lalu menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 21.000 stasiun televisi

di dunia yang menghasilkan 85.000 jam siaran – dan rata-rata orang hanya menyaksikan 5 jam siaran yang setara dengan 20 gigabytes citra dan suara. Itu semua belum memperhitungkan unggahan 6000 jam video ke pangkalan Youtube setiap harinya. Sangat jelas bahwa sungguh besar risiko bagi kita untuk tenggelam oleh luapan informasi ini.

Untuk hal yang lebih “*tangible*”, jenis barang yang dijajakan di supermarket misalnya, kita juga menyaksikan apa yang disebut oleh Daniel Levitin (2014) sebagai “ledakan pilihan” (*explosion of choices*). Jika pada tahun 1976 rata-rata supermarket di Amerika Serikat menyediakan 9000 jenis produk maka empat dekade setelahnya angka itu membengkak menjadi sekitar 40000. Ironisnya, kebanyakan sudah bisa memenuhi hampir seluruh kebutuhannya dengan hanya 150 jenis produk dari supermarket. Artinya ada sekitar 39850 produk di supermarket yang diabaikan oleh rata-rata konsumen.

Tentu diperlukan strategi untuk menghadapi luapan informasi dan ledakan pilihan tadi. Yang menjadi pertanyaan adalah apa kiat yang pas agar kita tidak tenggelam dalam luapan informasi dan limbung oleh ledakan pilihan.

Sang penulis, Daniel Levitin, menawarkan sebuah kiat yang dikenal sebagai *satisficing* – secara etimologis kata bentukan baru ini merupakan paduan antara kata *satisfying* dan *sufficient*. Istilah *satisficing* – sebagai sebuah strategi adaptasi ketika menghadapi begitu banyak pilihan – dikemukakan pertama kali oleh Herbert Simon, seorang Pemenang Hadiah Nobel – seorang pakar teori organisasi dan pengolahan informasi. Simon mereka cipta istilah baru ini demi mendapatkan kata yang pas untuk menggambarkan keadaan “**tidak mendapatkan opsi yang benar-benar terbaik tetapi sudah cukup baik**” (“*not getting the very best option but one that was good enough*”).

Dengan menjalankan strategi *satisficing* kita tidak akan menghambur-hamburkan energi untuk memikirkan informasi yang tidak terlalu penting – tetapi muncurahkan perhatian pada informasi yang lebih penting. *Satisficing* ternyata juga merupakan salah satu dasar perilaku produktif yang pada gilirannya juga mampu menghadirkan kebahagiaan pada seseorang. Menurut Levitin (2014) kita semua, tanpa terkecuali, senantiasa menerapkan strategi *satisficing* ini dalam menjalankan kegiatan keseharian kita. Sebut saja, saat membersihkan lantai rumah sebagian besar dari kita tentu tidak akan membersihkannya secara sangat tuntas menggunakan sikat gigi bekas – demi tidak menyisakan debu atau noktah setitikpun di sambungannya. Andai saja semua orang – kecuali tenaga pembersih profesional - terobsesi untuk melakukan pembersihan tuntas itu, bagaimana jadinya dengan pekerjaan mereka yang lain. Disadari atau tidak, kita telah sering menerapkan strategi *satisficing* itu.

Persoalannya sekarang yang kita hadapi adalah luapan informasi dan ledakan pilihan yang sangat masif dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mampu keluar dari ancaman itu maka kita harus berusaha menata pikiran kita dengan kesadaran penuh bahwa pikiran kita terbatas – baik dalam penyimpanan dan pengunduhan (*storage & retrieval*). Selanjutnya, mau tidak mau kita harus terus berlatih untuk memilih, memilah dan mengurutkan informasi berdasarkan nilai pentingnya – dan berani sampai tingkat tertentu mengabaikan informasi yang tidak terlalu penting. Yang menjadi tantangan seringkali kita kesulitan untuk melakukan tiga hal tersebut. Untuk mengatasi hal itu maka kita harus berani secara rutin untuk mengambil jeda sejenak di tengah irama hidup yang semakin cepat ini dengan melakukan refleksi, kilas balik, demi menemukan hakekat di tengah belantara informasi yang menghampiri kita. Dengan melakukan refleksi itu maka kita punya bekal yang lebih baik dalam menjalani hari baru.

Ekologi Nurani*

Dalam Sarasehan “Perempuan Membaca AMDAL” di kampus Unika Soegijapranata, Semarang 21 April 2016 yang lalu, hadirin terpukau mendengar tutur kata lugas nan runtut dua perempuan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah yang menolak kehadiran pabrik semen di kampung mereka. Dengan menggunakan bahasa Jawa sederhana, Gunarti (Pati) dan Sukinah (Rembang) menyampaikan dengan jelas dan masuk akal dampak kehadiran pabrik semen terhadap perikehidupan mereka selaku petani. Pandangan mereka menarik untuk disandingkan dengan isi dokumen AMDAL yang disusun oleh para pakar.

Bagi kedua perempuan itu bumi Kendeng – yang mereka sebut sebagai Ibu Bumi - adalah Sang Ibu Pemberi kehidupan bagi petani, peternak, anak-anak, pepohonan dan burung. Oleh karenanya, manusia harus membalaas budi Ibu Bumi dengan merawatnya dan mensedekahinya – bukan merusaknya dengan penambangan bahan semen. Kedua perempuan itu menyuarakan kekhawatiran akan musnahnya sumber-sumber air oleh operasi pabrik semen yang akan membuat mereka tidak bisa bertani lagi.

* Dimuat di Harian KOMPAS 7 Mei 2016

Begitu sederhana, namun gamblang, kearifan lokal yang mereka pegang dengan penuh keyakinan itu. Mereka yang mempelajari keberadaan dan pemanfaatan ekosistem karst menurut cara kerja ilmu pengetahuan modern yang sarat kaidah ilmiah – seperti para pakar penyusun dokumen AMDAL - sangat boleh jadi memandang sebelah mata pemahaman kedua perempuan itu. Dalam perkembangan pengetahuan ilmiah yang kompleks dan terstruktur ketat, pemahaman Gunarti dan Sukinah terkesan dangkal. Bukankah terlalu naif jika penolakan eksplorasi ekosistem karst oleh industri semen hanya didasarkan pada prinsip balas budi kepada Ibu Bumi, Ibu sang Pemberi?

Ketegangan antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal bukan hanya kisah di pegunungan Kendeng. Kisah serupa juga pernah terjadi di Hong Kong pada tahun 1965, seperti dicatat oleh Anderson - anthropolog Universitas California Riverside. Ketika itu berlangsung pembangunan rumah sakit di lereng curam yang menghadap ke teluk *Castle Peak*. Atas pembangunan di lokasi ekstrim itu warga setempat spontan berkomentar “*Ini sungguh berbahaya, fondasi rumah sakit itu memotong urat nadi sang Naga*”. Peringatan itu mewakili keyakinan warga setempat tentang keberadaan mahluk Naga yang hidup dalam tanah di lereng perbukitan itu. Tanpa memerlukan waktu lama, peringatan itu terbukti. Fondasi rumah sakit yang baru selesai ditanam, roboh diterjang longsoran tanah dari atasnya. Fondasi itu tumbang setelah Hong Kong dihajar *typhoon* yang disusul hujan lebat selama beberapa hari. Atas peristiwa itu, warga setempat berujar: “*Lihat! ini pasti terjadi karena nadi sang Naga telah dipotong*”. Mungkin sebagian orang menganggap apa yang dipahami warga teluk Castle Peak itu sebagai takhyul belaka. Tetapi sebagai sebuah sistem pengetahuan kearifan lokal itu terbukti mampu bekerja dengan baik dengan memberikan ramalan yang tepat.

Saling Melengkapi

Dalam perkembangannya – seperti diungkapkan oleh Monica Hernandez-Morcillo dkk dalam Journal Environment (Januari-Februari 2014) – pengetahuan ekologi tradisional semakin diperhitungkan dalam pengembangan ilmu, kebijakan dan manajemen lingkungan. Meskipun berbeda pengetahuan ilmiah (PI) dan pengetahuan ekologi tradisional (PET) dianggap saling melengkapi dan memperkaya dalam upaya memperbaiki proses pengambilan keputusan lingkungan dan pemahaman tentang keberadaan serta dinamika ekosistem.

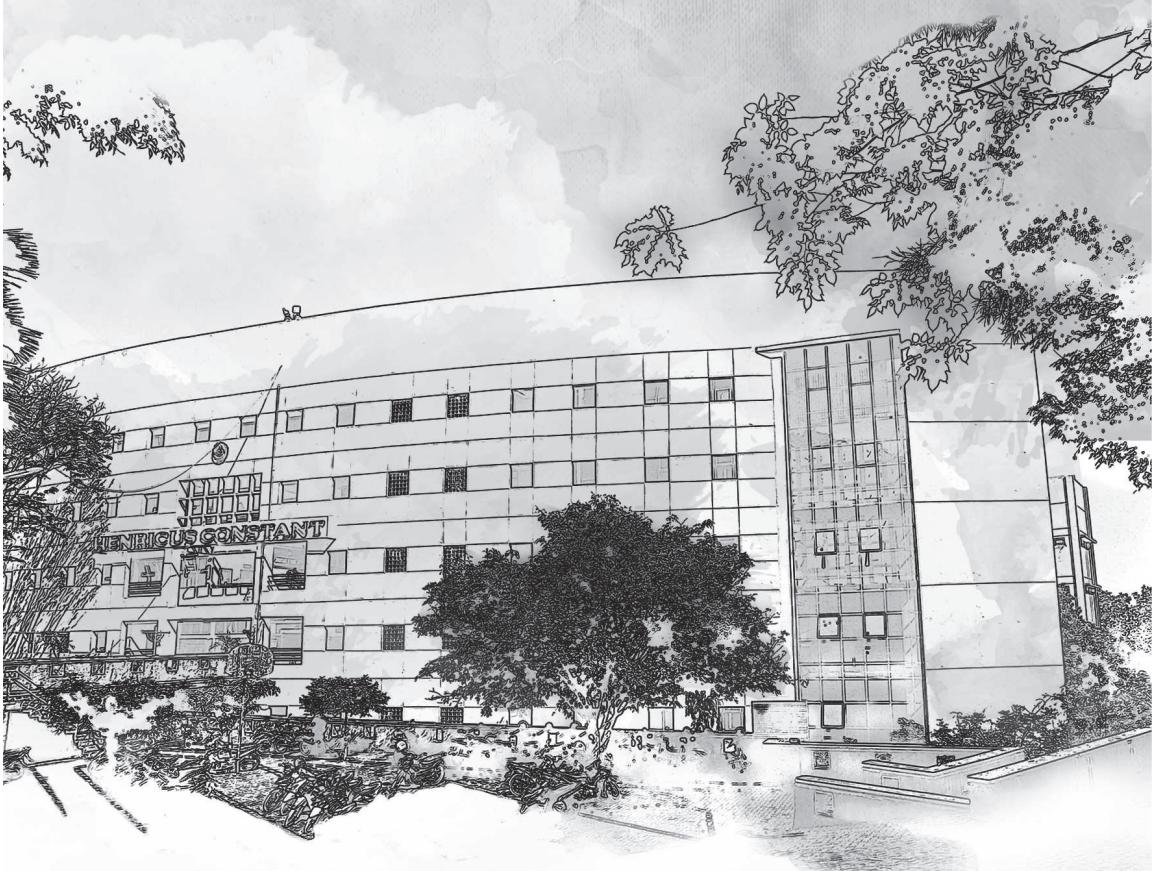
PET tidak hanya diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya saja. Karena melekat erat pada perilaku sehari-hari warga maka transmisi PET bisa terus menerus dan meluas. Terlebih lagi, PET juga terdokumentasi sebagai naskah tertulis dan berbagai media baru. Lebih jauh warga lokal juga telah mampu secara dinamik mengkombinasikan PET secara tradisional dan oral dengan *pengetahuan ekologi popular serta ilmiah - sebagai exogenous knowledge*. Kemampuan untuk mengombinasikan dua sistem pengetahuan itu juga terbaca dari paparan Gunarti dan Sakinah tentang dampak pabrik semen. Mereka menggabungkan ajaran untuk setia kepada Ibu Bumi, sebagai Sang Ibu Pemberi, dengan elemen-elemen pengetahuan ilmiah seperti daya dukung ekosistem, cekungan air tanah, dan rencana tata ruang dan wilayah - yang mereka peroleh dari pertukaran wacana dengan para pelaku pengetahuan ilmiah.

Kesenjangan pemahaman dan keyakinan antara para pakar penyusun AMDAL dan warga setempat - yang diwakili oleh dua perempuan itu - menunjukkan tiada pihak yang bisa memonopoli kebenaran. Apalagi dua pihak yang “bersitegang” menghidupi dua sistem pengetahuan yang berbeda, yaitu PI dan PET. Dalam hal ini, kebenaran tidak tunggal melainkan beragam. Sudah selayaknya, pelaku PI tidak terlalu menganggap remeh PET.

Dalam persoalan lingkungan, sebenarnya kedua jenis pengetahuan ini justru perlu diselaraskan – namun sayangnya kesadaran untuk itu sering terlambat. Sebagai “adik”, PI sering tidak memperhitungkan muatan kebenaran dalam PET, sang “kakak”. Anderson (1996) menyarankan cara kerja PI hendaknya diubah untuk mengakomodasi kebenaran sistem pengetahuan lain, termasuk PET. Dalam ancangannya, PI harus secara lambat laun mengakumulasi berbagai pengamatan yang bermanfaat dan meramunya dengan teori-teori yang kokoh. Menurut Anderson, pengamatan dibuat untuk diperbaiki dan dilengkapi; teori diciptakan untuk dirubuhkan dan diganti. Singkatnya, ilmu pengetahuan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dan piranti-piranti untuk menjalankan observasi dan menciptakan teori – bukan kebenaran mutlak.

Penolakan hasil studi ilmiah – seperti AMDAL - oleh masyarakat lokal yang mengandalkan kearifan lokal haruslah dipandang sebagai sebuah tantangan untuk berlangsungnya integrasi PI dan PET. Dalam kerumitan persoalan lingkungan, keragaman kebenaran adalah sebuah keniscayaan. Berbagai kebenaran harus bisa hidup berdampingan. Jika ini disadari oleh para pengambil kebijakan maka banyak ketegangan lingkungan yang bisa diatasi dengan mencari titik temu – bukan dengan kepongahan sistem pengetahuan (ilmiah) yang sedang berkuasa. Keselarasan antara ilmu pengetahuan dan kearifan lokal akan menorehkan wajah ekologi yang peka pada panggilan nurani.

Refleksi



Mengarungi Lansekap Pendidikan Tinggi Indonesia dengan *Ex Corde Ecclesiae*¹

Perguruan tinggi anggota APTIK (PT APTIK) dilahirkan untuk hidup dalam dua lingkup (*sphere*). Dalam lingkup nasional, sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional, PT APTIK merupakan obyek “pembinaan” pemerintah - yang dirumuskan sebagai misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai pemantauan, pengendalian, fasilitasi, penguatan dan pemberdayaan². Sebagai konsekuensinya, PT APTIK patuh terhadap segenap regulasi yang kena mengena dengan pendidikan tinggi³. Di lingkup lain, sebagai perguruan tinggi (universitas) Katolik, PT APTIK memiliki mandat untuk melaksanakan Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik, *Ex Corde Ecclesiae* (ECE).

-
- 1 Bahan pengantar diskusi dalam Hari Studi APTIK 9-11 Oktober 2014, Unika Widya Karya Malang.
 - 2 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. p. 4.
 - 3 Belum lama ini telah terbit Pemendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - 11 Juni 2014 - yang merupakan tantangan baru nan berat bagi PTS termasuk PT APTIK.

Keberadaan (*existence*) suatu PT APTIK akan ditentukan oleh kemampuannya untuk memadukan perannya dalam dua lingkup itu untuk menghasilkan sebuah keunggulan yang khas. Hal ini mudah dirumuskan tetapi sangat boleh jadi sulit diwujudkan. Saat ini rejim pendidikan tinggi Indonesia “mendadak” menjelma menjadi sosok yang otoriter – sarat dengan praksis atur-dan-awasi (*command and control*). Peningkatan anggaran pendidikan tinggi yang drastik secara cepat berhasil melahirkan kekuatan yang lantas tidak disiasati oleh Ditjen Dikti untuk dditransformasi menjadi kekuasaan. Sampai tingkat tertentu kekuasaan ini mewujud dalam obsesi yang berlebihan terhadap (pengawasan berbasis) *database*. Atas nama pemantauan dan pengendalian, pemerintah sungguh bernafsu untuk menguasai *database* setiap perguruan tinggi⁴.

Bermula dari tunjangan sertifikasi dosen, beragam dana hibah untuk kegiatan Tri Darma Pendidikan Tinggi dan pengembangan kelembagaan, semua perguruan tinggi – tanpa mengecualikan PT APTIK – semakin patuh pada rejim pendidikan tinggi nasional. Yang menjadi persoalan bagi PT APTIK adalah memastikan bahwa kepatuhan itu tidak menghalangi implementasi ECE di kampus masing-masing. Atau jika dirumuskan berbeda, yang harus dipastikan adalah sejauh mana implementasi ECE akan menguatkan peran PT APTIK dalam mengarungi lansekap pendidikan tinggi nasional.

⁴ Widianarko, B. (2014). Universities Crippled by Database Obsession. The Jakarta Post - March 11, 2014.

Potret Terkini Pendidikan Tinggi Indonesia⁵

Kita semua tentu sepakat bahwa masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia adalah pengaturan yang berlebihan sehingga mengunci kelincahan dan kelenturan. Kita semua disibukkan oleh perkara prosedural yang menyita energi, seperti pengisian Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai laporan semesteran, laporan kinerja dosen, pengurusan jabatan akademik dosen, dan yang terakhir (dan gagal) Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD), untuk menyebut beberapa.

Sungguh sebuah ironi. Di Indonesia - yang telah bertransformasi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia - ternyata rejim pendidikan tingginya justru semakin sentralistik dan otoriter. Alih-alih desentralisasi dan otonomisasi yang mewujud, pola sentralistik justru semakin kentara. Rupanya rumusan tentang demokrasi dalam latar belakang rencana strategis⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - *"Perkembangan demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ke tiga di dunia. Desentralisasi dan otonomisasi telah pula merubah peta sosial-politik di Indonesia, dari pola sentralistik ke arah lebih partisipatoris dan mendaerah.Perguruan tinggi juga diharapkan menjadi contoh bagi terbentuknya tata-kelola yang sehat, efisien, dan akuntabel"* - hanyalah retorika belaka.

Meminjam istilah Satryo Soemantri Brodjonegoro (Kompas, 8/3/2013), perguruan tinggi kita tengah mengalami gejala "jawatanisasi". Fenomena "jawatanisasi" ini bukan hanya melanda perguruan tinggi negeri (PTN). Mekipun bertolak

5 Bagian ini didasarkan pada dua tulisan ini telah dipublikasikan: Widianarko, B. (2014a). Universitas Rumah Belajar. KOMPAS 1 Maret 2014, dan Widianarko, B. (2014). Inang Baru Perguruan Tinggi Bukan Solusi. KOMPAS 20 Juni 2014.

6 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. p. 2.

belakang dengan watak keswastaannya, perguruan tinggi swasta (PTS) juga tidak berdaya diseret oleh arus besar “jawatanisasi” itu – dan bahkan selalu dalam posisi yang lebih lemah. Bagi PTN otonomi adalah harapan PTN, sedangkan bagi PTS itu hanyalah sekedar ilusi. Jangankan Guru Besar, untuk “sekadar” mengangkat seorang Asisten Ahli - jabatan fungsional akademik terendah – sekalipun PTS tidak memiliki wewenang sama sekali. Boleh dibilang, setiap instruksi, kebijakan dan keputusan dari seluruh jenjang birokrasi pendidikan tinggi telah berhasil membentuk sikap siaga (*alert*) di kalangan PTS. Tidak sedikit waktu dan energi yang terbuang untuk menanggapi tuntutan birokrasi yang belakangan ini semakin bertubi-tubi datangnya.

Dari perdebatan otonomi perguruan tinggi ini, PTS memang cenderung terpinggirkan. Padahal Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) menunjukkan sekitar 70% mahasiswa di negeri ini menuntut ilmu di PTS. Ada kesan dengan kekuatan anggaran yang meraksasa, pemerintah mengabaikan PTS. Padahal PTS telah hadir sebagai penyedia akses pendidikan tinggi bagi warga negara jauh-jauh hari ketika anggaran pendidikan masih sangat terbatas. Bahkan tidak sedikit PTS yang lahir lebih dahulu dari PTN dan terus menjadi lahan persemaian ilmu pengetahuan hingga kini.

Menurut Elfindri (KOMPAS, 21/3/2013) meningkatkan akses dengan cara memperbesar daya tampung PTN (bukan menguatkan PTS) adalah langkah yang sangat keliru. Lebih jauh Elfindri mengungkapkan bahwa pemerintah mengandalkan asumsi bahwa PTS yang lebih dari 3000 itu biarlah beroperasi melalui mekanisme pasar. Pemerintah hanya menjalankan peran bak “satpam” yang aktif dalam “operasi” penertiban belaka.

Belakangan muncul keinginan kalangan perguruan tinggi (PT) - melalui Forum Rektor Indonesia (FRI)- untuk memiliki inang baru pengganti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemdikbud). Meskipun mendapatkan kritik yang keras antara lain oleh Daoed Joesoef^{7,8}, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun tampaknya aspirasi itu akan diakomodasi oleh Presiden baru, Joko Widodo.

Tuntutan inang baru hanya karena PT menjalankan fungsi riset adalah argumen yang tidak kokoh. Apalagi ketika diambil perbandingan dengan negara-negara lain. Bahkan rumusan diskusi Forum Rektor Indonesia (Kompas, 9/6/2014): "*Sebagai perbandingan, negara-negara yang maju industrinya, memasangkan pendidikan tinggi dengan riset teknologi dan inovasi dalam satu kementerian. Sebut saja, Perancis dengan Ministry of Higher Education and Science, jerman dengan Federal Ministry of Education and Research, serta Jepang dengan Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology*" – sungguh membingungkan karena tidak taat azas. Dari contoh yang ditampilkan hanya Perancis yang memiliki kementerian yang secara eksplisit menggunakan frasa "pendidikan tinggi". Sisanya justru tetap menggunakan kata "pendidikan" – yang dilengkapi dengan unsur-unsur lain sesuai konteks masing-masing.

Dari penelusuran cepat di web penulis menemukan beberapa negara yang menggunakan frasa "pendidikan tinggi" untuk nama kementerian yang jadi inang PT, yaitu Malaysia, Srilanka, Afghanistan, UAE, Mesir, Saudi Arabia, Kenya – selain Perancis. Sedangkan sejumlah negara yang maju dalam penelitian justru nama kementeriannya diawali dengan kata "pendidikan", seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Denmark, Jepang, Korea Selatan. Bahkan Finlandia yang memiliki sejumlah universitas utama dunia pun menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7 Joesoef, D. (2014). Jangan Mempermudah Pendidikan. KOMPAS 17 September.

8 Joesoef, D. (2014). Tujuan Universitas. KOMPAS 30 September.

(*Ministry of Education and Culture*) seperti Indonesia. Gagasan pembentukan kementerian baru itu terkesan sebagai upaya jalan pintas untuk meningkatkan peringkat PT Indonesia di aras global. Realita yang akan dihadapi tidak akan sesederhana itu. Inang baru bukan solusi, ada sejumlah persoalan yang lebih hakiki yang harus diperbaiki dalam pendidikan tinggi kita.

Berdasarkan kecenderungan-kecenderungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pendidikan tinggi oleh pemerintah, dalam hal ini Ditjen Dikti, sangat kental dengan semangat pragmatisme dan jalan pintas. Kedua semangat itu tentu saja bertentangan dengan hakekat PT sebagai lembaga pendidikan. PT adalah lembaga yang sarat dengan muatan pendidikan dan pengajaran. Lembaga pendidikan tinggi, terutama universitas, adalah rumah belajar. Ungkapan "*universitas magistrorum et scholarium*" (universitas sebagai komunitas guru dan murid) secara gamblang menunjukkan itu. Bahkan dalam bentuk awalnya, universitas di abad pertengahan sebenarnya dilahirkan dan lantas dikelola oleh kumpulan guru atau dosen.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), kecuali mendukung perekonomian - tiga dari empat tujuan utama universitas menyangkut proses belajar (*learning*) yatu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab⁹.

⁹ Diana Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. EDUCAUSE Review Jan/Feb 2012. p. 16-25.

O'Brien (1998) mengingatkan bahwa hakekat universitas sebagai rumah belajar jangan sampai dilupakan "hanya" demi menjawab tantangan perubahan jaman¹⁰. Memotret keadaan di Amerika Serikat, O'Brien menyatakan bahwa masalah utama dalam pendidikan tinggi bukanlah pertentangan antara pengajaran (*teachning*) versus riset, melainkan terbaikannya pembelajaran dan pendidikan (*learning and education*) di universitas. Mandat universitas memang bukan hanya melaksanakan riset. Bahkan ketika kita menengok peran yang diharapkan dari sebuah universitas riset (*research University*) maka produk pertamanya adalah pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Lendel (2010) dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge economy*) universitas dapat dipandang sebagai layaknya sebuah industri multi-produk dengan tujuh produk, yaitu (1) pendidikan, (2) produk budaya, (3) tenaga kerja terlatih, (4) penelitian-kontrak, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru, dan (7) produk dan industri baru¹¹.

Ex Corde Ecclesiae - Mandatum Universitas Katolik

Pada tanggal 15 Agustus 1990 Paus Yohannes Paulus II menerbitkan *Ex Corde Ecclesiae* (ECE), sebuah Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik (*Apostolic Constitution on Catholic Universities*). Konstitusi Apostolik tersebut memerikan identitas dan misi universitas Katolik, serta memberikan norma-norma umum untuk diikuti. Dengan demikian ECE merupakan *mandatum* bagi universitas-universitas yang menyebut diri sebagai universitas Katolik.

10 George Dennis O'Brien, G.D. (1998). *All the Essential Half-Truths about Higher Education*. University of Chicago Press. Chicago.

11 Lendel, I. (2010). The Impact of Research Universities on Regional Economies: The Concept of University Products. *Economic Development Quarterly* 24(3): 210–230. DOI: 10.1177/0891242410366561

Universitas Katolik berbagi pencarian kebenaran (*gaudium de veritate*) dengan semua universitas lain, yang idealnya mewujud sebagai kesukacitaan dalam mencari, menemukan dan mengkomunikasikan kebenaran dalam setiap bidang ilmu¹². Namun ada empat ciri hakiki universitas Katolik – yang membedakannya dari universitas umum - menurut ECE¹³, adalah (1). inspirasi Kristiani bukan hanya pada individu tetapi juga pada universitas sebagai komunitas, (2). refleksi terus menerus dalam terang iman Katolik atas khasanah pengetahuan manusia yang terus berkembang, yang diusahakan untuk disumbangkan oleh universitas melalui penelitian, (3). kesetiaan terhadap pewartaan Kristiani sebagaimana disampaikan kepada kita melalui Gereja, dan (4). komitmen kelembagaan dalam melayani umat Allah dan keluarga manusia dalam perziarahan mereka menuju tujuan transenden yang memberikan makna pada kehidupan.

Dalam rangkumannya tentang konsep pendidikan tinggi Katolik di balik ECE, Sudarminta (2009)¹⁴ merumuskan sejumlah unsur khas yang berbeda dari universitas umum dan perlu diupayakan dalam universitas Katolik. Beberapa unsur khas tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat mandat, yaitu

Identitas Katolik

Menjaga identitas kekatolikan, lewat komitmen kelembagaannya, universitas katolik harus diresapi oleh cita-cita, sikap dan prinsip-prinsip kekatolikan dalam semua kegiatannya.

12 Ex Corde Ecclesiae. Apostolic Constitution of the Supreme Pontiff John Paul II on Catholic Universities. p. 1.

13 Ibid p. 4.

14 Sudarminta, J. SJ. (2009). Filsafat Pendidikan dan Perguruan Tinggi Katolik – Menggagas Konsep Pendidikan Tinggi yang Mau Diwujudkan dan Tantangan Masa Kini yang Dihadapi. Bahan pengantar diskusi dalam Hari Studi APTIK, Jakarta 12-13 November 2009.

Pelayanan pastoral pada warga universitas demi membantu integrasi iman dan kehidupan mereka; sebagai ungkapan alami dari identitas kekatolikan

Sumbangan bagi Gereja

Sumbangan universitas Katolik bagi karya penginjilan Gereja

Lewat pengajaran dan penelitian, universitas Katolik mempersiapkan pria dan wanita untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Gereja, dan dengan hasil penelitiannya Universitas Katolik dapat membantu Gereja menanggapi masalah dan kebutuhan jaman.

Perpaduan akal budi dan iman, Integrasi Ilmu dan Dialog Kebudayaan.

Pencarian bebas atas seluruh kebenaran tentang alam, manusia dan Tuhan.

Menanggapi kebutuhan jaman terkait dengan kemajuan pesat di bidang sains dan teknologi untuk berdasarkan inspirasi Kristiani memasukkan dimensi moral, spiritual dan religious dalam penelitiannya dan mengevaluasi pencapaian sains dan teknologi dalam perspektif totalitas pribadi manusia.

Dialog antara pemikiran Kristiani dan sains (alam dan kemanusiaan) modern, khususnya terkait masalah filosofis dan etis yang kompleks.

Dalam melakukan penelitian, universitas Katolik perlu menemukan (a). integrasi pengetahuan, (b). melakukan dialog antara iman dan akal budi, (c). memiliki kepedulian pada persoalan etis, dan (d), memperhatikan perspektif teologis dari persoalan yang diteliti.

Menunjang terjadinya dialog antara gereja dan budaya jaman ini yang amat penting bagi masa depan Gereja dan dunia.

Penuh perhatian pada beragam budaya dunia dewasa ini dan beragam tradisi budaya yang ada dalam gereja sedemikian sehingga memajukan dialog terus menerus dan menguntungkan antara Injil dan masyarakat modern.

Mengkaji dan mengevaluasi nilai-nilai dan norma-norma yang dominan dalam masyarakat serta kebudayaan modern dalam perspektif Kristiani; universitas Katolik perlu mengkomunikasikan kepada masyarakat prinsip-prinsip etis dan religius yang memberi makna pada kehidupan manusia.

Pewartaan Kabar Baik

Berani menyuarakan kebenaran yang tidak mengenakkan bagi pendapat umum, tetapi perlu demi menjaga kebaikan otentik masyarakat.

Menyampaikan kepada para mahasiswa semangat pelayanan Kristiani terhadap sesama dalam menegakkan keadilan sosial; Gereja berkomitmen penuh pada pertumbuhan integral dari perempuan dan laki-laki, memperhatikan kebutuhan mereka yang miskin dan menderita.

Berdasarkan keempat mandat tersebut setiap PT Katolik wajib (1) memiliki, menguatkan dan mengembangkan identitas Katoliknya; (2) menempatkan sumbangan pada Gereja sebagai salah satu tujuan keberadaannya; (3) senantiasa mendorong terwujudnya perpaduan akal budi dan iman, integrasi ilmu pengetahuan dan dialog antara Gereja dan kebudayaan masyarakat; dan (4). secara aktif mewartakan kabar baik – berupa kebenaran dan pemihakan kepada yang lemah. Dua

mandat yang pertama (1) dan (2) lebih melibatkan konstelasi internal, sedangkan dua terakhir (3) dan (4) melibatkan perjumpaan dengan pihak eksternal.

ECE sebagai Daya Ungkit?

ECE sebenarnya memberi panduan bagi PT Katolik untuk melepaskan diri dari proses pencarian ilmu dan kebenaran yang pragmatis dan mengandalkan jalan pintas. Universitas sebagai rumah belajar sebenarnya sesuai dengan salah satu spirit Universitas Katolik. Merujuk pada ungkapan salah satu responden dalam studi Morey & Piderit (2006)¹⁵ pendekatan Katolik untuk pendidikan dan pencarian kebenaran adalah terbuka dan luas, tidak sempit dan terbatas. Thomas Aquinas pernah berujar, "*Beware of the man with the single book*". Tradisi Katolik bukanlah warisan pendidikan dengan buku tunggal, melainkan memberi kepada pembelajar kebebasan untuk menjelajah, dengan selalu berbekal pertanyaan: "mengapa". Di dalam rumah belajar, para pembelajar akan menjelajahi dunia semesta ilmu pengetahuan dengan penuh kesukacitaan.

Dalam rumusan lain, universitas (Katolik) hendaknya tidak terjerumus pada pragmatisme dan utilitarianisme seperti yang diingatkan oleh Paus Benediktus XVI dalam sambutan beliau di hadapan para dosen muda di Madrid (19/8/2011). Beliau mengingatkan "...*We know that when mere utility and pragmatism become the principal criteria, much is lost and the results can be tragic: from abuses associated with a science which acknowledges no limit beyond itself, to the political totalitarianism which easily arises when one eliminates any higher reference than the mere calculus of power. The authentic idea of university, on the other hand, is*

¹⁵ Moery, M.M. & J.J. Piderit (2006). Catholic Higher Education – A Culture in Crisis. Oxford University Press. New York.

*precisely what save us from this reductionist and curtailed vision of humanity*¹⁶.

Roh pendidikan tinggi Katolik adalah transformasi bukan transaksi. Dalam rumusan lain, pendidikan tinggi Katolik tidak sekedar *credit bearing*, melainkan *life giving*. Lembaga pendidikan tinggi Katolik idealnya mengajarkan kepada mahasiswa bukan hanya tentang bagaimana mencari nafkah, tetapi bagaimana menjalani hidup dengan panduan moral dan etika – berlandaskan nilai-nilai. Pendidikan harus memberikan kompas moral yang memungkinkan para mahasiswa melewati berbagai krisis dalam perjalanan kehidupan mereka nantinya.

Selanjutnya, perkenankan kami membagikan secuil pergulatan di Universitas Soegijapranata dalam upaya menjalankan mandat sesuai ECE dan sekaligus menjadikannya sebagai pengungkit bagi universitas kami.

Bermula dari tiga puluh dua tahun yang lalu (1982) saat “Soegijapranata” telah dipilih sebagai nama sebuah perguruan tinggi di Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA). *Civitas academica* UNIKA menyadari bahwa menyandang nama beliau adalah sebuah tanggung jawab sejarah. Pilihan atas nama “Soegijapranata” ternyata memberi peluang untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh ECE tidak secara satu persatu melainkan lintas mandat.

Mandat (1) untuk menjaga identitas kekatolikan, lewat komitmen kelembagaan telah terus diupayakan sejak universitas kami berdiri. Didorong oleh kesadaran untuk terus menggali dan mengkaji nilai-nilai Soegijaparanata yang relevan - baik dalam kerangka

¹⁶ Zenon Cardinal Grochowski (2013). “Be excellent, be Catholic!” – The Mission of Catholic Higher Education for New Evangelization. A Keynote Address at the 21st ASEACCU Conference. Seoul. August 23 – 2013.

historis maupun kekinian, dan untuk meneguhkan tanggung jawab kelembagaan itu maka pada tahun 2009 UNIKA telah mendirikan *the Soegijapranata Institute* (TSI). Lembaga ini bertugas untuk menggali, mengembangkan nilai-nilai Mgr. Soegijapranata, serta mendiseminasikan dan menginternalisasikannya kepada segenap *civitas academica*, umat Katolik dan masyarakat umum.

Dalam usianya yang baru lima tahun TSI telah terlibat dan dilibatkan dalam banyak aspek pengelolaan universitas kami, khususnya yang terkait dengan pendidikan nilai, dan kepegawaian. Dengan kata lain, secara berangsur-angsur TSI telah mengambil peran sebagai penjaga nilai di instiusi kami. Melalui TSI universitas ini menyelenggarakan refleksi karya (untuk semua dosen dan tenaga kependidikan), *Soegijapranata Memorial Lecture* (untuk pejabat struktural dan biro/UPT), kursus teologi, retret dosen dan karyawan, seminar dan diskusi . Untuk mahasiswa penanaman nilai-nilai dilaksanakan melalui kegiatan Pembekalan Terpadu Mahasiswa Baru (PTMB) dan pelatihan *Awaken The Giant Within* (ATGW) bagi seluruh mahasiswa baru.

Masih untuk mandat (1) identitas Katolik, keberadaan Reksa Pastoral (*Campus Ministry*) sangat instrumental dalam yaitu pelaksanaan pelayanan pastoral pada warga universitas demi membantu integrasi iman dan kehidupan mereka. Dalam waktu dekat ini, kami berharap akan memiliki Pasturan di dalam lingkungan kampus yang sekaligus juga akan menyediakan ruang kantor untuk TSI. Ke depan, bukan tidak mungkin kami akan memiliki pejabat khusus yang mengawal identitas dan misi universitas, misalnya Wakil Rektor bidang misi (*Vice President for Mission*).

Selanjutnya, masih terkait dengan identitas lembaga, dalam perjalanan hidup UNIKA sebuah motto pernah digulirkan yaitu “*Striving for Excellence*” (2005). Namun begitu, sejak beberapa

tahun terakhir motto lama itu mulai dirasakan kurang “menggigit”. Moto lama itu terkesan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Unika Soegijapranata dan tuntutan jaman. Terutama karena di dalamnya kurang tercermin unsur nilai.

Tahun 2012, Unika Soegijapranata seolah diingatkan untuk terus menghidupi spirit dan nilai-nilai Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ. di dalam segenap sendi peri-kehidupan kampus. Meskipun sejak 2009 yang lalu, kami berusaha untuk mulai menggali spirit dan nilai nilai Patron kami itu melalui TSI , kami bersyukur bahwa kami juga mendapat dorongan yang hebat dari luar. Pada tahun 2012, *civitas academica* Unika Soegijapranata telah diguncang kegembiraan oleh hadirnya film SOEGIJA. Melalui film itu spirit dan nilai-nilai SOEGIJA telah diperkenalkan dan disemai di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Tidak berlebihan jika harus diakui bahwa kehadiran dan keberhasilan penayangan film itu telah meneguhkan keyakinan *civitas academica* universitas ini akan perlunya penggalian, penghayatan, penyemaian dan pengamalan spirit serta nilai-nilai SOEGIJA. Seolah, konsistensi dan persistensi untuk terus menjunjung nama Soegijapranata selama 30 tahun terbayar sudah¹⁷.

Alhasil di tahun itu pula Senat Universitas Katolik Soegijapranata mampu merumuskan motto baru universitas yang benar benar bersumber dari Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ., yaitu **“Talenta untuk tanah air dan kemanusiaan”** atau dalam bahasa Latin **“Talenta pro patria et humanitate”**, atau dalam bahasa Inggris **“Talent for the country and humanity”**. Uniknya, motto baru ini “hanya” intisari dari kalimat dalam prasasti di bawah patung Mgr. Alb. Seogijapranata, SJ. yang sudah lama berdiri tegak di

¹⁷ Di dalam perjalannya nama “Soegijapranata” yang sulit dieja dan diucapkan (apalagi oleh penutur bukan Jawa, apalagi asing) dan “sempat” dianggap sebagai penghambat pengenalan universitas kami melampaui batas geografis Semarang dan Jawa Tengah. Akibatnya, beberapa usulan perubahan nama sempat mengemuka.

depan Gedung Albertus kampus ini (“*Bakat pemberian Allah jangan hanya kau sembunyikan, persembahkan sepenuhnya bagi nusa, bangsa dan negara*”).

Selanjutnya, tentu sebuah keniscayaan bahwa setiap derap langkah universitas kami dipandu oleh spirit Mgr. A. Soegijapranata, yang dalam motto itu. Oleh karenanya setiap upaya untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan akademik harus senantiasa dilandasi oleh niat untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat dan kemanusiaan. Dalam hal ini, jika motto itu sungguh kami hayati dan amalkan maka mandat (2) sumbangan bagi Gereja dan (4) pewartaan kabar baik - yang diamanatkan ECE berpeluang untuk dipenuhi.

Masih untuk mandat (4) pewartaan kabar baik - motto baru ini juga menjawab tantangan kekinian yang tengah dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi. Tantangan itu adalah arus globalisasi pendidikan tinggi yang dengan sendirinya menyeret juga universitas universitas Indonesia ke dalamnya. Semuanya berlomba untuk menjadi global, ikut larut dalam berbagai skema pemeringkatan, internasionalisasi dan sebagainya.

Menjadi kompetitif secara global tentu adalah cita cita semua perguruan tinggi, tetapi ada nilai utama perguruan tinggi yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Hal ini semakin nyata ketika perguruan tinggi memiliki wajah yang sangat beragam. Maka orientasi pada penyeragaman aspirasi – mengglobal saja misalnya – sangatlah tidak mencukupi. Perguruan Tinggi Indonesia perlu menemukan ceruk terbaiknya untuk menyeimbangkan antara aspirasi global dan tanggungjawab lokal. Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas harus mampu menyeimbangkan pemenuhan aspirasi global dan peran lokalnya. Universitas tidak seharusnya melupakan alasan kelahirannya. Universitas

dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Frasa *pro patria et humanitate* dalam motto universitas kami memberi dorongan bagi kami untuk menyeimbangkan aspirasi global dan lokal.

Proses penguatan identitas yang bermuara pada penemuan kembali spirit dan nilai Soegijapranata dalam motto baru "*Talenta pro Patria et Humanitate*" ternyata "memudahkan" kami dalam pengembangan universitas secara multidimensional. Pengembangan program Tri Dharma, kemahasiswaan, kepegawaian (termasuk dalam penilaian kesesuaian pegawai dan organisasi, KPO) dan bahkan pemasaran (termasuk promosi dan iklan) menjadi lebih terarah dan tajam. Singkatnya, motto tersebut telah berhasil mewujud menjadi tema dan rujukan utama bagi seluruh program dan aktivitas kampus – yang pada gilirannya menjadi pembeda unik universitas kami dibandingkan universitas-universitas lain – setidaknya di Semarang dan Jawa Tengah. Sebagai konsekuensi dari "perbedaan" itu maka secara bertahap "pengenalan" (*recognition*) terhadap universitas kami rasakan turut meningkat¹⁸.

Epilog

Secara umum kami merasa bahwa meskipun masih jauh dari sempurna implementasi mandat (1) dan mandat (4) ECE di universitas kami sudah cukup terstruktur. Namun, tentu saja unsur substantifnya perlu senantiasa ditingkatkan. Dalam refleksi kami, dibandingkan mandat (1) dan (4), struktur untuk implementasi mandat (2) dan (3) masih sangat perlu ditingkatkan.

¹⁸ Secara khusus kami belum melakukan penelitian untuk membuktikan itu, tetapi data penerimaan mahasiswa baru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun akademik 2012/2013, selain juga diperkuat oleh adanya penelitian (S1 dan S2) oleh mahasiswa universitas lain terhadap konsep dan strategi promosi universitas kami yang dianggap unik.

Untuk memberikan sumbangan bagi Gereja, terutama sumbangan bagi karya penginjilan Gereja dan bantuan bagi Gereja dalam menanggapi masalah dan kebutuhan jaman melalui hasil penelitian universitas, universitas kami belum memiliki kerangka kerja khusus. Proses implementasi mandat (2) **Bantuan bagi Gereja** bisa disebut masih bersifat “organik” atau alami. Meskipun begitu universitas kami telah terlibat di dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan Keuskupan Agung Semarang, lengkap dengan fasilitasi implementasinya di paroki-paroki. Begitu pula, universitas kami juga terlibat dalam pembangkitan basis data umat Paroki di lingkup Keuskupan Agung Semarang. Ke depan, memang universitas kami perluk menyiapkan pendekatan yang lebih sistematik dalam memberikan sumbangan kepada Gereja.

Untuk mandat (3) **Perpaduan akal budi dan iman, Integrasi Ilmu dan Dialog Kebudayaan** – kami juga belum memiliki program terstruktur sehingga juga masih berlangsung “alami”. Salah satu kekurangan struktural yang menghambat kami untuk mengimplementasikan mandat (3) adalah ketiadaan Jurusan/Program Studi Teologi dan Filsafat di universitas kami. Meskipun demikian integrasi ilmu dan kajian etika cukup mendapat perhatian *civitas academica*, khususnya oleh mereka yang belajar dalam ranah multi- dan inter-disiplin bidang seperti antara lain manajemen, lingkungan-perkotaan, pemukiman, pangan dan hukum-kesehatan.

Selain itu kami juga telah mengawali prakarsa kecil untuk menjalankan mandat (3) itu dengan menjalankan kegiatan *whole person education* berbasis metode *service learning*. Metode ini adalah sebuah “ramuan” pedagogi yang mengintegrasikan perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar demi menanamkan tanggung jawab kewargaan (*civic responsibility*) dan pemberdayaan

masyarakat. Dalam konsep Bonner Foundation¹⁹, tiga prinsip SL adalah *collaborative* (kerjasama), *validates multiple sources of knowledge* (menghormati keragaman sumber pengetahuan), dan *social action and social change* (gerakan dan perubahan sosial). Proses pelembagaan metode ini tengah berjalan melalui sebuah lembaga yang baru kami bentuk setahun belakangan ini, yaitu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3).

Yang nyaris belum sempat kami sentuh terkait dengan mandat (3) adalah perpaduan akal budi dan iman dan dialog gereja-kebudayaan. Mengingat dalam waktu dekat ini, universitas kami belum akan memiliki Jurusan Filsafat dan Teologi, kami berharap kajian perpaduan akal budi dan iman (*transdisciplinary studies*) akan dirintis oleh *the Soegijapranata Institute* bekerja sama dengan para peneliti dan melibatkan para teologawan dan filsuf dari dalam maupun luar.

¹⁹ Keen, C. & J. Keen (1998). *Bonner student impact survey*. Princeton, NJ: Bonner Foundation.

Kegembiraan Mengajar Mengalir dari Hati*

Prolog

Saya meyakini bahwa salah satu sasaran utama pengelolaan sebuah universitas adalah mewujudkan kampus yang “MENGESANKAN” dan “BERMAKNA” bagi semua pihak yang kena mengena dengannya – baik warga kampus (mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen) maupun masyarakat luas. Pada hekekatnya universitas adalah sebuah rumah belajar (*a place of learning*) bagi mahasiswa - segala jenjang (diploma, sarjana dan pasca sarjana) - dosen, tanpa mengecualikan para tenaga kependidikan.

Mahasiswa ke kampus bukan hanya untuk dikuliah, melainkan untuk belajar. Begitu pula para dosen ke kampus bukan hanya untuk mengajar melainkan juga terus belajar. Para karyawan ke kampus bukan hanya demi menjalankan tugas rutin belaka, melainkan juga belajar untuk terus mengasah kompetensi dan memperbaiki pelayanan. Kehidupan kampus yang ideal mewujud dalam suasana sukacita belajar (*the joy of learning*) bagi setiap

* Disajikan dalam Seminar Pedagogi & Andragogi Inspiratif, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pembelajaran (LP3), UNIKA Soegijapranata, 10 Juli 2015.

insan yang berada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan gambaran ideal Universitas Katolik yang tertuang dalam *Ex corde Ecclesiae* – Konstitusi Apostolik tentang Pendidikan Tinggi (1990): “*By vocation, the Universitas magistrorum et scholarium is dedicated to research, to teaching and to the education of students who freely associate with their teachers in a common love of knowledge*”.

Universitas adalah lembaga yang sarat dengan pendidikan dan pengajaran. Universitas memang sebuah rumah belajar. Ungkapan “*universitas magistrorum et scholarium*” (universitas sebagai komunitas guru dan murid) secara gamblang menunjukkan itu. Bahkan dalam bentuk awalnya, universitas abad pertengahan (di Eropa) sebenarnya dilahirkan dan lantas dikelola oleh kumpulan guru atau dosen. Untuk mewujudkan kampus yang demikian maka diperlukan para dosen yang bukan hanya menonjol secara intelektual dan mampu mengajar melainkan yang mau sepenuh hati, jujur dan antusias terhadap profesinya.

Rumah Belajar

Menurut George Dennis O'Brien dalam buku “*All the Essential Halftruths about Higher Education*” (O'Brien, 1998) menyebut “universitas sebagai rumah belajar” memang bak menyebut “bujangan sebagai lelaki yang belum menikah”. Tetapi dia mengingatkan bahwa hakekat universitas sebagai rumah belajar jangan sampai dilupakan “hanya” demi menjawab tantangan perubahan jaman.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), kecuali mendukung perekonomian - tiga dari empat tujuan utama universitas menyangkut proses belajar (*learning*) yatu:

(1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Laurillard, 2002). Mandat universitas memang bukan hanya melaksanakan riset. Bahkan ketika kita menengok peran yang diharapkan dari sebuah universitas riset (*research University*) maka produk pertamanya adalah pendidikan (Lendel, 2010).

Dalam pendidikan, jangan pernah dilupakan bahwa setiap manusia pada dasarnya unik. Ini bukan hanya berlaku bagi mahasiswa tetapi juga para dosen. Di satu pihak, setiap universitas ditantang untuk dapat mentransformasikan keragaman kualitas asupan mahasiswa menjadi sebuah keunggulan. Untuk dapat mewujudkannya, curahan waktu dan tenaga saja tidaklah mencukupi, para dosen juga harus terus-menerus mengasah empati. Dalam interaksi dengan para mahasiswanya seorang dosen berperan sebagai *mentor* yang dituntut memiliki sejumlah kualitas, antara lain sebagai teman sekaligus pembimbing, lebih matang, otoritas akademik, pengasuh, dan sepenuh hati.

Di pihak lain, harus disadari pula bahwa setiap insan dosen pada hakekatnya berbeda. Keragaman dosen tentu multidimensional - mulai dari keragaman keahlian hingga kepribadian - yang tentunya akan berimbang pada gaya dan ketrampilan mengajar. Apapun kepakaran dan gaya mengajarnya dalam menjalani profesinya, seorang dosen berhak atas kepuasan dan kebahagiaan kerja. *The joy of learning* hanya dapat terjadi ketika dosen dan mahasiswa sama-sama menemukan kesukacitaan.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mewujudkan kesukacitaan itu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi gagasan tentang tantangan pada para dosen untuk menemukan kesukacitaan ketika menjalankan profesinya. Meminjam istilah

Palmer (1998) yang menjadi tantangan terbesar para dosen adalah menemukan “*The Courage to Teach*”.

The Courage to Teach

Saya memang sudah cukup lama ingin berbagi dengan rekan-rekan sejawat tentang buku Palmer (1998) itu. Palmer menulis bukunya bertumpu pada premis “*Good teaching cannot be reduced to technique; good teaching comes from the identity and integrity of the teacher*”. Memang sosok guru atau dosenlah yang menentukan baik buruknya proses belajar mengajar, bukan teknik pengajarannya. Keberhasilan dalam mengajar ditentukan oleh jati diri dan integritas sang dosen. Kemampuan kita untuk secara simultan “nyambung” (*to connect with*) – atau mungkin lebih tepatnya melebur - dengan mahasiswa dan mata kuliah lebih ditentukan kejujuran pada diri sendiri daripada oleh metode pembelajaran yang kita gunakan.

Ilustrasi berikut ini mungkin kita jumpai dalam keseharian di kampus ini. Berdasarkan percakapan dari tahun ke tahun dengan para mahasiswa tentang sosok dosen yang baik, Palmer (1998) menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mendaku bahwa dosen yang baik menerapkan metode pembelajaran yang sama. Dosen-dosen yang baik versi mahasiswa ternyata menggunakan cara mengajar yang sangat beragam. Ada yang mengandalkan ceramah tidak banyak memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau mendebat; namun ada pula yang sedikit bicara dan memberi banyak kesempatan mahasiswa untuk berpendapat. Ada yang ketat mengikuti bahan kuliah; ada yang justru mengandalkan imaginasi untuk memberi konteks pada bahan kuliah. Begitu pula, ada yang cenderung suka memberi “imbalan” (*carrot*) kepada mahasiswa; dan ada yang justru mengandalkan sanksi (*stick*). Namun yang pasti, semua dosen

yang baik tadi memiliki satu sifat (*trait*) yang sama, yaitu pribadi yang hadir (*present*) atau mengada (*in existence*) saat kuliah. Mahasiswa mengungkapkannya dalam kalimat-kalimat seperti “Pribadi Bu A benar-benar hadir di saat beliau mengajar”; “Pak B sangat antusias dalam mengajarkan mata kuliahnya”; “Kita bisa merasakan bahwa mata kuliah itu adalah hidup Profesor C”. Bahkan ada mahasiswa yang kesulitan memerikan sosok dosen yang baik, karena menurutnya para dosen yang baik sangat berbeda satu sama lain – namun tidak demikian dengan para dosen yang buruk. Menurut mahasiswa itu, para dosen yang buruk dapat berciri sama, yaitu *“Their words float somewhere in front of their faces, like the balloon speech in cartoons”* (Perkataan mereka seolah mengambang di depan wajah mereka, seperti teks dalam komik yang diwadahi “balon”).

Dalam rumusan Palmer (1998) dosen yang baik memiliki kemampuan untuk membentuk tenunan yang kompleks antara dirinya dengan mata kuliahnya dan mahasiswa – sehingga para mahasiswa dapat belajar menenun dunianya sendiri. Bagi seorang dosen tentu sangat membahagiakan ketika menyaksikan mahasiswa kita nantinya berhasil menjadi manusia mandiri yang mampu menenun dunianya sendiri. Sebagai penenun kita bisa menggunakan beragam metode pengajaran, mulai dari ceramah, dialog ala Socrates, percobaan laboratorium, pemecahan masalah melalui kerjasama, dan bahkan *creative chaos*. Sekali lagi, bukan metode yang menentukan tenunan para dosen ini, melainkan hati mereka – sebagai tempat meleburnya intelek, emosi, spirit dan kemauan seorang manusia.

Perlu perlu diantisipasi bahwa seiring dengan perjalanan karir mengajar tidak jarang muncul godaan untuk melemahkan suara itu. Dalam dunia yang semakin menghargai ilmu pengetahuan dalam bentuk uang (*knowledge economy*) keteguhan hati para

dosen sering diuji. Kita tentu mengenal berbagai julukan untuk dosen “selebriti”, seperti “seminaris” (rajin seminar, pengamat), “proyektor” dan konsultan. Kegiatan mereka memang dapat digolongkan sebagai darma pengabdian kepada masyarakat. Hanya saja kegiatan-kegiatan itu umumnya berbayar dan bayarannya masuk ke *kocek* pribadi. Tentu kiprah para dosen “selibriti” ini juga menguatkan reputasi universitasnya. Meskipun begitu, yang seringkali terjadi mereka lebih undangan pekerjaan di luar kampus daripada kewajiban utama di kampus.

Tentu tidak semua dosen “selebriti” terjebak dalam pola itu. Dosen yang menolak undangan pekerjaan luar - dengan berujar “maaf saya ada jadwal mengajar pada jam yang sama” - sangat boleh jadi justru lebih dihargai oleh pihak pengundang karena bersikap profesional. Kejadian seperti itu boleh saja ditanggapi dengan kekaguman, namun sebenarnya itu adalah sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, sang Guru Besar benar-benar menghayati esensi sebuah universitas sebagai komunitas dosen dan mahasiswa, *magistrorum et scholarium*. Bagaimana jadinya jika kampus sering ditinggalkan para Guru Besarnya untuk “mengamen” ke mana-mana.

Kita yang berkarya di dunia pendidikan harus menyadari bahwa pada dasarnya setiap manusia itu unik. Dengan demikian, setiap universitas ditantang untuk dapat mentransformasikan “modal” mahasiswa yang umumnya terbatas menjadi sebuah keunggulan. Untuk dapat mewujudkannya, curahan waktu dan tenaga, serta teknik mengajar saja tidaklah mencukupi. Dosen harus terus-menerus mengasah empati pula. Dalam berinteraksi dengan para mahasiswanya seorang dosen diharapkan berperan sebagai *mentor* yang memiliki sejumlah kualitas, seperti menjadi teman sekaligus pembimbing, lebih matang, otoritas akademik, pengasuh, dan sepenuh hati.

Kualitas *mentor* itu terbaca sangat jelas dalam kisah tentang seorang dosen UNPAR yang pernah mengunjungi semua tempat kos mahasiswa di bawah perwaliannya (baca Sufiyanto, 2015). Kisah-kisah seperti itu sungguh membangkitkan semangat. Ternyata masih ada rekan dosen yang dengan sungguh-sungguh menorehkan goresan indah dalam lukisan wajah pendidikan tinggi Indonesia yang penuh bopeng. Mereka menghadirkan oasis di tengah lansekap pendidikan tinggi kita yang mulai gersang, tergerus oleh semangat pragmatisme dan industrial. Sebagai orang yang telah bekerja hampir 30 tahun di pendidikan tinggi, saya hanya bisa menyimpan kekaguman itu di dalam hati dan tergerak untuk segera membagikannya kepada para kolega.

Mentoring antar dosen juga cukup penting dalam menciptakan kesukacitaan belajar di kampus. Dalam pengamatan Palmer (1998) kehebatan para mentor dosen ternyata tidak semata-mata terletak pada cara pengajaran mereka, tetapi pada kemampuan mereka untuk membangkitkan kebenaran dalam diri kita. Kebenaran itu dapat kita temukan bertahun-tahun berikutnya melalui dampak terasakan dalam hidup kita.

Epilog

Palmer (1998) menyebut adanya suara "*the teacher within*" – suara bathin yang bersumber pada kesejadian diri (*the true self*) - yang mendorong seseorang tergerak untuk menjadi guru. Ketika seorang dosen menemukan suara bathin itu maka ia akan mengajar dengan sepenuh hati dan penuh kesukacitaan. Mungkin dalam sepakbola suara bathin itulah yang dikagumi oleh David Beckham – mantan bintang sepakbola Inggris - dari para pemain Brazil yang menurutnya selalu menikmati pertandingan di manapun dan di atas apapun dengan penuh kesukacitaan tanpa mengurangi semangat untuk menang.

Tidak semua orang bisa segera mengenali suara “*the teacher within*”- sejak memutuskan untuk menjadi dosen. Ada yang memerlukan pemicu atau sosok teladan atau idola. Tetapi pada intinya, mereka yang memiliki dan mampu mendengar suara “*the teacher within*” itulah yang akan mereguk kepuasan dan kebahagiaan atas pilihan berkarya sebagai dosen.

Daftar Bacaan

- Ex Corde Ecclesiae*. Apostolic Constitution of the Supreme Pontiff John Paul II on Catholic Universities.
- Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. *EDUCAUSE Review* Jan/Feb 2012. p. 16-25.
- Lendel, I. (2010). The Impact of Research Universities on Regional Economies: The Concept of University Products. *Economic Development Quarterly* 24(3): 210-230. DOI: 10.1177/0891242410366561
- O'Brien, G.D. (1998). *All the Essential Half-Truths about Higher Education*. University of Chicago Press. Chicago.
- Palmer, P.J. (1998). *The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life*. Jossey-Bass Publ. San Francisco.
- Sufiyanto, A.M. (ed.) (2015). Cincin Sang Dosen. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Perguruan Tinggi Indonesia Kewargaan Global dan Kepedulian Lokal*

"Bakat dan pemberian Allah jangan hanya kausembunyikan persembahkan seluruhnya kepada nusa, bangsa dan negara"
- Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ.

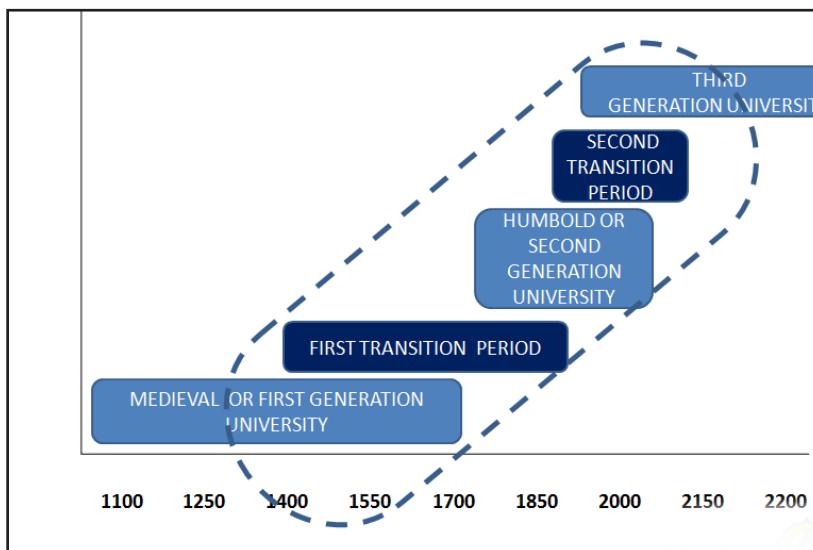
Pendahuluan

Saat ini dunia pendidikan tinggi sedang mengalami perubahan yang radikal. Dalam kritiknya, Wissema (2009) merumuskan keadaan pendidikan tinggi saat ini ditandai oleh (1) komodifikasi pendidikan, (2) universitas semakin menjadi obyek regulasi pemerintah, (3) efisiensi dan efektivitas mengencam kebebasan akademik, (4) pembengkakan birokrasi (ukuran dan kompleksitas) universitas, (5) manajer purna waktu semakin diperlukan, (6) universitas semakin serupa dengan pabrik (jumlah publikasi dan sitasi). Menurut Wissema keadaan ini mengingatkan pada salah satu nukilan Robbins Report (1963, Inggris) *'higher education was for instruction in the skills suitable to play a part in the general division of labour'*. Kesan bahwa universitas semakin menghamba pada

* Disajikan dalam Seminar "Indonesian Higher Education: Global Competitiveness and Beyond", UNIKA Soegijapranata, Semarang - 30 April 2012

kebutuhan pragmatik dunia industri memang tidak terelakkan.

Dalam sebuah laporan untuk Konferensi Dunia Pendidikan Tinggi UNESCO 2009 Altbach *et al.* (2009) membandingkan revolusi akademik di akhir abad 19 yang ditandai oleh lahirnya universitas riset (mulai dari Jerman) dan perubahan akademik dramatis yang berlangsung sejak akhir abad 20 hingga awal abad 21 ini. Menurut mereka, revolusi akademik yang tengah berlangsung saat ini jauh lebih ekstensif, karena sifatnya yang global dan dampaknya yang luas terhadap banyak orang dan lembaga yang terlibat. Dalam analisisnya Wissema (2009) menunjukkan perjalanan sejarah perkembangan universitas – yang telah melampaui berbagai transisi (Gambar 1).



Gambar 1. Sejarah Perkembangan Universitas (Wissemma, 2009)

Setiap generasi universitas memiliki tipologi yang khas, sesuai jamannya. Perubahan tipologi ini tentu saja berimplikasi serius terhadap struktur dan fungsi universitas. Secara ringkas Wisema (2009) merumuskan tipologi khas masing masing generasi universitas.



OBJECTIVE	1st Generation University	2nd Generation University	3rd Generation University
ROLE	Education	Education plus research	Education and research plus know-how exploitation
METHOD	Scholastic	Modern science, monodisciplinary	Modern science, interdisciplinary
CREATING	Professionals	Professionals plus scientists	Professionals and scientists plus entrepreneurs
ORIENTATION	Universal	National	Global
LANGUAGE	Latin	National languages	English
ORGANIZATION	Nationes, faculties, colleges	Faculties	University institutes
MANAGEMENT	Chancellor	(Part-time) academics	Professional management

Gambar 2. Tipologi Tiga Generasi Universitas (Wissemma, 2009)

Konstituen utama revolusi akademik saat ini – atau universitas generasi ketiga - adalah masifikasi (*massification*) yang disertai oleh sejumlah fenomena yaitu lonjakan mobilitas (*mobility*), pola baru pendanaan pendidikan tinggi, semakin beragamnya sistem pendidikan tinggi, termasuk pula penurunan standar akademik, dan sejumlah kecenderungan lain (Altbach *et al.*, 2009).

Di abad 21 pendidikan tinggi memang menjadi suatu wahana yang penuh persaingan, seperti: calon mahasiswa bersaing untuk masuk universitas unggulan, universitas bersaing untuk memperoleh mahasiswa, peringkat dan status (akreditasi) serta dana hibah dari pemerintah maupun sumber lain. Meskipun kompetisi adalah unsur dakhil komunitas akademik - yang seringkali bisa memunculkan keunggulan – penekanan yang berlebihan pada persaingan juga berisiko memerosotkan nilai-nilai utama (tradisional) dan komunitas akademik.

Menghadapi pusaran arus globalisasi pendidikan tinggi Indonesia tentu saja ikut terseret ke dalamnya. Semuanya berlomba untuk

menjadi global, ikut larut dalam berbagai skema pemeringkatan, internasionalisasi dan sebagainya. Menjadi kompetitif secara global tentu adalah cita cita semua perguruan tinggi, tetapi ada nilai utama perguruan tinggi yang tidak boleh dikesampingkan, yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Hal ini semakin nyata ketika perguruan tinggi memiliki wajah yang sangat beragam. Maka orientasi pada penyeragaman aspirasi – mengglobal saja misalnya – sangatlah tidak mencukupi. Perguruan Tinggi Indonesia perlu menemukan ceruk terbaiknya untuk menyeimbangkan antara aspirasi global dan tanggungjawab lokal. Tulisan ini mencoba merumuskan bagaimana keseimbangan itu tercapai, dengan kata lain menemukan posisi yang peka terhadap kecendrungan global tetapi tetap bermakna bagi masyarakat lokal yang membesarkannya.

Kewargaan Global

Mendorong kewargaan global bukan berarti membuat universitas kita harus menghamba pada kecenderungan global belaka. Yang utama sebenarnya bukan berlomba-lomba menjadikan perguruan tinggi kita menjadi warga komunitas global, tetapi justru perguruan tinggi kita harus membekali mahasiswa dan lulusannya dengan kompetensi yang memadai untuk berinteraksi dengan sesama warga dunia serta sekaligus menjadi pelaku aktif – bukan sekedar mampu menyesuaikan diri - dalam perubahan di aras global.

Globalisasi ternyata telah benar benar hadir dalam kehidupan kita, warga Indonesia. Mobilitas manusia Indonesia melintasi batas batas wilayah dan negara terus meningkat hari lepas hari. Mobilitas warga yang meningkat tentu saja berita baik yang harus kita syukuri, tetapi kita harus juga mulai memilikirkan aspek kualitasnya. Kita memerlukan mobilitas yang bermutu artinya

bukan sekedar mobilitas konsumtif (wisata) atau mobilitas tenaga kerja tidak terampil berupa rendah. Mobilitas warga Indonesia yang bermutu ditandai, terutama oleh pergerakan individu individu yang memiliki modal ketrampilan dan intelektual yang secara kompetitif dapat mengisi lowongan kerja profesional di aras regional dan global.

Saat ini kita masih berada di bawah Filipina, misalnya, yang warganya mampu mengisi berbagai jenjang profesi global – yang dalam istilah salah satu peneliti migrasi dari Miriam College, Filipina “*from domestic helpers to CEOs*”. Diberlakukannya komunitas ASEAN pada tahun 2015 nanti merupakan batu ujian bagi Indonesia untuk membuktikan kemampuannya menciptakan mobilitas yang bermutu.

Segenap universitas tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu meningkatkan mobilitas manusia Indonesia yang semakin berkualitas. Sebagai konsekuensinya, universitas dituntut untuk membekali peserta didiknya dengan kompetensi yang sepatutnya dimiliki oleh warga global (*global citizen*). Pendidikan tentang kewargaan global (*global citizenship*) harus mulai diperkenalkan di kampus kampus negeri ini. Universitas harus menyiapkan para mahasiswanya agar “melek” globalisasi (*globally literate*).

Global literacy setidaknya mencakup beberapa ciri berikut ini (1). pola pikir kritis, (2) keingintahuan tentang dunia sebagai entitas utuh, (3) kepedulian dan apresiasi global terhadap konteks sejarah dan budaya kejadian yang tengah berlangsung di dunia saat ini, (4) kepedulian etis: dari cara pandang *ethnocentric* ke “*ethno-relative*”, (5) pengetahuan tentang bagaimana menjawab dan memecahkan masalah lintas budaya, (6) ketrampilan berbicara dan menulis dalam bahasa internasional, (7) kefasihan budaya: kemampuan untuk dengan mudah berpindah ke dalam dan antar budaya (Johnstone *et al.*, 2010).

Beberapa elemen kunci yang dapat disertakan dalam pendidikan "melek" globalisasi di kampus kampus antara lain adalah (1) Apa itu globalisasi? Khususnya era Asia dan peran Indonesia, (2) pengantar tata kelola global, (3) pengantar kepedulian lintas budaya, (4) kerjasama tim ragam budaya, (5) negosiasi lintas budaya, dan (6) ketrampilan menyajikan gagasan (Widianarko, 2012).

Kepedulian Lokal

Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas yang hanya melayani aspirasi global sangatlah tidak mencukupi. Dalam sejarahnya, ada suatu masa ketika universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan, seperti Bologna (1158), Paris (1170), Cambridge (1209) dan Praha (1348) didirikan oleh warga kota. Sebagai *Universitas scientiarum*, perguruan-perguruan tinggi itu dijalankan oleh masyarakat warga (*civil society*) – sehingga tanggung jawab universitas adalah tanggungjawab kewargaan (Kieser, 2009).

Dalam konteks kekinian, ketika ia harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), universitas memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) mendukung perekonomian, (4) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Lord Dearing's National Committee of Inquiry into Higher Education UK, seperti dikutip Laurillard, 2002). Masih menurut Laurillard (2002), dengan terpenuhinya keempat tujuan itu diharapkan universitas dapat berperan untuk memampukan masyarakat untuk terus secara mandiri memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunia

sekitarnya - *to enable society to maintain an independent understanding of itself and its worlds*. Dengan kata lain universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Nilai penting universitas dalam sebuah masyarakat terletak pada kemampuannya menyampaikan kabar baik kepada masyarakat. Universitas harus mampu senantiasa membaca tanda-tanda jaman dan mengabarkannya kepada masyarakat. Dalam menghadapi arus kuat globalisasi dan gairah kebendaan yang luar biasa dahsyat saat ini, universitas mau tidak mau harus berada di garda depan. Universitaslah lahan persemaian para pemimpin masyarakat yang nantinya diharapkan mampu mengarungi arus deras globalisasi dan meredam gairah kebendaan itu.

Universitas punya tanggungjawab untuk menghasilkan para pemimpin yang sanggup membaca tanda-tanda jaman secara arif dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan. Tetapi – suka tidak suka – sangat boleh jadi seluruh pelaku atau pemicu krisis kemasyarakatan adalah produk universitas juga. Meminjam ungkapan Albert Einstein, memang biang keladi semua krisis adalah pikiran manusia sendiri. *"The world we have created is the product of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking"*, tulis Albert Einstein.

Untuk mengubah wajah dunia yang buram ini hanya dapat dimulai dari perubahan pemikiran. Di dalam pemikiran tentu saja melekat nilai dan etika. Dan dalam hal ini universitas adalah salah satu “dapur” pemikiran terpenting dalam masyarakat. Dengan kata lain, mandat universitas adalah membentuk dan mengasah pemikiran dosen, mahasiswa dan alumninya (*civitas academica*) agar senantiasa memihak, berpikir dan bertindak demi kemaslahatan dan masyarakat sekitarnya. Jika mandat ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh universitas universitas kita, maka itulah kabar baik yang dirindukan oleh masyarakat.

Menyikapi Indonesia

Universitas di negeri ini juga ditantang untuk mampu menyikapi perkembangan Indonesia secara lebih baik. Setelah terpuruk oleh krisis 1998, Indonesia kini diprediksi oleh sejumlah pihak akan betransformasi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini Indonesia telah berada di peringkat 17 ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat 6 di antara negara berkembang (baca: The Indonesia Competitiveness Report 2011 - The World Economic Forum). GDP per kapita Indonesia pada tahun 2010 disebut sudah melampaui 4000 USD.

Lebih jauh, menurut skenario Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) - yang disusun pemerintah pada awal tahun ini - Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 Triliun. Dari sisi daya saing, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index, GCI*) Indonesiapun terus beranjak naik dari peringkat 54 (114 negara yang distudi) ke 44 (139 negara yang distudi) pada tahun 2010.

Angka angka yang sangat menakjubkan itu tetapi mengundang meragukan. Apalagi jika kita perhadapkan dengan gelombang kabar buruk yang melanda media cetak dan elektronik di negeri ini. Berita dan ulasan tentang korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan kemiskinan, pengurasan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan di seluruh sudut negeri tentu secara alami membuat kita mudah berprasangka terhadap gambaran hebat pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagai sebuah komunitas akademik, *civitas academica* universitas sudah selayaknya menanggapi “kabar baik” perkembangan

Indonesia secara obyektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis yang merupakan ciri khas kaum intelektual. *Civitas academica* jangan sampai terjebak dalam apa yang dalam ilmu statistika dikenal sebagai **Kesalahan Jenis Pertama** atau *Error of the First Kind*. Jangan sampai – karena hanya mengandalkan kemampuan olah pikir yang diwarnai prasangka - kita secara prematur menolak “hipotesis” bahwa perekonomian Indonesia berkembang pesat yang sejatinya benar. Jangan jangan, Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru (*mindset*) warganya (Widianarko, 2011).

Tentu saja potret cantik perekonomian Indonesia bukannya tanpa catatan. Kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu hampir sepenuhnya pada ekspor komoditas primer dan hasil ekstraksi sumber daya alam, seperti pada masa kolonial Belanda – sedangkan kinerja sektor manufaktur masih lemah. Indonesia bahkan dikhawatirkan mengalami kutukan sumber daya (*resource curse*) karena tidak berhasil dalam menganekaragamkan ekonominya sehingga tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas primer (The Kian Wie, 2011).

Catatan yang senada juga diberikan oleh Forum Ekonomi Dunia (*the World Economic Forum*, WEF). Menurut lembaga ini, meskipun tingkat daya saingnya semakin menguat Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sejumlah pilar daya saing, antara lain kesehatan masyarakat, infrastruktur, efisiensi ketanagakerjaan, dan kesiapan teknologi (*technological readiness*)⁷. Penilaian GCI bertumpu pada 12 pilar daya saing, yaitu: (1) kelembagaan, (2) infrastruktur, (3) lingkungan ekonomi makro, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi dan pelatihan, (6) efisiensi pasar, (7) efisiensi ketenagakerjaan, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) ukuran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi.

Saat ini yang tengah menjadi primadona dalam diskursus publik adalah pilar pertama: kelembagaan. **Pilar Kelembagaan** menyangkut mutu lembaga publik dan swasta, termasuk efisiensi pemerintahan, tingkat keamanan, *governance* korporasi, keadilan dan transparansi lembaga lembaga publik. Tanpa bermaksud menafikan kerusakan kronik pilar kelembagaan di negeri ini, menurut hemat saya sudah terlalu banyak waktu dan energi yang tercurah untuk membahasnya di semua jenis media dan ruang ruang publik. Universitas, menurut hemat saya, sebaiknya tidak larut begitu saja dalam arus kuat diskursus publik – yang semakin hari semakin pekat dengan nuansa politik. Ketika semakin banyak institusi kemasyarakatan, terutama media, semakin leluasa dan tanpa canggung lagi memeragakan bias politiknya maka universitas sudah selayaknya terpanggil untuk terlibat secara obyektif atas nama kepentingan masyarakat luas.

Dengan kata lain, di samping terus secara kritis memantau dan menyampaikan saran terhadap jalannya pembangunan, universitas sudah selayaknya pula ikut memperkuat daya saing Indonesia sesuai dengan fungsi dan ranah kerjanya. Mengacu pada ke 12 pilar daya saing WEF, setidaknya ada tiga pilar yang langsung kena mengena dengan universitas, yaitu pilar (5) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, (9) Kesiapan Teknologi dan (12) Inovasi. Inti dari pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan fokusnya adalah mutu dan akses ke pendidikan menengah dan tinggi, serta mutu magang kerja calon lulusan. Pilar Kesiapan Teknologi terfokus pada penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi untuk memacu produktifitas. Pilar Inovasi mencerminkan potensi nasional dalam membangkitkan kemampuan inovasi dakhil (*endogenous*).

Menurut hemat saya semua universitas di Indonesia sudah

selayaknya menempatkan pengembangan ketiga pilar tersebut di atas sebagai prioritas. Ketiga pilar itu layak untuk secara frontal dihadapi oleh semua universitas – baik sebagai tantangan maupun peluang. Akses dan mutu pendidikan tinggi, kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi, serta kemampuan inovasi sudah seharusnya menjadi agenda kerja universitas universitas di negeri ini, kecuali jika mereka siap ditinggal oleh gerbang kemajuan Indonesia. Akhirnya, yang pantang dilupakan adalah bahwa universitas adalah wahana persemaian generasi muda yang harus siap mengarungi tantangan jaman baru, bukan mereka yang terkungkung oleh ketidakberdayaan masa lalu. Indonesia yang akan dihadapi oleh mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

Jalan Masuk

Untuk bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat diperlukan satu elemen penting dalam pendidikan tinggi yaitu cara berpikir kritis (*critical thinking*). Kemampuan untuk berpikir kritis dicirikan oleh sikap tidak mudah menerima begitu saja klaim kebenaran dengan selalu mempertanyakan validitas dan mutu alasan di balik kebenaran yang diklaim itu. Namun untuk berkarya dan hidup bermasyarakat di jaman yang berubah sangat cepat ini, bekal *critical thinking* saja tidak mencukupi lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, yang begitu dahsyat sangat berisiko meninggalkan interaksi antar individu secara fisik-alami dan cenderung mengasingkan individu dari komunitas sekelilingnya. Komunikasi *on-line* dan digital mengaburkan sosok utuh kemanusiaan. Kecenderungan itu telah berlangsung luas, melintasi batas wilayah dan negara, dan *civitas academica* Perguruan Tinggi Indonesia tidak terkecualikan pula darinya.

Untuk mengimbangi penggerusan sosok utuh kemanusiaan itulah pendidikan dituntut untuk memberikan respon yang tepat. Salah satu respon dunia pendidikan adalah pengembangan metode pedagogi yang baru. *Service Learning* (SL) adalah sebuah “ramuan” pedagogi yang mengintegrasikan perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar demi menanamkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan penguatan masyarakat. SL memenuhi azas lima “r”: *relationship* (relasi), *rigor* (kokoh), *reciprocity* (timbal balik), *reflection* (refleksi), *real life* (kehidupan nyata)¹. Dalam konsep Bonner Foundation, tiga prinsip SL adalah *collaborative* (kerjasama), *validates multiple sources of knowledge* (menghormati keragaman sumber pengetahuan), dan *social action and social change* (gerakan dan perubahan sosial).

Selain perubahan model pedagogi, sebenarnya ada satu faktor “klasik” yang tidak bisa dikesampingkan yaitu inspirasi dosen. Sebagai elemen yang “abadi” dalam profesi guru, dosen memang dituntut untuk menyadari bahwa mereka adalah sosok yang berpeluang menjadi sumber inspirasi bagi para mahasiswa. Untuk bisa memberikan inspirasi tentu saja para dosen harus memiliki wawasan yang luas – bukan hanya menguasai bidangnya secara khusus melainkan harus berusaha mengembangkan apa yang disebut sebagai model T dalam pengembangan keilmuan. Setiap sosok dosen harus berupaya mengembangkan wawasannya selubar mungkin untuk memberi konteks yang lengkap bagi ilmu yang semakin dalam mereka gali.

Dalam banyak kasus, inspirasi sebenarnya bisa disemaiakan oleh semua dosen yang menghayati dan berdedikasi pada profesiinya. Syaratnya hanya satu. Dalam membagikan ilmu dan menuntun jiwa-pikiran muda para mahasiswa sang dosen tidak sekedar menggunakan ketajaman olah pikirnya – tetapi yang jauh lebih

penting dari itu adalah menggunakan kepekaan hatinya. Dosen boleh bergelar doktor dan profesor dengan beragam ilmu yang mereka kuasai tapi satu hal yang harus selalu menjadi prioritas, yaitu mereka harus mencerminkan satu sikap dan perilaku – yaitu mengutamakan mahasiswa.

Penutup

Globalisasi telah memicu lahirnya sebuah revolusi akademik karena sifatnya yang global dan dampaknya yang luas terhadap banyak orang dan lembaga. Untuk menghadapi revolusi akademik itu, Perguruan Tinggi Indonesia perlu menyiapkan lulusannya agar memiliki kompetensi kewargaan global (*global citizenship*). Pendidikan kewargaan global harus mulai diperkenalkan di kampus kampus negeri ini, sehingga para mahasiswanya “melek” globalisasi (*globally literate*). Jika universitas universitas di Indonesia mampu membekali lulusannya dengan kompetensi *global citizenship* dipadu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat diharapkan terwujudnya mobilitas warga Indonesia yang lebih bermutu.

Untuk menunaikan peran sepenuh-penuhnya, universitas harus mampu menyeimbangkan pemenuhan aspirasi global dan peran lokalnya. Universitas tidak seharusnya melupakan alasan kelahirannya. Universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Ketika harus hidup dalam masyarakat ilmu pengetahuan, universitas memiliki empat tujuan utama, yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) mendukung perekonomian, (4) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab. Universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Dalam menyikapi “kabar baik” perkembangan Indonesia, *civitas academica* universitas selayaknya mengutamakan posisi obyektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis, sehingga tidak terjebak dalam **Kesalahan Jenis Pertama**. Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru. Indonesia dialami oleh mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

Untuk mengimbangi penggerusan sosok utuh kemanusiaan itulah pendidikan dituntut untuk memberikan respon yang tepat. Salah satu respon dunia pendidikan adalah *Service Learning* (SL)—sebagai metode pedagogi yang baru. Metode ini meramu perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat dan refleksi untuk memperkaya pengalaman belajar demi menanamkan tanggung jawab warga negara (global sekaligus lokal) dan penguatan masyarakat. Dengan tiga prinsipnya: (1) kerjasama, (2) penghormatan pada keragaman sumber pengetahuan) dan (3) gerakan dan perubahan sosial – SL berperan menjembatani “ketegangan” global-lokal.

Daftar Bacaan

- Altbach, P.G., L. Reisberg & L.E. Rumbley (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Executive Summary. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. UNESCO. Paris.
- Johnstone, D.B., M.B. d'Ambrosio & P.J. Yakoboski (Eds.) (2010). Higher Education in a Global Society. In association with TIAA-CREF. Edward Elgar, Cheltenham.
- Kieser, B. (2009). Pendidikan Tinggi/Universitas yang Menekankan “Option for the Poor” dan Keadilan: Katolik, karena ber-Optik-Berat-Sebelah. Bahan Hari Studi APTIK.

- Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. *Educause Review*. Jan/Feb: 16-25.
- Widianarko, B. (2011). Universitas, Gerbang Kemajuan Indonesia. SUARA MERDEKA, 8 Agustus.
- _____ (2012). Mobilitas yang Bermutu. SUARA MERDEKA, 16 Januari.
- Wissema, J.G. (2009). Toward Third Generation University – Managing University in Transition. Edward Elgar. Cheltenham.

Universitas dalam Perekonomian Berbasis Ilmu Pengetahuan*

Pendahuluan

Ideal Universitas Katolik seperti yang tertuang dalam *Ex corde Ecclesiae* – Konstitusi Apostolik tentang Pendidikan Tinggi (1990) - adalah “*By vocation, the Universitas magistrorum et scholarium is dedicated to research, to teaching and to the education of students who freely associate with their teachers in a common love of knowledge*”. Sebagai sebuah Universitas Katolik, UNIKA Soegijapranata sudah selayaknya mewujud sebagai sebuah rumah belajar (*a place of learning*) bagi *civitas academicanya*. Di rumah belajar mahasiswa bukan hanya dikuliah, melainkan belajar. Begitu pula para dosen ke kampus bukan hanya untuk memberikan kuliah melainkan juga terus belajar. Di kampus UNIKA Soegijapranata mahasiswa dan dosen telah dan akan terus mereguk kesukacitaan belajar (*the joy of learning*) dengan semangat cinta akan ilmu pengetahuan (*in a common love of knowledge*). Dalam spirit inilah kecintaan pada ilmu pengetahuan (*knowledge*) perlu dirayakan. Tidak keliru kiranya jika dalam dua hari ini UNIKA Soegijapranata mengadakan perhelatan yang bertajuk *Knowledge Festival*. Upaya terus menerus untuk menggali

* Disajikan dalam *Knowledge Festival* Unika Soegijapranata, 29 Maret 2016

dan mengembangkan ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang harus dipertandingkan, melainkan harus dirayakan sebagai perwujudan spirit cinta ilmu pengetahuan.

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu. Dalam konteks kekinian sekalipun, ketika harus hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*), kecuali mendukung perekonomian - tiga dari empat tujuan utama universitas menyangkut proses belajar (*learning*) yaitu: (1) menginspirasi dan memampukan individu-individu untuk mengembangkan kemampuan intelektual hingga ke tingkat yang paling tinggi, (2) memajukan pengetahuan dan pemahaman, (3) membentuk masyarakat yang demokratik dan beradab (Lord Dearing's National Committee of Inquiry into Higher Education UK, seperti dikutip Laurillard, 2002). Masih menurut Laurillard (2002), dengan terpenuhinya keempat tujuan itu diharapkan universitas dapat berperan untuk memampukan masyarakat untuk terus secara mandiri memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri dan dunia sekitarnya - *to enable society to maintain an independent understanding of itself and its worlds*. Dengan kata lain dengan ilmu pengetahuannya universitas harus senantiasa mendampingi masyarakat dalam mengarungi perubahan jaman.

Dalam perkembangannya, universitas merupakan unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge economy*) (Lendel, 2010). Pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai layaknya sebuah industri multi-produk. Dalam kerangka ini, setidaknya terdapat tujuh produk universitas – yaitu (1) pendidikan, (2) penelitian kontrak, (3) produk budaya, (4) tenaga kerja terlatih, (5) difusi teknologi, (6) penciptaan pengetahuan baru, dan (7) produk dan industri baru (Lendel, 2010). Dalam kerangka itu, idealnya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh universitas berkontribusi

langsung terhadap pembangunan daerah. Kontribusi tersebut seyogyanya dapat ditemukan jejaknya bukan hanya dalam kebijakan, melainkan juga dalam berbagai rencana dan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, kegiatan penelitian universitas merupakan aktivitas *knowledge economy* di suatu daerah.

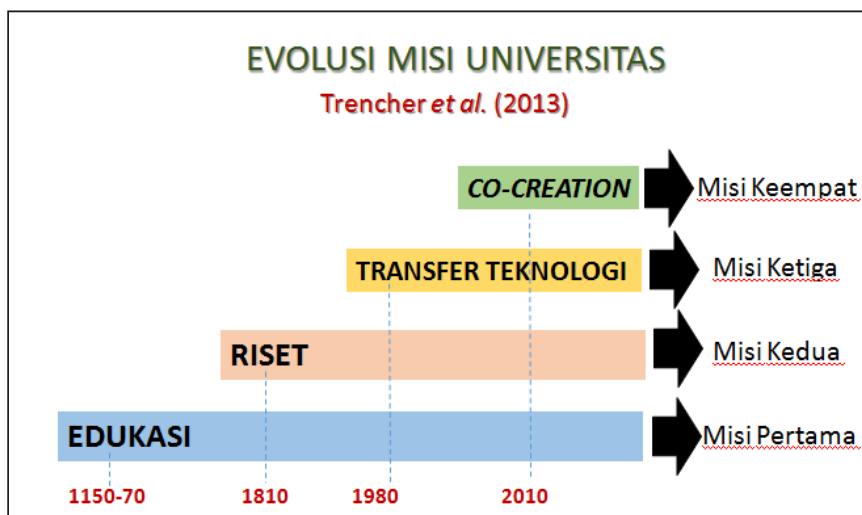
Tulisan ini memerikan posisi universitas sebagai rumah belajar dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Kontribusi universitas bagi pembangunan wilayah semakin beragam dan kompleks seiring dengan proses evolusi yang dialami oleh universitas – dari universitas klasik ke transformatif. Untuk mengoptimalkan peran universitas sebagai pemasok pengetahuan dan teknologi bagi perekonomian suatu wilayah diperlukan suatu model tata kelola khusus. Dengan ilustrasi dari bidang pangan, bagian akhir tulisan ini menawarkan model tata kelola penelitian berbasis pembagian risiko (*risk sharing*).

Evolusi Universitas

Dalam sejarahnya, ada suatu masa ketika universitas dilahirkan oleh dan demi membela hak-hak dan kepentingan warga masyarakat (kota). Universitas-universitas di Eropa pada abad pertengahan, seperti Bologna (1158), Paris (1170), Cambridge (1209) dan Praha (1348) didirikan oleh warga kota. Sebagai *Universitas scientiarum*, universitas-universitas itu dijalankan oleh masyarakat warga (*civil society*) – sehingga tanggung jawab universitas adalah tanggungjawab kewargaan (Kieser, 2009).

Universitas mengalami evolusi, berkembang dari universitas klasik hingga universitas transformatif. Penciri utama masing-masing generasi universitas terletak pada pergeseran misinya (Trencher *et al.*, 2013). Gambar 1. menunjukkan evolusi universitas sesuai dengan perubahan misinya. Peningkatan generasi tidak

serta merta menghapus mandat universitas generasi sebelumnya. Pada generasi kedua, atau dikenal sebagai universitas riset, universitas bukan hanya sekedar *research powerhouse*. Universitas juga memiliki mandat untuk berkontribusi dalam penciptaan modal sumberdaya nara (*human capital creation*) dan pembentukan kepemimpinan (*provision of leadership*) serta transformasi masyarakat.



Gambar 1. Evolusi Universitas menurut Misinya

Universitas generasi kedua selanjutnya berevolusi menjadi universitas generasi ketiga, yang dikenal sebagai *entrepreneurial university*. Kelahiran "spesies" universitas *entrepreneurial* ini ternyata bukan akhir evolusi universitas moderen. Dengan adanya tantangan degradasi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan universitas dituntut untuk berperan sebagai agen transformasi sosial (*university as societal transformer*) dan sekaligus *co-creator*. Meminjam istilah Trencher et al. (2013) "*Boundaries between 'town and gown' are dissolving..*".

Dalam kerangka di atas, universitas transformatif atau universitas *co-creator* dimaknasi sebagai universitas yang secara aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, industri, bisnis, dan masyarakat sipil sebagai pendorong terjadinya transformasi wilayah/daerah atau sub-sektor masyarakat tertentu. Universitas transformatif berkolaborasi dengan beragam pelaku sosial untuk menciptakan transformasi masyarakat dengan tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah, wilayah dan sub-sektor masyarakat tertentu. Pergeseran menuju universitas transformatif menuntut perubahan paradigma penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada pendekatan (a) penelitian partisipatif & *action research*, (b) *service learning*, (c) transfer teknologi, (d) *transdisciplinarity*, (e) sistem penyuluhan, (f) pembangunan wilayah, dan (g) laboratorium hidup.

Seperti tercermin dari mottonya, “*Talenta pro patria et humanitate*”, UNIKA Soegijapranata telah memiliki DNA universitas transformatif. Ciri transformatif tersebut tercermin dari misi UNIKA Soegijapranata, terutama misi (1) sampai dengan (4), yaitu: (1) *Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas secara akademik dengan didukung pengembangan kepribadian yang utuh dan potensi kepemimpinan*; (2) *Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan manusia*; (3) *Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dalam penelitian demi kesejahteraan manusia*; (4) *Memberikan perhatian dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah sosial budaya masyarakat melalui komunitas akademik*. Maka adalah sebuah keniscayaan bahwa setiap derap langkah UNIKA Soegijapranata untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan akademik harus senantiasa diimbangi oleh niat untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat dan kemanusiaan.

Penelitian dan Knowlegde Economy

Berdasarkan pengamatan di bidang pangan Widianarko (2011a) menemukan gejala saling asing (*mutually exclusive*) di antara kegiatan penelitian di universitas dan praksis pengembangan produk pangan baru oleh pelaku usaha. Pengalaman selama ini menunjukkan kaitan yang minimal antara riset pangan universitas atau lembaga penelitian dan praksis pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha. Selain itu, banyak produk pangan baru hasil pengembangan pelaku usaha – termasuk usaha kecil – tidak menggunakan bahan baku lokal. Ketiadaan keterkaitan itu terjadi karena penelitian universitas dan pengembangan produk merupakan dua kegiatan yang saling asing. Begitu pula, kegiatan produksi pertanian dan pengembangan produk pangan masih saling asing, atau dibiarkan berlangsung alami tanpa skenario keterpaduan. Untuk menjalankan agenda tersebut secara efektif diperlukan langkah terobosan, keluar dari pendekatan yang biasa (*business as usual*).

Pengamatan empirik di Jawa Tengah menunjukkan bahwa telah berlangsung proses saling asing antara kegiatan penelitian pangan oleh universitas, di satu sisi dan pengembangan produk pangan oleh pelaku usaha, di sisi lain. Para pelaku usaha berhasil mengembangkan atau merekacipta banyak produk pangan baru yang bukan saja inovatif tetapi juga bernilai tambah tinggi dan sekaligus berhasil di pasar (Widianarko, 2011a). Produk pangan yang berhasil dikembangkan oleh pelaku usaha tanpa melalui jalur penelitian formal – oleh universitas – antara lain *ceriping*, *gethuk*, *sirup berbasis buah lokal*, *bandeng duri lunak*, *marning*, “*dodol*” *tomat*, *manisan buah*, *olahan tahu dan aneka minuman serbuk* – untuk menyebut beberapa. Produk- produk seperti Gethuk Trio Magelang, Bandeng Duri Lunak Semarang, Marning Boyolali, Gethuk “Putih” Salatiga, Tomat Rasa Korma (TORAKUR) Bandungan dan Tahu bakso Ungaran berhasil menjadi *icon* daerahnya masing masing.

Menurut pengamatan sebagian besar produk pangan baru bernilai tambah tinggi yang berhasil di pasar adalah dalam kategori *snack* atau pengangan. Produk pengangan khas daerah mengalami permintaan yang meninggi seiring dengan pertumbuhan kegiatan wisata domestik. Salah satu rahasia di balik keberhasilan para *local genius* – pengembang pengangan lokal – adalah kemampuan mereka dalam mendengar suara konsumen. Namun, dari perspektif penelitian sebenarnya yang mereka lakukan sebagian besar masih bertumpu pada metode coba coba (*trials and errors*) yang diramu dengan intuisi bisnis.

Di sisi lain, berbagai upaya pendampingan telah dilaksanakan oleh universitas, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat untuk pengembangan aneka produk pangan. Upaya yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut belum banyak menghasilkan produk pangan yang berhasil di pasar dan benar-benar bisa mengangkat perekonomian daerah. Hasil pengabdian masyarakat bertajuk penganekaragaman pangan oleh universitas, misalnya, banyak terserak hanya dalam bentuk laporan dan dokumentasi. Aneka produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat atas pendampingan lembaga-lembaga di atas – meskipun terkesan menjanjikan – acap kali hanya berhenti sebagai produk “*gimmick*” untuk pameran dan upacara saja (Widianarko, 2011b).

Dari tahun ke tahun pendanaan penelitian yang tersedia cenderung terus meningkat dan sudah selayaknya tidak menjadi masalah lagi. Yang diperlukan sekarang adalah penetapan prioritas penelitian yang berorientasi pada produk. Orientasi ini diperlukan agar kegiatan penelitian memiliki kontribusi langsung terhadap perekonomian, sebagai imperatif *knowledge economy*. Penelitian selayaknya menghasilkan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Hambatan yang dapat diduga adalah terjadinya gejala saling asing antara penelitian dan pengembangan produk komersial adalah ketiadaan prinsip *risk sharing*. Ketiadaan *risk sharing* menyebabkan pelaku penelitian menghasilkan penelitian yang tidak memiliki nilai terap, sehingga hasil penelitiannya tidak *accountable*. Untuk itu diperlukan sebuah tata kelola penelitian baru yang didasarkan pada prinsip *risk sharing*. Untuk menjawab hambatan tersebut maka diperlukan sebuah tata kelola penelitian yang baru. Peran langsung universitas dapat dioptimalkan dalam mendukung kemajuan perekonomian melalui penciptaan aneka produk pangan baru yang bernilai tambah tinggi dan diterima oleh konsumen (pasar).

Kerjasama penelitian berbasis *risk sharing* memang merupakan paradigm baru dalam dunia ilmiah. Paradigma baru ini muncul sebagai tuntutan alamiah dari *knowledge economy*. Dalam paradigma baru ini institusi pelaku penelitian dituntut untuk mampu menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan penelitian. Dengan kata lain kegiatan penelitian dan ilmiah harus bermuara pada (*monetary*) *value creation*. Di samping itu, dalam *knowledge economy* dalam setiap kerjasama maka para pihak memiliki hak dan tanggung jawab. Hal ini tentu juga berlaku bagi para pekerja ilmu yang bernaung di universitas.

Definisi formal untuk *risk-sharing agreement* dalam kerjasama penelitian menurut de Pouvourville (2006) adalah “*kontrak di antara dua pihak yang sepakat untuk bertransaksi dengan kesadaran penuh bahwa ada ketidakpastian (uncertainty) yang melekat pada hasil dan nilai akhir dari produk penelitian yang dihasilkan*”. Dengan demikian kedua pihak siap menerima imbalan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) sesuai dengan status produk penelitian yang dihasilkan. Jika hasil penelitian terbukti memiliki nilai komersial yang tinggi maka pihak pemberi proyek harus bersedia memberikan imbalan (sesuai kesepakatan),

sedangkan jika terjadi yang sebaliknya maka pihak pelaksana proyek harus bersedia menerima sanksi.

Model tata kelola penelitian berbasis *risk-sharing* di atas tentu saja sangat berbeda dari kelaziman pelaksanaan proyek penelitian di universitas hingga saat ini. Kebiasaan yang berlaku selama ini masih mengasumsikan bahwa setiap pelaku kegiatan penelitian – bagaimanapun status hasilnya – sudah selayaknya mendapatkan imbalan atas jerih payahnya. Untuk mengoptimalkan peran penelitian dalam menopang perekonomian daerah melalui industri pangan, tata kelola penelitian yang berbasis *risk-sharing* layak untuk direkomendasikan. Dalam kerangka ini penetapan imbalan dan sanksi menjadi hal yang sangat strategik. Imbalan (finansial) yang disediakan untuk produk pangan yang berhasil harus menarik para peneliti untuk melaksanakan proyek penelitian. Sanksi (finansial) yang dapat dibebankan pada peneliti yang gagal menghasilkan produk yang sukses adalah peniadaan imbalan bagi jerih payahnya. Meskipun demikian, direkomendasikan agar seluruh biaya penelitian tetap ditukar (*at cost*) oleh pemberi proyek. Dengan tata kelola baru ini setiap kegiatan penelitian pangan dengan sendirinya akan *accountable* dan berpeluang besar untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berhasil di pasar.

Penutup

Hakekat universitas sebagai rumah belajar tidak lekang oleh waktu termasuk ketika universitas hidup di tengah masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Sebagai unsur inti dari infrastruktur intelektual suatu daerah dalam perkonomian berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge economy*) universitas harus mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan suatu wilayah. Seiring dengan evolusinya, peran universitas dalam pembangunan wilayah semakin beragam dan kompleks.

Melalui kegiatan penelitian universitas berperan sebagai penggali dan pengembang ilmu pengetahuanyang merupakan unsur krusial dalam perekonomian berbasis ilmu pengetahuan. Model tata kelola penelitian berbasis *risk sharing* muncul sebagai tuntutan alamiah dari *knowledge economy*. Sebagai paradigma baru, model tata kelola ini menuntut pelaku penelitian untuk menciptakan nilai ekonomi dari kegiatannya. Yang Pada akhirnya kegiatan penelitian diharapkan bermuara pada (*monetary*) *value creation*.

Daftar Bacaan

- de Pouvourville, G. (2006). Risk-sharing agreements for innovative drugs: A new solution to old problems?. *Eur J Health Econ.* 7:155–157 - DOI 10.1007/s10198-006-0386-6
- Kieser, B. (2009). Pendidikan Tinggi/Universitas yang Menekankan “*Option for the Poor*” dan Keadilan: Katolik, karena ber-Optik-Berat-Sebelah. Bahan Hari Studi APTIK.
- Laurillard, D. (2002). Rethinking Teaching for the Knowledge Society. *Educause Review*. Jan/Feb: 16-25.
- Lendel, I. (2010). The impact of research universities on regional economies: The concept of university products. *Economic Development Quarterly* 24(3): 210-230.
- Trencher, G., M. Yarime, K.B. McCormick, C.N.H. Doll & S.B. Kraines (2013). Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability. *Science and Public Policy* 41(2):151-179
- Widianarko, B. (2011a). Perubahan Paradigma Panganekaragaman Pangan. SUAR Juni 2011
- _____ (2011b). Rethinking the Food Diversification Program. The Jakarta Post. Nov. 8.